LAPORAN

CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

Disusun oleh:
Center for Sustainable Development Goals Studies
(SDGs Center)
Universitas Padjadjaran

Kata Pengantar

Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah menyelesaikan laporan kajian "Proyeksi Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023". Laporan ini merupakan hasil kerja sama antara Center for Sustainable Development Goals Studies (SDGs Center) Universitas Padjadjaran dengan Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat yang memaparkan kemajuan dan hasil analisis proyeksi baseline pencapaian indikator SDGs di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, laporan ini juga memberikan pemetaan dan *scorecard* untuk setiap indikator SDGs di Kabupaten Bandung Barat.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Semoga laporan ini dapat menjadi panduan yang berharga dalam perjalanan menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030.

Bandung, November 2023

Tim Penyusun

bappelitbangda

Daftar Isi

Kata Pengantar
Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar.....
Daftar Singkatan..... vii
Bab 1 Pendahuluan..... 9
1.1 Latar Belakang 9
1.2 Maksud dan Tujuan Kajian 10
1.3 Sasaran Kajian.....10
1.4 Ruang Lingkup.....11
1.5 Jadwal Kajian.....11
Bab 2 Kajian Pustaka..... 12
2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).....12
Bab 3 Data dan Metodologi 16
3.1 Data.....16
3.2 Metadata Indikator SDGs.....24
3.3 Proyeksi *Baseline* 76
3.4 Target dan *Scorecard*.....77
3.5 Catatan Konsistensi Data Kabupaten/Kota 83
Bab 4 Hasil dan Pembahasan 85
4.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan 85
4.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.....97
4.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 101
4.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.....108
4.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender.....136
4.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 139
4.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau 143
4.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 144
4.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur 153
4.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan.....155
4.11 Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan 158
4.12 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat 161
4.13 Tujuan 17 Kemitraan dan Mencapai Tujuan.....165

bappelitbangda

Bab 5 Kesimpulan 167
Daftar Pustaka 175

bappelitbangda

Daftar Tabel

Tabel 1-1 Jadwal Kajian 11
Tabel 3-1 Daftar Indikator Terpilih untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat 18
Tabel 3-2 Jenis *Trend* dan Spesifikasi Model Regresi 77
Tabel 3-3 Target Kuantitatif Indikator SDGs Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2030 79
Tabel 3-4 Sistem Penilaian *Scorecard* SDGs Tahun 2030 83
Tabel 4-1 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 1 85
Tabel 4-2 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 2 97
Tabel 4-3 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 3 101
Tabel 4-4 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 4 109
Tabel 4-5 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 5 136
Tabel 4-6 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 6 140
Tabel 4-7 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 7 143
Tabel 4-8 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 8 145
Tabel 4-9 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 9 153
Tabel 4-10 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 10 156
Tabel 4-11 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 11 158
Tabel 4-12 Data indikator 11.5.1* 160
Tabel 4-13 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 16 161
Tabel 4-14 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 17 165
Tabel 5-1 Jumlah indikator dengan *scorecard* 167
Tabel 5-2 Perbandingan proyeksi pencapaian indikator SDGs Tahun 2022 dan 2023 168

bappelitbangda

Daftar Gambar

Gambar 2-1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 13

Gambar 2-2 Jaringan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Terintegrasi 15

Gambar 3-1 Bagan Perjalanan Wisatawan Nusantara 62

Gambar 3-2 Ilustrasi Proyeksi Terhadap Target SDGs 2030 78

Gambar 4-1 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional 87

Gambar 4-2 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40) (%) 88

Gambar 4-3 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40) 88

Gambar 4-4 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40) 89

Gambar 4-5 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga kumuh perkotaan (B40) 89

Gambar 4-6 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat (B40) (%) 90

Gambar 4-7 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat (B40) (%) 91

Gambar 4-8 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat (B40) (%) 91

Gambar 4-9 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (B40) 92

Gambar 4-10 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar, akses pada layanan air minum 93

Gambar 4-11 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar, akses pada layanan sanitasi dasar 94

Gambar 4-12 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar, akses pada fasilitas penyehatan dasar 94

bappelitbangda

Gambar 4-13 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (B40) 95

Gambar 4-14 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan kontrak/sewa 96

Gambar 4-15 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah tipe kepemilikan milik sendiri 96

Gambar 4-16 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan 98

Gambar 4-17 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevelansi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita..... 99

Gambar 4-18 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (0-59 Bulan)..... 100

Gambar 4-19 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita (0-59 Bulan)..... 100

Gambar 4-20 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih..... 102

Gambar 4-21 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan..... 102

Gambar 4-22 Kejadian malaria per 1000 orang..... 103

Gambar 4-23 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern 104

Gambar 4-24 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan..... 105

Gambar 4-25 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase penduduk dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga (Lebih dari 10% total pengeluaran rumah tangga) 106

Gambar 4-26 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase penduduk dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga (Lebih dari 25% total Pengeluaran Rumah Tangga) 106

bappelitbangda

Gambar 4-27 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) 107

Gambar 4-28 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau 108

Gambar 4-29 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 APK SD/MI/ sederajat..... 112

Gambar 4-30 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 APK SMP/MTS/sederajat..... 113

Gambar 4-31 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 APK SMA/SMK/Sederajat..... 113

Gambar 4-32 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun keatas..... 114

Gambar 4-33 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/Sederajat 115

Gambar 4-34 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/Sederajat..... 115

Gambar 4-35 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/Sederajat..... 116

Gambar 4-36 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir..... 117

Gambar 4-37 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)..... 117

Gambar 4-38 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 118

Gambar 4-39 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir..... 119

Gambar 4-40 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir..... 119

Gambar 4-41 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki..... 120

Gambar 4-42 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas..... 121

Gambar 4-43 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki..... 122

bappelitbangda

Gambar 4-44 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas 122

Gambar 4-45 **Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk perdesaan dan perkotaan** 123

Gambar 4-46 **Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat antara disabilitas dan non-disabilitas** 124

Gambar 4-47 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/Sederajat untuk perempuan/laki-laki 124

Gambar 4-48 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas 125

Gambar 4-49 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/sederajat, antara pedesaan dan perkotaan 126

Gambar 4-50 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, untuk perempuan/ laki-laki 126

Gambar 4-51 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas 127

Gambar 4-52 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat antara pedesaan dan perkotaan 127

Gambar 4-53 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki 128

Gambar 4-54 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas 129

Gambar 4-55 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki 129

Gambar 4-56 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas 130

Gambar 4-57 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat antara pedesaan dan perkotaan 130

Gambar 4-58 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat antara disabilitas dan non-disabilitas 131

Gambar 4-59 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk perempuan/ laki-laki 131

bappelitbangda

Gambar 4-60 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas 132

Gambar 4-61 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk perempuan/ laki-laki 133

Gambar 4-62 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas 133

Gambar 4-63 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya 134

Gambar 4-64 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya 135

Gambar 4-65 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya 135

Gambar 4-66 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun 137

Gambar 4-67 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun 138

Gambar 4-68 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial 138

Gambar 4-69 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir 139

Gambar 4-70 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman 141

Gambar 4-71 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak 141

Gambar 4-72 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air 142

Gambar 4-73 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak 143

Gambar 4-74 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 rasio penggunaan gas rumah tangga. 144

Gambar 4-75 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 laju pertumbuhan PDB per kapita 146

bappelitbangda

Gambar 4-76 Grafik data historis PDB per kapita (ribu rupiah) 146

Gambar 4-77 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun 147

Gambar 4-78 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi lapangan kerja informal. 148

Gambar 4-79 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 persentase tenaga kerja formal. 149

Gambar 4-80 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. 149

Gambar 4-81 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 upah rata-rata per jam kerja (rupiah). 150

Gambar 4-82 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 tingkat pengangguran terbuka. 151

Gambar 4-83 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 tingkat setengah pengangguran. 151

Gambar 4-84 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET). 152

Gambar 4-85 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta). 153

Gambar 4-86 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. 154

Gambar 4-87 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband 155

Gambar 4-88 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 koefisien gini. 156

Gambar 4-89 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 157

Gambar 4-90 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang hidup 50 persen dari median pendapatan. 158

Gambar 4-91 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 159

Gambar 4-92 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. 160

bappelitbangda

Gambar 4-93 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. 162

Gambar 4-94 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi. 163

Gambar 4-95 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran 163

Gambar 4-96 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 presentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah..... 164

Gambar 4-97 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 presentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun..... 165

Gambar 4-98 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi individu yang menggunakan internet..... 166

Gambar 5-1 Bagan Rekomendasi Indikator SDGs Prioritas Kabupaten Bandung Barat 174

bappelitbangda

Daftar Singkatan

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
ART	Anggota Rumah Tangga
Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAU	*Business as Usual*
BPS	Badan Pusat Statistik
DIBI	Data Informasi Bencana Indonesia
ILO	*International Labour Organization*
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemnaker	Kementerian Ketenagakerjaan
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KRT	Kepala Rumah Tangga
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiah
MDGs	*Milenium Development Goals*
MTs	Madrasah Tsanawiyah
NEET	*Not in Education, Employment, or Training*
OLS	*Ordinary Least Square*
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PDB	Produk Domestik Bruto
PEMDA	Pemerintah Daerah
PKL	Pusat Kegiatan Lokal
PLB	Pendidikan Luar Biasa
PLN	Perusahaan Listrik Negara

bappelitbangda

PPK	Pusat Pelayanan Kawasan
PPL	Pusat Pelayanan Lingkungan
PPN	Perencanaan Pembangunan Nasional
PT	Perguruan Tinggi
Pusdatin	Pusat Data dan Informasi
RAD	Rencana Aksi Daerah
RAN	Rencana Aksi Nasional
RISKESDAS	Riset Kesehatan Dasar
RLS	Rata-rata lama sekolah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SUSENAS	Survei Sosio Ekonomi Nasional
SAKERNAS	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDGs	*Sustainable Development Goals*
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UN	*United nations*
UN-DESA	*The United nations Department of Economic and Social Affairs*
WASH	*Water, Sanitation and Hygiene*
WHO	*World Health Organization*

bappelitbangda

BAB 1
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) memasuki tahun kedelapan pada tahun 2023. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mengungkapkan bahwa capaian SDGs Indonesia secara global hingga tahun 2022 hanya mencapai 12%. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak untuk memastikan upaya keras dan strategis dalam mencapai TPB/SDGs pada tahun 2030, salah satunya melalui kemitraan multipihak, termasuk pemerintah daerah. Akselerasi bisa dicapai dengan mengkoordinasikan berbagai pihak, menciptakan sinergi lintas sektor dan lembaga, meningkatkan pengumpulan data, mengadopsi praktik-praktik terbaik, dan mencari sumber pendanaan inovatif.

Saat ini, TPB/SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 289 indikator yang tidak hanya menekankan pada peningkatan kesejahteraan, namun bersifat menyeluruh tanpa membedakan siapapun. Penyusunan indikator dan data menjadi salah satu tugas dan fungsi dari pemerintah terutama pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah memiliki tugas dan fungsi dalam menyusun kebijakan, target, program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dirancang.

Penyusunan kebijakan mengenai perencanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dituangkan dalam Peta Jalan Nasional (*Roadmap* SDGs) yang telah mengalami revisi pada tahun 2023 berdasarkan adanya Peraturan Presiden No.111 Tahun 2022 mengenai Pelaksanan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang kemudian diikuti dengan penyesuaian Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD). Target dan indikator dari 17 TPB/SDGs juga menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang, 7 agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan juga Visi, Misi Indonesia 2045. Sedangkan untuk pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga berbagai pihak seperti pemerintah pusat, akademisi, organisasi non-pemerintah, masyarakat/komunitas, sektor swasta, dan organisasi internasional.

bappelitbangda

Dalam mendukung pencapaian TPB/SDGs, pemerintah daerah (dalam hal ini provinsi) memiliki tanggung jawab dalam menyelaraskan target dan program dengan pemerintah pusat yang dituangkan dalam RAD TPB/SDGs. Perencanaan target dan program pada periode berikutnya didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs yang dikoordinasikan dengan Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs dilakukan setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yang didukung oleh data dan informasi dari pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu adanya kajian proyeksi pencapaian indikator TPB/SDGs yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi pencapaian indikator TPB/SDGs di Kabupaten Bandung Barat, serta proyeksi pencapaian indikator TPB/SDGs pada tahun 2030.

1.2 Maksud dan Tujuan Kajian

Penelitian mengenai indikator TPB/SDGs di Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan bertujuan untuk menjadikan SDGs sebagai prioritas utama dalam pengembangan daerah juga untuk mendukung penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Secara tidak langsung, kajian peroyeksi pencapaian indikator SDGs Kabupaten Bandung Barat dapat berperan aktif dalam mendukung pencapaian SDGs di tingkat Provinsi dan Nasional pada tahun 2030. Secara khusus, tujuan dari kajian ini diantaranya:

a) Memfasilitasi penyusunan laporan Proyeksi Pencapaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.
b) Mengukur pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Bandung Barat dengan *asumsi business-as-usual* (BAU).
c) Mensosialisasikan hasil Proyeksi Pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Bandung Barat;

1.3 Sasaran Kajian

Diharapkan dari kajian ini dapat menghasilkan suatu keluaran yang bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah daerah sehingga perencanaan dan pelaksanaan TPB/SDGs bisa optimal dengan sasaran sebagai berikut:

bappelitbangda

a) Terfasilitasinya Penyusunan Laporan Proyeksi Pencapaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bandung Barat.
b) Terukurnya pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Bandung Barat dengan *asumsi business-as-usual* (BAU).
c) Tersosialisasinya hasil Proyeksi Pencapaian TPB/SDGs pada perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat;

1.4 Ruang Lingkup

Agar kajian dapat mencapai tujuan yang dimaksud, perlu adanya batasan dan ruang lingkup kajian yang jelas diantaranya:

a) Melaksanakan koordinasi terkait perencanaan pekerjaan;
b) Mengkaji data dan menganalisis hasil proyeksi pencapaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Bandung Barat;
c) Melaksanakan sosialisasi hasil proyeksi pencapaian indikator TPB/SDGs terpilih;
d) Mendokumentasikan dan mencetak laporan kajian "Proyeksi Pencapaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023"

1.5 Jadwal Kajian

Kajian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1-1 Jadwal Kajian

No	KEGIATAN	MINGGU KE-			
		II			
		1	2	3	4
1.	Persiapan dan inisiasi kerjasama				
2.	Pengolahan data dan analisis hasil				
3.	Sosialisasi hasil				
4.	Laporan akhir				
5.	Revisi dokumen				

bappelitbangda

BAB 2
Kajian Pustaka

2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembangunan berkelanjutan melibatkan pemahaman tentang dampak sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup agar lingkungan tersebut dapat terus berfungsi dengan baik. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, menjaga kelangsungan kehidupan sosial, mempertahankan kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas hidup bagi setiap generasi. Terdiri dari 17 tujuan yang dikelompokkan dalam empat pilar sebagai berikut (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018):

Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Pilar Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia berkualitas.	- Tujuan 1 Tanpa kemiskinan - Tujuan 2 Tanpa kelaparan - Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera - Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas - Tujuan 5 Kesetaraan Gender
Pilar Ekonomi meliputi penyediaan energi untuk semua, faktor penting dalam mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan dan penurunan kemiskinan	- Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau - Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi - Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur - Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan - Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
Pilar Lingkungan merupakan landasan semangat transformatif pembangunan berkelanjutan	- Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi yang Layak - Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan - Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan - Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim - Tujuan 14 Ekosistem Laut - Tujuan 15 Ekosistem Daratan
Pilar Hukum dan Tata Kelola	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

bappelitbangda



Gambar 2-1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Sumber: Bappenas)

Penguatan pelaksanaan TPB/SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, menekankan pada:

- Pemutakhiran sasaran nasional TPB/SDGs yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
- Menekankan peran para pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk pelaku usaha
- Mendorong platform pendanaan inovatif untuk TPB/SDGs, pendanaan inovatif adalah sumber-sumber dan skema pendanaan yang berasal dari para pemangku kepentingan nonpemerintah, baik lingkup global, nasional, maupun daerah, untuk mengakselerasi pencapaian TPB/SDGs.
- Menguatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pelaku usaha
- Amanat memutakhirkan peta jalan TPB/SDGs dan RAN TPB/SDGs

Indonesia sebagai negara anggota PBB berkomitmen dalam pelaksanaan TPB/SDGs dengan melakukan penyelarasan dengan perencanaan nasional dan peraturan yang relevan. Dokumen peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) di tingkat provinsi adalah langkah konkret yang diambil untuk mencapai sasaran pembangunan

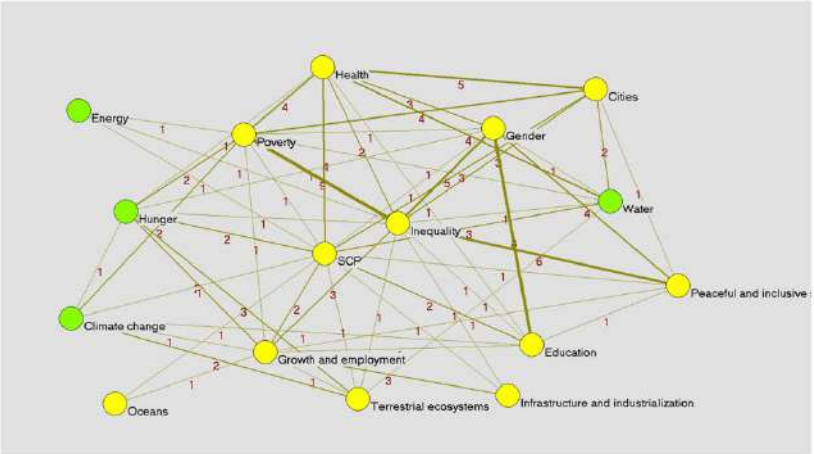
bappelitbangda

berkelanjutan hingga tahun 2030. TPB/SDGs mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga memiliki prinsip 5P, yaitu: *People* (manusia), *Planet* (bumi), *Prosperity* (kemakmuran), *Peace* (perdamaian), dan *Partnership* (kerjasama).

Prinsip *People* bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu dapat hidup tanpa kemiskinan dan kelaparan, serta memastikan hak-hak mereka untuk menjalani kehidupan yang layak dihormati. Prinsip ini menekankan pada usaha-usaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua orang. Yang kedua, prinsip *Planet* bertujuan untuk melindungi bumi dari dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti perubahan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan berfokus pada memenuhi kebutuhan masa depan tanpa merusak lingkungan. Yang ketiga, prinsip *Prosperity* bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan memiliki cukup untuk hidup harmonis bersama dengan alam. Aspek ekonomi dalam TPB/SDGs menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua orang. Yang keempat adalah prinsip *Peace* yaitu upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan perdamaian dan keamanan sosial. TPB/SDGs menyadari bahwa kedamaian dan keamanan merupakan dasar yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan prinsip yang terakhir adalah *Partnership* menekankan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kerjasama global yang erat dengan prinsip solidaritas yang kuat. TPB/SDGs mendorong partisipasi dan kemitraan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi internasional, untuk mencapai tujuan bersama.

TPB/SDGs memiliki keterkaitan antar tujuan, pencapaian satu tujuan dapat memberikan dampak positif atau negatif pada tujuan lainnya. Konsep ini sangat penting dalam memahami pandangan holistik tentang TPB/SDGs. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Le Blanc (2015), tujuan-tujuan SDGs sebaiknya dipandang sebagai sebuah jaringan terintegrasi yang saling terhubung, bukan sebagai entitas yang kompleks dan terpisah. Konsep jaringan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan memahami konsekuensi dari tindakan dan kebijakan yang diambil dalam usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

bappelitbangda



Gambar 2-2 Jaringan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Terintegrasi

sumber: Le Blanc (2015)

Sebagai upaya mencapai TPB/SDGs, penerapan yang efektif di tingkat regional dan nasional sangat diperlukan. Negara memiliki peran kunci dalam memastikan pelaksanaan SDGs dengan mengadopsi pendekatan dan strategi yang terintegrasi antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan, yang disesuaikan dengan karakteristik dan prioritas individu negara. Untuk mencapai tujuan ini, kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat juga sangat diperlukan. Peran multipihak dalam pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai elemen, seperti pemerintah/parlemen, organisasi masyarakat, akademisi dan ahli, pelaku usaha, filantropi, serta media. Selain Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, berikut ini adalah berapa peraturan telah ditetapkan untuk memandu pelaksanaan TPB/SDGs:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

bappelitbangda

BAB 3
Data dan Metodologi

3.1 Data

Untuk menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) telah menetapkan 247 indikator global. Indonesia juga berperan dalam upaya ini dengan menetapkan 289 indikator TPB/SDGs melalui dokumen metadata indikator SDGs edisi II yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020. Terdapat empat klasifikasi untuk 289 indikator tersebut, yaitu indikator nasional yang sejalan dengan indikator global, indikator nasional yang digunakan sebagai pengganti indikator global, indikator nasional yang ditambahkan sebagai pelengkap indikator global, dan indikator nasional yang berfungsi sebagai penyempurna indikator global, berikut penjelasannya:

1. Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global adalah indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator global (sebanyak 136 indikator), contoh: persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (1.2.1*).
2. Indikator nasional sebagai proksi indikator global adalah indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi terhadap metadata indikator global (sebanyak 100 indikator), contoh: proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (4.4.1(a)).
3. Indikator nasional sebagai tambahan indikator global adalah indikator nasional yang telah disesuaikan dengan potensi dan ketersediaan data serta belum ada proksinya di nasional karena metadata global belum tersedia (sebanyak 44 indikator), misalnya: rasio penggunaan gas rumah tangga (7.1.2(b)).
4. Indikator nasional sebagai indikator pengayaan sebanyak 9 indikator, misalnya *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan (3.8.1.(a)).

Pada dasarnya, analisis proyeksi pencapaian indikator TPB/SDGs dilakukan untuk 70 indikator dari 13 tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat, yang mengacu pada metadata edisi I dan edisi II. Sayangnya, keterbatasan data menjadi kendala dalam melakukan studi *baseline* secara menyeluruh, sehingga hanya 66 dari 289 indikator yang dapat diproyeksi. Tujuan

bappelitbangda

pembangunan berkelanjutan yang tidak diproyeksi dalam kajian ini meliputi tujuan 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, tujuan 13 - Penanganan Perubahan Iklim, tujuan 14 - Ekosistem Lautan, dan tujuan 15 - Ekosistem Daratan. Data yang digunakan dalam kajian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Pusat Data dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan (Pusdatin Kemnaker), Badan Penelitian dan Pengembangan serta Profil Kesehatan Kementerian Kesehatan (Balitbang Kemenkes), Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat, Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, kajian ini juga mencatat beberapa indikator yang sama, namun terdapat pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang berbeda berdasarkan metadata diantaranya:

- 1.2.1* / 10.1.1.(a) - Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.
- 1.4.1.(j) / 16.9.1.(a) - Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.
- 1.4.1/6.2.1* - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak
- 1.4.1/6.2.1* - Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (3) akses pada fasilitas penyehatan dasar/ Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
- 9.c.1* / 17.8.1 - Proporsi individu yang menggunakan internet.
- 16.1.3.(a)/11.7.2.(a) – Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Apabila memperhitungkan sub-indikator, jumlah indikator yang dapat diproyeksi dan dianalisis menjadi 98, 20 indikator mengikuti metadata I dan 78 indikator mengikuti metadata II. Daftar lengkap indikator yang tersedia berdasarkan seri waktu yang berbeda beserta sumber datanya dapat ditemukan pada Tabel 3.1.

bappelitbangda

Tabel 3-1 Daftar Indikator Terpilih untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat

Tujuan	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Tahun Data
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2015-2022
1	1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40) (%)	BPS Susenas	2015-2019
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40)	BPS Susenas	2015-2019
1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)	BPS Susenas	2015-2019
1	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (B40)	BPS Susenas	2015-2019
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat (B40) (%)	BPS Susenas	2015-2019
1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat (B40) (%)	BPS Susenas	2015-2019
1	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat (B40) (%)	BPS Susenas	2015-2019
1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (B40)	BPS Susenas	2015-2022
1	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (1) akses pada layanan air minum	Susenas KOR	2018-2022
1	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (2) akses pada layanan sanitasi dasar	Susenas KOR	2018-2022
1	1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (3) akses pada fasilitas penyehatan dasar	Susenas KOR	2019-2022
1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (B40)	BPS Susenas	2015-2019
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (ks).	Susenas KOR	2015-2020

bappeltpangda

Tujuan	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Tahun Data
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (ms)	Susenas KOR	2015-2020
2	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2017-2022
2	2.1.1.(a)	Prevelansi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat	
2	2.1.1.(a)	Prevelansi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	2015-2018 dan 2021-2022
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat	
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	2015-2019 dan 2021-2022
2	2.2.2*	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat	
2	2.2.2*	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	2015-2018 dan 2021-2022
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Susenas KOR	2015-2022
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan	Susenas KOR	2015-2022
3	3.3.3	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Profil Kesehatan Indonesia (Kemenkes)	2016-2019
3	3.7.1*	Proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern	Susenas KOR	2015-2020
3	3.8.1.(a)	Proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan	Susenas KOR	2015-2022
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih Besar 10%)	Susenas KOR	2018-2020

bappeda litbang

Tujuan	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Tahun Data
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih Besar 25%)	Susenas KOR	2018-2020
3	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	2016-2021
3	3.A.1*	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau	Susenas KOR	2015-2022
4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	BPS Susenas	2015-2020
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	BPS Susenas	2015-2020
4	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	BPS Susenas	2015-2020
4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >=15 tahun.	BPS Susenas	2015-2019
4	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat	Susenas KOR	2015-2020
4	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/sederajat	Susenas KOR	2015-2020
4	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/sederajat	Susenas KOR	2015-2020
4	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	Susenas KOR	2015-2020
4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	BPS Susenas	2015-2020
4	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Susenas KOR	2015-2022
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	Susenas KOR	2015-2022
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	Susenas KOR	2015-2022
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2015-2022
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2017-2019 dan 2021-2022
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2015-2022
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2015-2022

bappeltbangda

Tujuan	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Tahun Data
4	4.5.1*	Rasio APK-SD antara Pedesaan dan Perkotaan	Susenas KOR	2021-2022
4	4.5.1*	Rasio APK SD antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas	Susenas KOR	2021-2022
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2015-2022
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2015-2022
4	4.5.1*	Rasio APK-SMA antara Pedesaan dan Perkotaan	Susenas KOR	2021-2022
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2015-2022
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2015-2022
4	4.5.1*	Rasio APK-SMP antara Pedesaan dan Perkotaan	Susenas KOR	2021-2022
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2015-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2018 dan 2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2015-2022
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2015-2022
4	4.5.1*	Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan	Susenas KOR	2021-2022
4	4.5.1*	Rasio APM-SD antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas	Susenas KOR	2021-2022
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2015-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2015-2020
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	Susenas KOR	2015-2020

bappeltbangda

Tujuan	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Tahun Data
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	Susenas KOR	2015-2020
4	4.6.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya	Susenas KOR	2015-2022
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk 15-59 tahun (%)	BPS Susenas	2015-2020
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun (%)	BPS Susenas	2015-2020
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun	Susenas KOR	2015-2020 dan 2022
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun	Susenas KOR	2015-2022
5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BPS Sakernas	2017-2020
5	5.b.1*	Proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	BPS Susenas	2015-2022
6	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Susenas KOR	2015-2020
6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	BPS	2015-2022
6	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Susenas KOR	2017-2022
6	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Susenas KOR	2015-2022
7	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Susenas KOR	2015-2022
8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	2018-2022
8	8.1.1.(a)	PDB per kapita (ribu rupiah)	BPS	2017-2022
8	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	2015 dan 2018-2020
8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal	BPS Sakernas	2015 dan 2017-2020
8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS Sakernas	2015 dan 2017-2022
8	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS Sakernas	2015 dan 2017-2019
8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	BPS Sakernas	2015 dan 2017-2019
8	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	BPS Sakernas	2015 dan 2017-2022

bappelitbangda

Tujuan	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Tahun Data
8	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	BPS Sakernas	2015 dan 2017-2020
8	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS Sakernas	2015 dan 2017-2020
8	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta)	BPS Susenas	2015-2017
9	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	BPS Sakernas	2015 dan 2017-2020
9	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2017-2021
10	10.1.1*	Koefisien Gini	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2015-2022
10	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Badan Pusat Statistik: Survei Sosial Ekonomi Nasional	2015-2022
10	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan	Susenas KOR	2015-2020
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS Susenas	2015-2022
11	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (1) meninggal	DIBI	2016-2017 dan 2019-2022
11	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (2) terkena dampak (luka)	DIBI	2015-2018
16	11.7.2(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS Susenas	2015-2022
16	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS Susenas	2015-2022
16	16.3.1.(a)	Proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi	Susenas KOR	2015 dan 2017-2022
16	16.9.1*	Proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran	Susenas KOR	2015-2022
16	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Susenas KOR	2015-2022
16	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Susenas KOR	2015-2020
17	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Kementerian Keuangan dan BPS	2020

bappenanda

Tujuan	Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Tahun Data
17	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Kementerian Keuangan dan BPS	2020
17	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Kementerian Keuangan	2020
17	17.8.1	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS Susenas	2015-2020

Catatan: kode indikator berwarna merah untuk metadata I, sedangkan baris berwarna kuning untuk indikator yang tidak dapat diproyeksi

3.2 Metadata Indikator SDGs

Indonesia menyusun indikator TPB/SDGs dalam sebuah dokumen yang disebut metadata indikator TPB/SDGs. Proses penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak, seperti Pemerintah, Akademisi, Pakar, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Organisasi Kemasyarakatan, dan secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

Metadata indikator TPB/SDGs Indonesia bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang seragam bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPB/SDGs. Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs di Indonesia, sehingga dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, serta memungkinkan keterbandingan antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia.

Hasil dari proses penyusunan metadata ini berupa dokumen Pedoman Teknis Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia. Pedoman ini memberikan informasi yang komprehensif tentang konsep dan definisi indikator, metode penghitungan, manfaat, sumber dan cara pengumpulan data, disagregasi, serta frekuensi waktu pengumpulan data. Pada awalnya, metadata TPB/SDGs Indonesia mencakup 319 indikator yang terkait dengan 169 target dari 17 tujuan (edisi I), namun melalui proses reviu dan evaluasi, jumlah indikator tersebut telah dikurangi menjadi 289 indikator (edisi II). Dokumen Pedoman Teknis Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia terdiri dari:

a. Terjemahan Tujuan dan Target
b. Ringkasan Metadata
c. Metadata setiap Pilar

Kajian dilakukan dengan mengacu kepada metadata indikator TPB/SDGs edisi I dan II dengan rincian indikator terpilih dapat dilihat pada uraian berikut ini.

bappelitbangda

3.2.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun)

Indikator 1.2.1* Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Penduduk miskin dengan garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%) atau representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama yang dinyatakan dalam persen.

$$\text{P PM} = \frac{\text{JPM}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Dimana:

PPM : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

JPM : Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional pada waktu tertentu

JP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

Indikator 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti; Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin, Klinik/Bidan/Praktek Dokter, Puskesmas/Pustu/Polindes. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$\text{P Salifaskes} = \frac{\text{JPSalifaskes}}{\text{JP}15-49} \times 100\%$$

Dimana:

P Salifaskes : Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

JPSalifaskes : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% terbawah/berpendapatan rendah)

bappelitbangda

JP15-49 : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang pernah melakukan persalinan (penduduk 40% terbawah/berpendapatan rendah

Indikator 1.4.1.(d) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$\text{P AML} = \frac{\text{JRTML}}{\text{JRTS}} \times 100\%$$

Dimana:

P AML : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

JRTML : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak)

JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(e) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$\text{P LSL} = \frac{\text{JRTSL}}{\text{JRTS}} \times 100\%$$

Dimana:

P LSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

JRTSL : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak

JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya (40% berpendapatan terendah)

bappelitbangda

Indikator 1.4.1.(f) Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (B40)

Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Dihitung dengan menggunakan pembobot untuk masing-masing indikator, dikatakan kumuh jika rumah tangga memiliki nilai kategori > 35%. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$\text{P RTKP} = \frac{\text{JRTKP}}{\text{JRTP}} \times 100\%$$

Dimana:

P RTKP	:	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan
JRTKP	:	Jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan pada waktu tertentu (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)
JRTP	:	Jumlah rumah tangga di perkotaan pada periode waktu yang sama (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat (B40) (%)

APM SD/ MI/ sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/ MI/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket A) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$\text{APM SD} = \frac{\text{JMSD}}{\text{JP7} - 12} \times 100\%$$

Dimana:

APM SD	:	Angka Partisipasi Murni (APM) di SD/MI/ sederajat
JMSD	:	Jumlah murid tingkat SD/ MI/ sederajat umur 7-12 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)
JP7-12	:	Jumlah penduduk umur 7-12 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat (B40) (%)

APM SMP/MTs/sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 13-15

bappelitbangda

tahun. Pendidikan NonFormal (Paket B) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$\text{APM SMP} = \frac{\text{JMSMP}}{\text{JP13} - 15} \times 100\%$$

Dimana:

APM SMP	:	Angka Partisipasi Murni (APM) di SMP/ MTs/ sederajat
JMSMP	:	Jumlah murid tingkat SMP/ MTs/ sederajat umur 13-15 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)
JP13-15	:	Jumlah penduduk umur 13-15 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah

Indikator 1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat (B40) (%)

APM SMA/ MA/ sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/ MA/ sederajat terhadap penduduk kelompok umur 16-18 tahun. Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

$$\text{APM SMA} = \frac{\text{JMSMA}}{\text{JP16} - 18} \times 100\%$$

Dimana:

APM SMA	:	Angka Partisipasi Murni (APM) di SMA/MA/ sederajat
JMSMA	:	Jumlah murid tingkat SMA/MA/sederajat umur 16-18 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)
JP16-18	:	Jumlah penduduk umur 16-18 tahun (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1.(j) Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran (B40)

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/ dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

$$\text{PKAL} = \frac{\text{JPKAL}}{\text{JP0} - 17} \times 100\%$$

bappelitbangda

Dimana:

PKAL	:	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran
JPKAL	:	Jumlah penduduk umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran pada waktu tertentu (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)
JP0-17	:	Jumlah penduduk umur 0-17 tahun pada periode waktu yang sama (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.1* Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.

Indikator pelayanan dasar merujuk pada system penyediaan layanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar manusia: air mnium, sanitasi dan penyehatan, energi, mobilitas, pembuangan sampah, pelayanan kesehatan, pendidikan dan teknologi informasi.

Akses pada layanan dasar menyangkut kecukupan dan layanan terjangkau yang dapat diandalkan dengan kualitas memadai, yaitu:

1. Akses pada layanan air minum merujuk pada air minum berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pp termasuk waktu antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan. Lihat definsi pada SDG indikator 6.1.
2. Akses pada Layanan Sanitasi Dasar merujuk pada penggunaan fasilitas yang ditingkatkan yang tidak digunakan bersama dengan rumah tangga lain. Lihat definisi pada SDG 6.2.
3. Akses pada Mobilitas Dasar merujuk pada akses pada jalan yang dapat digunakan sepanjang musim di pedesaan (lihat SDG 9.1.1) atau mempunyai akses pada transportasi umum di perkotaan (lihat SDG 11.2.1). Penghitungan "Akses pada Mobilitas Dasar" karenanya merupakan kombinasi dari hal di atas.
4. Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar merujuk pada ketersediaan dari fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Lihat definsi pada SDG 6.2.

Konteks Pedesaan:
Lihat SDG indikator 9.1.1 "Proportion of the rural population who live within 2 km of an all- season road", yang menyarankan penggunaan the Rural Access Index (RAI) yang mengukur % penduduk < 2 km dari jalan dapat dilalui sepanjang musim (setara 20-25 menit jalan kaki).

Asumsi dasar: perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama dari akses dengan adanya jalan sepanjang tahun.

bappelitbangda

Konteks perkotaan:

Akses pada transportasi diukur menggunakan metodologi dari SDG 11.2.1 – proporsi penduduk mempunyai akses pada angkutan umum menurut jenis kelamin, umur dan orang dengan disabilitas.

Indeks Pelayanan Dasar

Persentase penduduk dengan akses pada layanan dasar adalah jumlah penduduk dengan akses pada semua layanan dasar dibagi dengan jumlah penduduk pada periode yang sama dikalikan seratus. Pada dasarnya, secara umum, penghitungan indeks pelayanan dasar dapat dilakukan dengan rumus IPD berikut. Namun demikian data yang dikumpulkan setiap jenis pelayanan dasar tidak dapat diperoleh dengan metode dan sumber data yang terbanding. Oleh karena itu, pengukuran pencapaian pelayanan dasar akan dilakukan pada setiap jenis pelayanan dasar.

$$IPD = \frac{JPD}{JP} x100\%$$

Di mana:

IPD : Persentase penduduk dengan akses pada layanan dasar

JPD : jumlah penduduk dengan akses pada semua layanan dasar

JP : jumlah penduduk pada periode yang sama

Akses pada layanan dasar diperoleh dari:

1. JPAM: Penduduk dengan akses pada layanan air minum. Jumlah penduduk yang mempunyai akses pada air minum yang bersumber dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan yang dialirkan dengan pipa. Mata air dan sumur bor/galian tersebut harus berjarak lebih > 10 meter dari tempat pembuangan limbah dan tangki septik.

   $$IPAM = \frac{JPAM}{JP} X100\%$$

   Di mana:

   IPAM : Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum dasar

   JPAM : jumlah penduduk dengan akses pada air minum

   JP : jumlah penduduk pada periode yang sama
2. JPSD: Penduduk dengan akses pada Layanan Sanitasi Dasar. Jumlah penduduk yang mempunyai akses pada jamban leher angsa yang berfungsi dengan pembuangan limbah tangki septik. Jamban yang digunakan merupakan jamban yang hanya digunakan oleh rumahtangga sendiri.

bappelitbangda

$$IPSD = \frac{JPSD}{JP} X100\%$$

Di mana:

IPSD : Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi dasar

JPD : jumlah penduduk dengan akses pada layanan sanitasi dasar

JP : jumlah penduduk pada periode yang sama

3. JPMD: Penduduk dengan akses pada Mobilitas Dasar di:

Pedesaan.

Jumlah penduduk yang tinggal di satuan wilayah (desa) pedesaan yang mempunyai jalan beraspal atau sirtu yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda-4 sepanjang tahun.

Perkotaan.

Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah (desa) perkotaaan dimana terdapat jaminan pelayanan angkutan umum berbayar dengan waktu pelayanannya diketahui.

$$IPMD_{rural} = \frac{JPMD_{rural}}{JP_{rural}} X100\%$$

Di mana:

IPMD-rural : Persentase penduduk rural dengan akses pada layanan mobilitas dasar

JPMD-rural : Jumlah penduduk rural dengan akses pada layanan mobilitas dasar

JP-rural : Jumlah penduduk rural pada periode yang sama

$$IPMD_{urban} = \frac{JPMD_{urban}}{JP_{urban}} X100\%$$

Di mana:

IPMD-urban : Persentase penduduk urban dengan akses pada layanan mobilitas dasar

JPMD-urban : Jumlah penduduk urban dengan akses pada layanan mobilitas dasar

JP-urban : Jumlah penduduk urban pada periode yang sama

$$IPMD = \frac{(IPMD_{rural} x\, JP_{rural}) + (IPMD_{urban} x\, JP_{urban})}{JP} X100\%$$

Di mana:

IPMD : Persentase penduduk dengan akses pada layanan mobilitas dasar

IPMD-rural : Persentase penduduk rural dengan akses pada layanan mobilitas dasar

IPMD-urban : Persentase penduduk urban dengan akses pada layanan mobilitas dasar

JP-rural : Jumlah penduduk rural

JP-urban : Jumlah penduduk urban

JP : Jumlah seluruh penduduk (rural+urban)

bappelitbangda

4. JFPD: Penduduk dengan akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di satuan wilayah (desa) yang mempunyai fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

$$IFPD = \frac{JFPD}{JP} x100\%$$

Di mana:

IFPD : Persentase penduduk dengan akses pada fasilitas penyehatan dasar

JFPD : Jumlah penduduk dengan akses pada fasilitas penyehatan dasar

JP : Jumlah penduduk pada periode yang sama

Indikator 1.4.1.(k) Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik, Baik dari PLN dan Bukan PLN (B40)

Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN adalah jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari listrik baik PLN dan bukan PLN dibagi dengan jumlah rumah tangga yang miskin dan rentan dinyatakan dalam satuan persen (%). Sumber listrik bukan PLN meliputi sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi atau oleh pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari aki, generator, pembangkit listrik tenaga surya (*solar cell*).

$$\text{PSPU} = \frac{\text{JRTSPU}}{\text{JRTS}} \times 100\%$$

Dimana:

PSPU : Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN

JRTSPU : Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% terbawah/ berpendapatan terendah)

JRTS : Jumlah total rumah tangga yang miskin dan rentan (penduduk 40% penduduk terbawah/ berpendapatan terendah)

Indikator 1.4.2* Proporsi dari Penduduk Dewasa yang Mendapatkan Hak Atas Tanah yang Didasari oleh Dokumen Hukum dan yang Memiliki Hak Atas Tanah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tipe Kepemilikan

Hak atas hunian terjamin meliputi dua sub komponen: (i) hak kepemilikan diakui sebagai dokumen yang sah dan memberikan kepastian bermukim, dan (ii) persepsi sebagai hunian terjamin, karena jenis kepemilikan dari hunian dianggap didukung oleh dokumen yang sah, dimana keduanya perlu

bappelitbangda

ditunjukkan sebagai hunian terjamin. Jumlah rumah tangga bersumber dari hasil proyeksi penduduk yang dibuat berdasarkan data sensus penduduk terakhir. Penduduk dewasa adalah penduduk yang berumur 18 tahun dan lebih, dan penduduk yang berumur dibawah 18 tahun tetapi sudah kawin.

Indikator ini dihitung menurut jenis kepemilikan, yaitu milik sendiri, kontrak dan sewa. **Milik sendiri** apabila tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga (krt) atau salah satu seorang anggota rumah tangga (art). Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri. **Kontrak** apabila tempat tinggal tersebut disewa oleh krt/art dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayarannya biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan **sewa** apabila tempat tinggal tersebut disewa oleh krt atau salah seorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Rumus kepemilikan rumah hak milik sendiri:

$$\%\text{HM} = \frac{\text{JRT HM}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Dimana:

%HM : Proporsi rumah tangga dengan Rumah Hak Milik
JRT HM : Jumlah rumah tangga menghuni rumah sewa
JRT : Jumlah rumah tangga pada periode yang sama

Rumus kepemilikan rumah sewa:

$$\%\text{Sewa} = \frac{\text{JRT Sewa}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Dimana:

% Sewa : Proporsi rumah tangga dengan rumah Sewa
JRT Sewa : Jumlah rumah tangga menghuni rumah sewa
JRT : Jumlah rumah tangga pada periode yang sama

Rumus kepemilikan rumah kontrak:

$$\%\text{Kontrak} = \frac{\text{JRT Kontrak}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Dimana:

% Kontrak : Proporsi rumah tangga dengan rumah kontrak

bappelitbangda

JRT Kontrak : Jumlah rumah tangga menghuni rumah kontrak

JRT : Jumlah rumah tangga pada periode yang sama

3.2.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan)

Indikator 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment)*

Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang, secara reguler, mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, dimana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidakcukupan konsumsi pangan).

$$\text{PoU} = \int x < \text{MDER}\, f(x)dx$$

Dimana:

PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal

MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement)

f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu

Indikator 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (*underweight)* pada Anak Balita

Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis.

Cara perhitungan *underweight* adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U). Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

bappelitbangda

- Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO.
- Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO.

$$\text{PKG AB(5)} = \frac{\text{JAB(5)KG}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$$

Dimana:

PKG AB(5) : Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita

JAB(5)KG : Jumlah seluruh anak balita yang menderita kekurangan gizi (*underweight*)

JAB(5) : Jumlah seluruh anak balita

Indikator 2.2.1* Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.

Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010:

1. Sangat pendek: Zscore <-3,0
2. Pendek : Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore < -2,0

$$\text{PAB(5)PStunting} = \frac{\text{JAB(5)P stunting}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$$

Dimana:

PAB(5)Pstunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek dan sangat pendek (*stunting*)

JAB(5)Pstunting : Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek (*stunting*) pada waktu tertentu

JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama

Indikator 2.2.2* Prevalensi *Wasting* (Berat Badan/Tinggi Badan) pada Usia Kurang dari 5 Tahun Berdasarkan Tipe

Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada balita.

bappelitbangda

Berikut adalah standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/ XII/2010:

1. Sangat Kurus : Zscore <-3,0
2. Kurus : Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore <-2,0

$$\text{PAB(5)K wasting} = \frac{\text{JAB(5) K wasting}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$$

Dimana:

PAB(5)K wasting : Prevalensi anak balita yang menderita kurus dan sangat kurus (*wasting*)
JAB(5) K wasting : Jumlah anak balita yang menderita kurus (*wasting*) pada waktu tertentu
JAB(5) : Jumlah seluruh anak balita pada periode waktu yang sama

3.2.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)

Indikator 3.1.2* Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (memiliki kompetensi kebidanan) dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan. Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kompetensi kebidanan, yaitu seperti dokter kandungan, dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

$$\text{P Salinakes} = \frac{\text{JPMoTK}}{\text{JPM15} - 49} \times 100\%$$

Dimana:

P Salinakes : Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
JPMoTK : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dalam dua tahun terakhir
JPM15-49 : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir

bappelitbangda

Indikator 3.1.2* Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti, rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik/bidan praktek swasta/praktek dokter, dan puskesmas/pustu/ polindes.

$$\text{P Salifaskes} = \frac{\text{JPSalifaskes}}{\text{JP15} - 49} \times 100\%$$

Dimana:

P Salifaskes : Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

JPSalifaskes : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

JP15-49 : Jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun pada periode waktu yang sama

Indikator 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini Annual Parasite Incidence (API). API adalah angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vektor, migrasi dan pemindahan penduduk.

$$KM = \frac{JKMP}{JPB} x100$$

Di mana:

KM : Kejadian Malaria per 1.000 orang

JKMP : Jumlah kasus malaria positif pada periode tertentu

JPB : Jumlah penduduk berisiko pada periode waktu yang sama

bappelitbangda

Indikator 3.7.1* Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) Terpenuhi Menurut Metode Kontrasepsi Modern

Proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern adalah perbandingan perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang aktif secara seksual dan ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dengan Pasangan Usia Subur (PUS) yang memerlukan alat kontrasepsi.

Alat kontrasepsi metode modern terdiri dari sterilisasi perempuan, sterilisasi pria, pil, spiral/IUD, suntik KB, susuk KB, kondom, metode amenore laktasi (MAL).

$$\text{CPR Modern} = \frac{\text{JPMdMAK}}{\text{JPMAK}} \times 100\%$$

Dimana:

CPR Modern	:	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang aktif secara seksual dan ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
JPMdMAK	:	Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya dengan kebutuhan alat kontrasepsi yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern menggunakan alat kontrasepsi metode modern
JPMAK	:	Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memerlukan alat kontrasepsi

Indikator 3.8.1.(a) *Unmet Need* Pelayanan Kesehatan

Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%). Aktifitas yang dimaksud adalah aktivitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya.

$$\text{UNPK} = \frac{\text{JPKPK}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Dimana:

UNPK	:	*Unmet Need* Pelayanan Kesehatan

bappelitbangda

JPKPK : Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya tetapi tidak berobat jalan pada waktu tertentu

JP : Jumlah penduduk pada periode waktu yang sama

Indikator 3.8.2. Proporsi Populasi dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga atau Pendapatan

Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan. Dua ambang batas digunakan untuk mendefinisikan "pengeluaran rumah tangga besar untuk kesehatan": lebih besar dari 10% dan lebih besar dari 25% total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio antara total pengeluaran Rumah tangga untuk kesehatan (numerator) dan total pengeluaran rumah tangga atau total pendapatan rumah tangga (denominator).

Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan didefinisikan sebagai setiap pengeluaran yang terjadi pada saat penggunaan layanan untuk mendapatkan semua jenis perawatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, paliatif atau perawatan jangka panjang) termasuk semua obat-obatan, vaksin dan sediaan farmasi lainnya serta semua produk kesehatan, dari semua jenis penyedia dan untuk semua anggota rumah tangga. Pengeluaran kesehatan ini secara langsung dibayar menggunakan pendapatan rumah tangga (termasuk pengiriman uang), tabungan atau pinjaman tetapi tidak termasuk penggantian pembayaran oleh pihak ketiga. Dengan demikian, akses terhadap pelayanan kesehatan terbatas pada pelayanan yang mampu dibayar sendiri, tanpa bantuan dari orang lain di luar rumah tangga tersebut dan semata-mata berdasarkan pada kemauan dan kemampuan rumah tangga untuk membayar. Berdasarkan klasifikasi pembiayaan kesehatan *the International Classification for Health Accounts* (ICHA), pembayaran pelayanan kesehatan secara langsung disebut pembayaran *Out-Of-Pocket* (OOP). Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan dengan OOP merupakan sumber pembiayaan yang paling tidak equitable dalam sistem kesehatan.

Komponen pengeluaran Rumah tangga untuk kesehatan harus konsisten dengan the *UN Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) komponen 06 (divisi kesehatan), yang terdiri atas obat-obatan dan jasa medis (06.1), pelayanan rawat Jalan (06.2) dan pelayanan rawat inap (06.3).

Pengeluaran rumah tangga dan pendapatan rumah tangga merupakan ukuran dari kesejahteraan moneter. Pengeluaran rumah tangga merupakan proxy dari pendapatan yang merupakan ukuran kemampuan ekonomi jangka panjang suatu rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga adalah seluruh uang yang digunakan untuk membeli barang dan jasa untuk kebutuhan Rumah tangga dalam kurun

bappelitbangda

waktu tertentu. Informasi tentang pengeluaran rumah tangga biasanya dikumpulkan melalui survey rumah tangga.

Pendapatan Rumah tangga adalah seluruh *disposable income* rumah tangga, yang terdiri atas total pendapatan (setelah dikurangi pajak), gaji pokok dan denda. Total pendapatan umumnya terdiri dari pendapatan dari pekerjaan, pendapatan dari properti, pendapatan dari produksi rumah tangga untuk konsumsi sendiri, transfer yang diterima baik dalam bentuk uang maupun barang, serta transfer yang diterima dalam bentuk layanan.

$$\text{OOP Health} = \frac{\sum_i m_i w_i 1(\frac{total\ pengeluaran\ untuk\ kesehatan\ pada\ rumah\ tangga\ i}{total\ pengeluaran\ pada\ rumah\ tangga\ i} > r)}{\sum_i m_i w_i}\ x\ 100\%$$

Dimana:

i menunjukkan satu rumah tangga, 1 () adalah fungsi indikator yang mengambil nilai 1 jika benar, dan 0 jika salah, mi sesuai dengan jumlah anggota rumah tangga i, wi sesuai dengan berat sampel rumah tangga i, t adalah ambang batas yang mengidentifikasi pengeluaran rumah tangga besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total konsumsi atau pendapatan rumah tangga (yaitu 10% dan 25%).

Indikator 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. JKN secara bertahap direncanakan sebagai jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah perbandingan banyaknya penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan dengan jumlah seluruh penduduk dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$Cakupan\ JKN = \frac{JPJKN}{JP} x100\%$$

Di mana:
Cakupan JKN : Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
JPJKN : Jumlah penduduk yang mendapat Jaminan Perlindungan kesehatan (JKN)
JP : Jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama

Indikator 3.a.1* Persentase Merokok pada Penduduk Umur ≥15 Tahun

Persentase penduduk umur ≥15 tahun yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir adalah perbandingan antara banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang merokok tembakau setiap hari

bappeltbangda

selama sebulan terakhir dengan jumlah penduduk umur ≥15 tahun, dinyatakan dalam satuan persen (%). Definisi rokok meliputi merokok tembakau maupun cerutu.

$$\%M \geq 15 = \frac{JP \geq 15yM}{JP \geq 15} \times 100\%$$

Dimana:

%M≥15	:	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun
JP≥15yM	:	Jumlah penduduk umur ≥15 tahun yang merokok tembakau setiap hari dalam sebulan terakhir pada waktu tertentu
JP≥15	:	Jumlah penduduk umur ≥15 tahun pada periode yang sama

3.2.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua)

Indikator 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/sederajat (7-12 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan NonFormal (Paket A) turut diperhitungkan.

$$APK\ SD = \frac{JMSD}{JP7-12} \times 100\%$$

Dimana:

APK SD	:	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat
JMSD	:	Jumlah murid pada SD/MI/sederajat pada periode tertentu
JP7-12	:	Jumlah penduduk umur 7-12 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat (13-15 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan NonFormal (Paket B) turut diperhitungkan.

bappelitbangda

$$\text{APK SMP} = \frac{\text{JM SMP}}{\text{JP13} - 15} \times 100\%$$

Dimana:

APK SMP	:	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat
JM SMP	:	Jumlah murid pada SMP/MTs/sederajat pada periode tertentu
JP13-15	:	Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA /sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat (16-18 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan NonFormal (Paket C) turut diperhitungkan.

$$\text{APK SMA} = \frac{\text{JM SMA}}{\text{JP16} - 18} \times 100\%$$

Dimana:

APK SMA	:	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat
JM SMA	:	Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/sederajat pada periode tertentu
JP16-18	:	Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.1.1.(g) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥15 Tahun

Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun adalah jumlah tahun belajar penduduk umur ≥15 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

$$\text{MYS} = \frac{1}{\text{P}_{15+}} \sum_{\text{i}=1}^{\text{P}_{15+}} (\text{lama sekolah penduduk ke} - \text{i})$$

Dimana:

MYS	:	*Mean Years of Schooling* atau Rata-Rata Lama Sekolah
P15+	:	Jumlah penduduk umur≥15 tahun

Lama sekolah penduduk ke-i

a. Tidak Pernah Sekolah : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama
b. Masih sekolah di SD-S1 : konversi ijazah terakhir +kelas terakhir – 1
c. Masih sekolah di S2/S3 : konversi ijazah terakhir + 1

bappelitbangda

d. Tidak sekolah lagi dan tamat di sekolah terakhir : konversi ijazah terakhir

e. Tidak sekolah lagi dan tidak tamat di sekolah terakhir : konversi ijazah terakhir+kelas terakhir – 1

Indikator 4.1.2* Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat

Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Berdasarkan usia wajib belajar yang dimulai sejak 7 tahun, maka dengan asumsi siswa belajar penuh waktu dan tidak tinggal kelas, mereka lulus SD/ sederajat pada usia sekitar 12 tahun. Oleh karena itu rentang usia yang digunakan untuk penghitungan tingkat ketuntasan SD/sederajat adalah anak atau remaja usia 13 tahun (12 + 1 tahun) sampai dengan 15 tahun (12 + 3 tahun).

Tingkat penyelesaian yang mencapai atau mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir seluruh anak-anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai usia mereka, tanpa keterlambatan yang signifikan atau berarti.

Tabel 3.1 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat

Jenjang Pendidikan	Usia Lulus pada Umumnya	Batas Bawah (Usia Lulus + 1)	Batas Atas (Usia Lulus + 3)	Rentang Usia yang Berlaku
SD/sederajat	12	13	15	13-15 Tahun
SMP/sederajat	15	16	18	16-18 Tahun
SMA/sederajat	18	19	21	19-21 Tahun

Berdasarkan tabel tersebut, maka:

- Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/ sederajat merupakan persentase remaja usia 13 – 15 tahun yang telah lulus SD.
- Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/ sederajat merupakan persentase remaja usia 16 – 18 tahun yang telah lulus SMP.
- Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/ sederajat adalah persentase usia 19 – 21 tahun yang telah lulus SMA, yang dibuktikan dengan dokumen resmi hasil belajar di masing-masing jenjang tersebut.

$$\mathrm{TPi} = \frac{\mathrm{NTPi}}{\mathrm{Ni}} \times 100\%$$

bappelitbangda

Dimana:

TPi	:	Tingkat penyelesaian pendidikan di jenjang i
NTPi	:	Jumlah penduduk dalam rentang usia i yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut
Ni	:	Jumlah penduduk yang termasuk dalam rentang usia untuk jenjang i

Indikator 4.2.2* Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Menurut Jenis Kelamin

Indikator ini mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu

a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD.
b. Sekolah Dasar/sederajat.

$$TP_6 = (\frac{N_{6PAUD}+N_{6SD}}{N_6}) \text{ x } 100\%$$

Dimana:

TP6	:	Tingkat partisipasi anak usia 6 tahun di program pembelajaran yang terorganisir
N6PAUD	:	Jumlah anak usia 6 tahun yang belajar di PAUD pada periode tertentu
N6SD	:	Jumlah anak usia 6 tahun yang belajar di SD pada periode tertentu
N6	:	Jumlah populasi anak usia 6 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 3-6 tahun).

Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB (Berbasis Kelompok Bermain)/Taman Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), PAUD-TAAM (Taman Asuh Anak Muslim), PAUD-PAK (Pelayanan Anak Agama Kristen), PAUD-BIA (Bina Iman Anak), TKQ (Taman Kanak-kanak Al-Qur'an), PAUD Inklusi, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak (*Day Care*).

$$\text{APK PAUD} = \frac{\text{JMPAUD}}{\text{JP3} - 6} \times 100\%$$

bappelitbangda

Dimana:

APK PAUD	:	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
JMPAUD	:	Jumlah murid pada PAUD pada periode tertentu
JP3-6	:	Jumlah penduduk umur 3-6 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)

Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi adalah jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, berapapun usia mereka, berbanding dengan usia kuliah pada umumnya, yaitu 19 – 23 tahun. Tingginya APK mengindikasikan tingginya tingkat partisipasi pendidikan tinggi. APK dapat lebih dari 100% karena APK juga memperhitungkan mahasiswa yang usianya di luar rentang 19 – 23 tahun. Oleh karena itu, tercapainya angka 100% adalah sesuatu yang patut diupayakan namun tidak cukup, karena belum tentu seluruh remaja dengan rentang usia tersebut dapat mengakses pendidikan tinggi.

$$\text{APK PT} = \frac{\text{JMPT}}{\text{JP19} - 23} \times\ 100\%$$

Dimana:

APK PT	:	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)
JM PT	:	Jumlah murid pada jenjang Pendidikan D1/D2/D3/D4/S1/S2 pada periode tertentu
JP19-23	:	Jumlah penduduk umur 19-23 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.4.1.(a) Proporsi Remaja (Usia 15-24 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Proporsi remaja (umur 15-24 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir).

Sebuah komputer mengacu pada komputer desktop, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya, seperti smartphone.

$$\text{PR} - \text{TIK} = \frac{\text{JRAI}}{\text{JR15} - 24} \times\ 100\%$$

Dimana:

PR-TIK	:	Proporsi remaja dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
JRAI	:	Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir
JR15-24	:	Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) pada periode yang sama

bappelitbangda

$$\text{PD} - \text{TIK} = \frac{\text{JDAI}}{\text{JD15} - 59} \times\ 100\%$$

Dimana:

PD-TIK : Proporsi dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

JDAI : Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir

JD15-59 : Jumlah penduduk remaja (umur 15-59 tahun) pada periode yang sama

Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tingkat SD/Sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) Perempuan /Laki-Laki, (b) Pedesaan/Perkotaan, (c) Kuintil Terbawah/Teratas, (d) Disabilitas/Tanpa Disabilitas

Indikator ini ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Indikator berupa Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di (1) SD/sederajat; Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) di (2) SMP/sederajat; (3) SMA/SMK/sederajat; dan (4) Perguruan Tinggi antara a) perempuan/laki-laki, b) tempat tinggal (perkotaan/pedesaan), c) kuintil terendah/kuintil tertinggi, dan d) kondisi disabilitas (disabilitas/ tanpa disabilitas). Biasanya kelompok yang dianggap lebih baik kondisinya merupakan penyebut (denumerator).

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Sementara angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Perbandingan APM dan APK antara dua kelompok akan menghasilkan angka antara nol dan satu. Angka 1 menunjukkan kesetaraan/paritas antara kedua kelompok yang dibandingkan, sementara angka mendekat nol menunjukkan tingginya kesenjangan akses pendidikan antar kelompok ekonomi sosial.

Rasio APK Sekolah Dasar (SD) perbandingan antara APK tingkat SD perempuan terhadap APK tingkat SD laki-laki

$$\text{RG SD} = \frac{\text{APK}_{\text{PSD}}}{\text{APK}_{\text{LSD}}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RG SD : Rasio antara APK perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

APK_{PSD} : APK perempuan di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

bappelitbangda

APK_{LSD} : APK laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Rasio APK Sekolah Dasar (SD) perbandingan antara APK kuintil terendah dan kuintil teratas

$$\text{RK SD} = \frac{APK_{RSD}}{APK_{TSD}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RK SD : Rasio antara APK Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

APK_{RSD} : APK Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

APK_{TSD} : APK Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Rasio APK Sekolah Menengah Pertama (SMP) perbandingan antara APK tingkat SMP perempuan terhadap APK tingkat SMP laki-laki

$$\text{RG SMP} = \frac{APK_{PSMP}}{APK_{LSMP}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RG SMP : Rasio antara APK perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APK_{PSMP} : APK perempuan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APK_{LSMP} : APK laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Rasio APK Sekolah Menengah Pertama (SMP) perbandingan antara APK kuintil terendah dan kuintil teratas

$$\text{RK SMP} = \frac{APK_{RSMP}}{APK_{TSMP}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RK SMP : Rasio antara APK Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APK_{RSMP} : APK Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APK_{TSMP} : APK Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

bappelitbangda

Rasio APK Sekolah Menengah Atas (SMA) perbandingan antara APK tingkat SMA perempuan terhadap APK tingkat SMA laki-laki

$$\text{RG SMA} = \frac{\text{APK}_{\text{PSMA}}}{\text{APK}_{\text{LSMA}}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RG SMA : Rasio antara APK perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APK_{PSMA} : APK perempuan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APK_{LSMA} : APK laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Rasio APK Sekolah Menengah Atas (SMA) perbandingan antara APK kuintil terendah dan kuintil teratas

$$\text{RK SMA} = \frac{\text{APK}_{\text{RSMA}}}{\text{APK}_{\text{TSMA}}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RK SMA : Rasio antara APK Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APK_{RSMA} : APK Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APK_{TSMA} : APK Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Rasio APK Perguruan Tinggi (PT) perbandingan antara APK tingkat PT perempuan terhadap APK tingkat PT laki-laki

$$\text{RG PT} = \frac{\text{APK}_{\text{PPT}}}{\text{APK}_{\text{LPT}}} \times 100\%$$

Dimana:

RG PT : Rasio antara APK perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

APK_{PPT} : APK perempuan di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

APK_{LPT} : APK laki-laki di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

Rasio APK Perguruan Tinggi (PT) perbandingan antara APK kuintil terendah dan kuintil teratas

bappelitbangda

$$\text{RK PT} = \frac{\text{APK}_{\text{RPT}}}{\text{APK}_{\text{TPT}}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RK PT : Rasio antara APK Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

APK_{RPT} : APK Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

APK_{TPT} : APK Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

Rasio APM Sekolah Dasar (SD) perbandingan antara APM tingkat SD perempuan terhadap APM tingkat SD laki-laki

$$\text{RG SD} = \frac{\text{APM}_{\text{PSD}}}{\text{APM}_{\text{LSD}}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RG SD : Rasio antara APM perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

APM_{PSD} : APM perempuan di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

APM_{LSD} : APM laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Rasio APM Sekolah Dasar (SD) perbandingan antara APM kuintil terendah dan kuintil teratas

$$\text{RK SD} = \frac{\text{APM}_{\text{RSD}}}{\text{APM}_{\text{TSD}}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RK SD : Rasio antara APM Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

APM_{RSD} : APM Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

APM_{TSD} : APM Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Rasio APM Sekolah Menengah Pertama (SMP) perbandingan antara APM tingkat SMP perempuan terhadap APM tingkat SMP laki-laki

$$\text{RG SMP} = \frac{\text{APM}_{\text{PSMP}}}{\text{APM}_{\text{LSMP}}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RG SMP : Rasio antara APM perempuan dan laki-laki di jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APM_{PSMP} : APM perempuan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

bappelitbangda

APM_{LSMP} : APM laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Rasio APM Sekolah Menengah Pertama (SMP) perbandingan antara APM kuintil terendah dan kuintil teratas

$$\text{RK SMP} = \frac{APM_{RSMP}}{APM_{TSMP}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RK SMP : Rasio antara APM Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APM_{RSMP} : APM Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

APM_{TSMP} : APM Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Rasio APM Sekolah Menengah Atas (SMA) perbandingan antara APM tingkat SMA perempuan terhadap APM tingkat SMA laki-laki

$$\text{RG SMA} = \frac{APM_{PSMA}}{APM_{LSMA}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RG SMA : Rasio antara APM perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APM_{PSMA} : APM perempuan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APM_{LSMA} : APM laki-laki di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Rasio APM Sekolah Menengah Atas (SMA) perbandingan antara APM kuintil terendah dan kuintil teratas

$$\text{RK SMA} = \frac{APM_{RSMA}}{APM_{TSMA}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RK SMA : Rasio antara APM Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APM_{RSMA} : APM Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

APM_{TSMA} : APM Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Rasio APM Perguruan Tinggi (PT) perbandingan antara APM tingkat PT perempuan terhadap APM tingkat PT laki-laki

bappelitbangda

$$\text{RG PT} = \frac{\text{APM}_{\text{PPT}}}{\text{APM}_{\text{LPT}}} \times 100\%$$

Dimana:

RG PT : Rasio antara APM perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

APM_{PPT} : APM perempuan di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

APM_{LPT} : APM laki-laki di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

Rasio APM Perguruan Tinggi (PT) perbandingan antara APM kuintil terendah dan kuintil teratas

$$\text{RK PT} = \frac{\text{APM}_{\text{RPT}}}{\text{APM}_{\text{TPT}}} \text{ x } 100\%$$

Dimana:

RK PT : Rasio antara APM Kuintil Terendah dan Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

APM_{RPT} : APM Kuintil Terendah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

APM_{TPT} : APM Kuintil Tertinggi di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT)

Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥15 tahun.

$$\text{PAMH} \geq 15 = \frac{\text{JAMH} \geq 15}{\text{JP} \geq 15} \times 100\%$$

Di mana:

PAMH ≥15 : Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun

JAMH ≥15 : Banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang melek huruf pada periode tertentu

JP≥15 : Jumlah penduduk umur ≥15 tahun pada periode yang sama

Indikator 4.6.1.(b) Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun

AMH penduduk umur 15-24 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk umur 15-24 tahun.

bappelitbangda

AMH penduduk umur 15-59 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15-59 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, dengan jumlah penduduk umur 15-59 tahun.

$$\text{PAMH } 15-24 = \frac{\text{JAMH } 15-24}{\text{JP } 15-24} \times 100\%$$

Di mana:

PAMH 15-24 : Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun

JAMH 15-24 : Banyaknya penduduk umur 15-24 tahun yang melek huruf pada waktu tertentu

JP 15-24 : Jumlah penduduk umur 15-24 tahun pada periode yang sama

$$\text{PAMH } 15-59 = \frac{\text{JAMH } 15-59}{\text{JP } 15-59} \times 100\%$$

Di mana:

PAMH 15-59 : Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun

JAMH 15-59 : Banyaknya penduduk umur 15-59 tahun yang melek huruf pada waktu tertentu

JP 15-59 : Jumlah penduduk umur 15-59 tahun pada periode yang sama

3.2.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan)

Indikator 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun

Faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seorang perempuan untuk hamil antara lain perkawinan, dan aktivitas seksual. Perkawinan merupakan awal dari kemungkinan untuk hamil bagi seorang perempuan. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan. Masyarakat dengan usia perkawinan pertama yang rendah cenderung untuk mulai mempunyai anak pada usia yang rendah pula dan mempunyai fertilitas yang tinggi.

$$\text{PHB } < 15 = \frac{\text{JPHB } < 15}{\text{JP } (20-24)} \times 100\%$$

bappelitbangda

Di mana:

PHB <15 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun

JPHB<15 : Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun

JP (20-24) : Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun

$$\text{PHB } < 18 = \frac{\text{JPHB } < 18}{\text{JP } (20 - 24)} \times 100\%$$

Di mana:

PHB <18 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun

JPHB<18 : Jumlah perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun

JP (20-24) : Jumlah penduduk perempuan umur 20-24 tahun

Indikator 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. Jabatan manajer menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi: Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan (kode 11); Manajer Administrasi dan Komersial (kode 12); Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus (kode 13); dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya (kode 14).

$$\text{P PJP} = \frac{\text{JPJP}}{\text{JJP}} \times 100\%$$

Di mana:

P PJP : Proporsi Perempuan Pada Jabatan Pemerintah

JPJP : Jumlah perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II)

JJP : Jumlah seluruh jabatan pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Eselon I-II)

$$\text{P PJM} = \frac{\text{JPJM}}{\text{JMLP}} \times 100\%$$

Di mana:

P PJM : Proporsi perempuan pada jabatan managerial

bappelitbangda

JPJM : Jumlah tenaga manajer perempuan

JMLP : Jumlah tenaga manajer laki-laki dan perempuan

Indikator 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam

Telepon genggam/Telepon seluler, termasuk smartphone adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Proporsi individu yang memiliki telepon genggam adalah perbandingan antara individu yang memiliki telepon genggam terhadap jumlah penduduk.

$$\text{P ITG} = \frac{\text{JITGt}}{\text{JPt}} \times 100\%$$

Di mana:

P ITG : Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam

JITGt : Jumlah individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam pada periode tertentu

JPt : Jumlah penduduk pada periode tertentu

3.2.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi (Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua)

Indikator 6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman

Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman diukur dengan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (*improved basic drinking water source*), lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap diperlukan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pencatatan indikator dilakukan melalui pendekatan 5 (lima) tingkatan (ladder) akses, yaitu (1) akses tidak tersedia, (2) akses tidak layak, (3) akses layak terbatas, (4) akses layak dasar, dan (5) akses aman.

(1) Akses tidak tersedia adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) secara langsung tanpa pengolahan. (2) Akses tidak layak adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak terlindung dan/atau mata air tidak

bappelitbangda

terlindung. (3) Akses layak terbatas adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit. (4) Akses layak dasar adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang. (5) Akses aman adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.

Sumber air minum layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

$$\text{PAMSA} = \frac{\text{JRTAMSA}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Di mana:

PAMSA	:	Persentase rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun
JRTAMSA	:	Jumlah rumah tangga yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun
JRT	:	Jumlah rumah tangga seluruhnya

<u>Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak</u>

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum).

Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai/danau/waduk/kolam/irigasi).

bappelitbangda

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$\text{P AML} = \frac{\text{JRTAML}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Di mana:

P AML : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

JRTAML : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak

JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Indikator 6.2.1* Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air

Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga yang memiliki kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.

Proporsi penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air adalah perbandingan antara penduduk yang biasa mencuci tangan dengan sabun dan air dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya.

Mencuci tangan dengan air saja tidak cukup. Menurut penelitian, perilaku mencuci tangan pakai sabun merupakan intervensi kesehatan yang paling murah dan efektif dilakukan dibandingkan dengan cara lainnya untuk mengurangi risiko penularan penyakit.

Data yang diukur menggunakan variabel kombinasi antara perilaku cuci tangan dan ketersediaan sarana prasarana cuci tangan dengan sabun dan air. Hal ini dimaksudkan agar variabel yang diukur dapat secara tepat menggambarkan kondisi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan disertai dengan perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air, sehingga lebih tepat sasaran.

$$\text{PPCSA} = \frac{\text{RTCSA}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Di mana:

PPCSA : Persentase penduduk yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air

RTCSA : Banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air

JRT : Jumlah rumah tangga

bappelitbangda

$$\text{PKCS} = \frac{\text{BPKCS}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Di mana:

PKCS : Persentase penduduk dengan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun

BPKCS : Banyaknya penduduk dengan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air

JP : Jumlah penduduk

Indikator 6.2.1* Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).

$$\text{PLSL} = \frac{\text{JRTSL}}{\text{JRTS}} \times 100\%$$

Di mana:

PLSL : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

JRTSL : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak

JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

3.2.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau (Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan Dan Modern Untuk Semua)

Indikator 7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga

Rasio penggunaan gas rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan gas (*liquefied petroleum gas* (LPG) dan atau jaringan gas) terhadap total rumah tangga.

$$\text{RGRT} = \frac{\text{RTG}}{\text{RT}} \times 100\%$$

Di mana:

RGRT : Rasio penggunaan gas rumah tangga

bappelitbangda

RTG : Jumlah rumah tangga yang menggunakan gas (Gas LPG dan atau Jaringan Gas)

RT : Total rumah tangga

3.2.8 Tujuan 8 Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua)

Indikator 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita

PDB per kapita (Ribu Rupiah) menunjukan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Laju pertumbuhan PDB Per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita dari periode t-1 ke periode t.

$$\text{Laju PDBpk} = \frac{(\text{PDBpk}_t + \text{PDBpk}_{t-1})}{\text{PDBpk}_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana:

PDBpk : PDB per kapita

PDBpk_t : PDB per kapita pada periode ke t

PDBpk_{t-1} : PDB per kapita pada periode ke t-1

Indikator 8.1.1.(a) PDB per kapita

PDB per kapita (Ribu Rp) menunjukan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nominal PDB dan jumlah penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDB atas harga dasar berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

$$\text{PDBpk} = \frac{\text{PDB ADHB}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Di mana:

PDBpk : PDB per kapita

PDB ADHB : PDB atas dasar harga berlaku

JP : Jumlah Penduduk

bappelitbangda

Indikator 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDB yang dipergunakan adalah PDB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja.

$$\text{LP PDB ptk} = \frac{(\text{PDB ptk}_t - \text{PDB ptk}_{t-1})}{\text{PDB ptk}_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana:

LP PDB ptk	:	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja
PDB ptk_t	:	PDB per tenaga kerja pada periode t
PDB ptk_{t-1}	:	PDB per tenaga kerja pada periode t-1

Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian

Pekerja informal di sektor non-pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.

$$\text{P LPINP} = \frac{\text{PINP}}{\text{PTINP}} \times 100\%$$

Di mana:

P LPINP	:	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian
PINP	:	Jumlah Penduduk yang bekerja informal di sektor non Pertanian
PTINP	:	Jumlah keseluruhan penduduk bekerja di sektor non Pertanian

Indikator 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal

Tenaga kerja formal merupakan penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.

$$\text{PTKF} = \frac{\text{JTKF}}{\text{JTK}} \times 100\%$$

Di mana:

P TKF	:	Persentase tenaga kerja formal
JTKF	:	Jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal
JTK	:	Jumlah penduduk yang bekerja

bappelitbangda

Indikator 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian

Pekerja informal di sektor pertanian adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja bebas.

$$\text{P TKINP} = \frac{\text{JTKINP}}{\text{JTK}} \times 100\%$$

Di mana:

P TKINP	:	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian
JTKINP	:	Jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal pertanian
JTK	:	Jumlah penduduk yang bekerja

Indikator 8.5.1* Upah rata-rata per jam kerja

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/ kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya.

Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam baik berupa uang maupun barang.

$$\text{U Rt} = \frac{\text{U}}{\text{JK} \times 4}$$

Di mana:

U Rt	:	Upah rata-rata per jam kerja (Rupiah)
U	:	Upah baik uang maupun barang yang diperoleh dalam sebulan (Rupiah)
JK	:	Jumlah jam kerja aktual dalam seminggu (jam)

Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

bappelitbangda

$$\text{TPT} = \frac{\text{PP}}{\text{PAK}} \times 100\%$$

Di mana:

TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)

PP : Jumlah pengangguran (orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

Indikator 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran

Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

$$\text{TSP} = \frac{\text{PB}_{\text{JK<35}}}{\text{PB}} \times 100\%$$

Di mana:

TSP : Tingkat setengah pengangguran (%)

$\text{PB}_{\text{JK<35}}$: Jumlah pekerja yang tergolong setengah penganggur (orang)

PB : Jumlah penduduk yang bekerja (orang)

Indikator 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)

Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (*youth not in education, employment, or training atau NEET*) adalah kaum muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja atau pelatihan.

Penduduk dalam kategori usia muda adalah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15–24 tahun.

$$\text{Pr NEET} = \frac{\text{PTB}_{15-24} + \text{PTS}_{15-24} + \text{PTT}_{15-24}}{\text{P}_{15-24}} \times 100\%$$

Di mana:

Pr NEET : Persentase penduduk usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (%)

PTS_{15-24} : Jumlah penduduk usia muda yang tidak sekolah (orang)

PTB_{15-24} : Jumlah penduduk usia muda yang tidak bekerja (orang)

PTT_{15-24} : Jumlah penduduk usia muda yang tidak mengikuti training/pelatihan (orang)

P_{15-24} : Jumlah penduduk usia 15-24 tahun (orang)

bappelitbangda

Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara merupakan banyaknya perjalanan kurang dari 6 bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi obyek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan salah satu kriteria:

a. Penduduk yang melakukan perjalanan mengunjungi objek wisata komersial;
b. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial namun menginap di usaha jasa akomodasi;
c. Penduduk yang melakukan perjalanan tidak mengunjungi obyek wisata komersial maupun tidak menginap di usaha jasa akomodasi tetapi menempuh perjalanan di atas 100 km (pulang-pergi).



Gambar 3-1 Bagan Perjalanan Wisatawan Nusantara

Sumber: Metadata Pilar Ekonomi Edisi II

bappenda

3.2.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi)

Indikator 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur

Tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja pada suatu usaha dengan menerima upah/ gaji baik berupa uang maupun barang (pekerja dibayar) maupun pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan usaha tetapi tidak dibayar (pekerja tidak dibayar). Bagi pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja normal (satu shift) tidak dianggap pekerja.

$$\text{Proporsi TK pada sektor IM} = \frac{\text{JTK IM}}{\text{JTK}} \times 100\%$$

Di mana:

TK	:	Tenaga kerja
IM	:	Industri manufaktur
JTK IM	:	Jumlah tenaga kerja industri manufaktur
JTK	:	Jumlah tenaga kerja

Indikator 9.c.1* Proporsi penduduk terlayani mobile broadband

Akses bergerak pitalebar (mobile broadband) adalah akses yang berkecepatan 1 Mbps untuk akses ergerak (mobile). Jaringan 4G adalah jaringan seluler yang memenuhi standar generasi keempat untuk transmisi nirkabel data seluler.

$$P\ PMB = \frac{LPMB}{LP} x100\%$$

Di mana:

P PMB : Penduduk terlayani mobile broadbandLPM

B : Jumlah total luas pemukiman yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar

LP : Jumlah total luas pemukiman Indonesia.

3.2.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan (Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara)

Indikator 10.1.1* Koefisien Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.

Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan

bappelitbangda

ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

$$\text{Koefisien Gini} = 1 - \sum_{i=1}^{n} f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$$

Di mana:

f_{pi} : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-1

F_{ci-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Indikator 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Secara umum indikator ini digunakan untuk mengetahui distribusi penduduk yang dikategorikan miskin menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimun makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

$$P\ PM = \frac{JPM}{JP} x\ 100\%$$

Di mana:

P PM : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

JPM : Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

JP : Jumlah penduduk pada periode yang sama

Indikator 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas

Jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendapatan (diproksi dengan pengeluaran) di bawah 50 persen dari nilai median pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam persentase.

$$\text{PPHM} = \frac{\text{JPHM}}{\text{JP}} \times 100\%$$

bappelitbangda

Dimana:

PPHM : Persentase penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita

JPHM : Jumlah penduduk yang hidup di bawah 50 persen median pengeluaran per kapita

JP : Jumlah penduduk pada periode yang sama

3.2.11 Tujuan 11 Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas (Menjadikan Kota Dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan)

Indikator 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan SDG Goal 11 *Monitoring Framework*, terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk permukiman kumuh yaitu ketahanan bangunan (*durable housing*), kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*), akses air minum (*access to improved water*), akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan keamanan bermukim (*security of tenure*).

Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
   a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah genteng, kayu/sirap, dan seng.
   b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok/ *Glass-Reinforced Concrete* (GRC) board, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
   c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/ bata merah.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2
3. Memiliki akses air minum (*access to improved water*) yaitu sumber air yang berasal dari leding meteran (keran individual), leding eceran, keran umum (komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Sementara itu, bagi rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan/atau air isi ulang sebagai sumber air minum

bappelitbangda

dikategorikan sebagai rumah tangga yang memiliki akses layak jika sumber air untuk masak dan MCK-nya menggunakan sumber air minum terlindung.

4. Memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi kelayakan bangunan atas dan bawah, antara lain: memiliki fasilitas sanitasi yang klosetnya menggunakan leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Khusus untuk rumah tangga di perdesaan, tempat pembuangan akhir tinja berupa lubang tanah dikategorikan layak.

Sedangkan dua komponen yang akan terus dikawal adalah: (1) keamanan bermukim dengan proksi berupa bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal. Rumah tangga dikategorikan memiliki keamanan bermukim jika jenis bukti kepemilikan rumah/bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertifikat selain SHM (SHGB, SHSRS). Adapun Surat bukti lainnya (Girik, Letter C, dll), masih dikategorikan bukti kepemilikan yang kurang aman; (2) Hunian didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau.

Berdasarkan penjelasan kriteria tersebut dapat disimpulkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase rumah tangga yang tinggal pada rumah yang memenuhi empat kriteria diatas dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun sewa oleh seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

$$\text{PHLT} = \frac{\text{JRTHLT}}{\text{JRT}} \times 100\%$$

Dimana:

PHLT : Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau
JRTHLT : Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau
JRT : Jumlah rumah tangga

Indikator 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana).

bappelitbangda

Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana (Perka BNPB atau Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 8/2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan).

Jumlah korban hilang adalah jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan/ atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya (Perka BNPB No. 8/2011).

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/ jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana (Perka BNPB No. 8/2011).

Berdasarkan definisi tersebut, jumlah korban bencana yang dihitung adalah korban meninggal, hilang, terluka/sakit, dan mengungsi.

$$\mathrm{JKM_{SR}} = \left(\frac{\mathrm{JKM}}{\mathrm{JP}}\right) \times 100.000$$

Dimana:

JKM_{SR} : Jumlah korban meninggal per 100.000 orang

JKM : Jumlah korban meninggal akibat bencana

JP : Jumlah penduduk

$$\mathrm{JKL_{SR}} = \left(\frac{\mathrm{JKL}}{\mathrm{JP}}\right) \times 100.000$$

Dimana:

JKL_{SR} : Jumlah korban terluka per 100.000 orang

JKH : Jumlah korban terluka akibat bencana

JP : Jumlah penduduk

bappelitbangda

3.2.12 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat (Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan)

Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Dalam konteks ini cakupan korban kejahatan kekerasan terkait penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya.

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

$$\text{PPKK} = \frac{\text{JPKK}}{\text{JP}} \times 100\%$$

bappelitbangda

Dimana:

PPKK : Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

JPKK : Jumlah penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

JP : Jumlah Penduduk

Indikator 16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi

Korban kekerasan adalah seseorang yang dirinya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dengan kekerasan yang melaporkan kepada polisi.

Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, misalnya pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya).

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

$$\text{P PKP} = \frac{\text{JKKP}}{\text{JKK}} \times 100\%$$

Dimana:

P PKP : Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi

bappelitbangda

JKKP : Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi

JKK : Jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir

Indikator 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adalah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

$$\text{P BAL} = \frac{\text{JBAK}}{\text{JB}} \times 100\%$$

Dimana:

P BAL : Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur

JBAK : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran

JB : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun

Indikator 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Indikator ini mengukur kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun yang berada pada 40% berpendapatan bawah.

$$P\ KALPB = \frac{JPBAK}{JPB} x100\%$$

bappelitbangda

Di mana:

P KALPB : Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah

JPBAK : Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah yang memiliki akta kelahiran

JPB : Jumlah penduduk usia 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah

Indikator 16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

$$P\ AAK = \frac{JAAK}{JA} x\ 100\%$$

Di mana:

P AAK : Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

JAAK : Jumlah anak umur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran

JA : Jumlah anak umur 0-17 tahun

3.2.13 Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan)

Indikator 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.

1. Pendapatan Pemerintah yang dimaksud adalah Pendapatan Negara dalam hal ini adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020).

   Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah,

bappelitbangda

pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (UU No.9/2018 tentang PNBP)

Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020).

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS).

Total pendapatan pemerintah pusat sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total sumber pendapatan negara (Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah) dengan PDB dikali dengan 100 persen. PDB yang digunakan merupakan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

$$PPPDB = \frac{Pajak + PNPB + Hibah}{PDB} x100\%$$

Di mana:

PPPDB : Pendapatan Pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB

Pajak : Penerimaan perpajakan

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hibah : Penerimaan Hibah

PDB : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

2. Di tingkat daerah, indikator ini diukur berdasarkan pada Pendapatan Asli Daerah, yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan

bappelitbangda

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pengertian Pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu (BPS).

Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya dapat diperoleh dengan membagi total sumber pendapatan daerah dengan PDRB. PDRB yang digunakan merupakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.

$$PPD = \frac{PAD}{PDRB} x100\%$$

Di mana:

PPD : Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Indikator 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

Berdasarkan Pemungut Pajak maka penerimaan perpajakan diklasifikasikan menjadi 2(dua) yaitu:

a. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat;
b. Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah.

Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020).

Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Penerimaan Perpajakan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
    a. Pajak Kendaraan Bermotor;

bappelitbangda

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
   g. Pajak parkir;
   h. Pajak air tanah;
   i. Pajak sarang burung walet;
   j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
   k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.

$$R\ PPDB = \frac{TPP}{PDB} x100\%$$

Di mana:

R PPDB : Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
TPP : Total penerimaan perpajakan pemerintah pusat
PDB : Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

$$R\ PPD = \frac{TPD}{PDRB} x100\%$$

Di mana:

R PPD : Rasio penerimaan pajak pemerintah daerah terhadap PDRB
TPD : Total penerimaan pajak pemerintah daerah
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

bappelitbangda

Indikator 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri/Domestik adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020).

Anggaran Domestik diproksikan sebagai Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (UU No. 20/2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020).

Di tingkat daerah indikator ini diukur berdasarkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Pendapatan Asli Daerah didapat dari sumber daerah lainnya yang sah, yang bukan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Pengertian Pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009. Anggaran Domestik Daerah diproksikan sebagai Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas semua belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

$$P\ ADPB = \frac{PDN}{BN} x\ 100\%$$

Di mana:

P ADPD : Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik

PDN : Total Pendapatan Pajak dalam negeri/domestik

BN : Belanja negara

2. Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah.

$$P\ APD = \frac{PAD}{BD} x100\%$$

bappelitbangda

Di mana:

P APD : Proporsi anggaran yang didanai oleh pajak daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BD : Belanja Daerah (tidak termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa/TKDD)

Indikator 17.8.1. Proporsi individu yang menggunakan internet

Internet (*interconnection-networking*) adalah sebuah sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia secara global. Fasilitas menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi termasuk halaman *world wide web* (www), surat elektronik (*email*), berita, hiburan dan data. Fasilitas akses internet tidak diasumsikan hanya melalui komputer, dimungkinkan juga menggunakan telepon seluler, *personal digital assistant* (PDA), perangkat *game* elektronik, televisi digital, dll. Akses bisa melalui suatu jaringan tetap maupun seluler.

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet.

$$\text{P II} = \frac{\text{JP5AI}}{\text{JP}} \times 100\%$$

Di mana:

P II : Proporsi individu yang menggunakan internet

JP5AI : Jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet

JP : Jumlah penduduk

3.3 Proyeksi *Baseline*

Kajian ini menganalisis 60 indikator (98 jika memperhitungkan sub-indikator) untuk mengukur capaian SDGs di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2030. Analisis dilakukan dengan membuat proyeksi *baseline* menggunakan asumsi *Business as Usual* (BAU) atau mengikuti pola jangka panjang data tanpa adanya intervensi. Hasil proyeksi *baseline* BAU memberikan gambaran posisi Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai target TPB/SDGs pada tahun 2030. Selain itu, hasil tersebut juga dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi arah kebijakan pembangunan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

Metodologi proyeksi *baseline* menggunakan *trend projection* atau *trend forecasting* (Anderson et al., 2012; Diebold, 2007; Wooldridge, 2013). Proyeksi dilakukan dengan melakukan regresi antara sebuah variabel yang nilainya pada waktu mendatang ingin diprediksi (sebagai variabel bebas) terhadap variabel waktu menggunakan estimator *Ordinary Least Square* (OLS) berdasarkan data *time series*. Namun, tidak semua indikator memiliki data historis yang cukup panjang untuk proses proyeksi.

Proses pemilihan model regresi untuk proyeksi *baseline* tidak hanya satu. Terdapat tiga model yang masing-masing menunjukkan pemilihan jenis tren untuk melakukan proyeksi. Pemilihan model yang tepat sangat penting karena harus sesuai dengan bentuk tren data *time series* yang sudah tersedia. Jenis tren yang umum digunakan untuk *trend projection* dan *trend forecasting* meliputi linear, eksponensial, dan logaritmik (Tabel 3-2). *Trend linear* digunakan untuk data yang memiliki pergerakan meningkat atau menurun dan membentuk garis lurus. *Trend exponensial* digunakan untuk menunjukkan pergerakan data dengan tingkat pertumbuhan rata-rata yang konstan dari waktu ke waktu. Sementara itu, *trend logarithmic* digunakan untuk mengilustrasikan pergerakan data yang awalnya mengalami peningkatan atau penurunan secara cepat, namun kemudian mengalami perubahan yang mendatar. Selain *trend forecasting*, juga dilakukan penghitungan rata-rata data historis untuk memproyeksikan indikator terpilih pada tahun 2030 dengan asumsi bahwa proyeksi tahun 2030 sama dengan data pada tahun terakhir, dan berdasarkan penilaian para ahli (*expert judgement*).

Tabel 3-2 Jenis *Trend* dan Spesifikasi Model Regresi

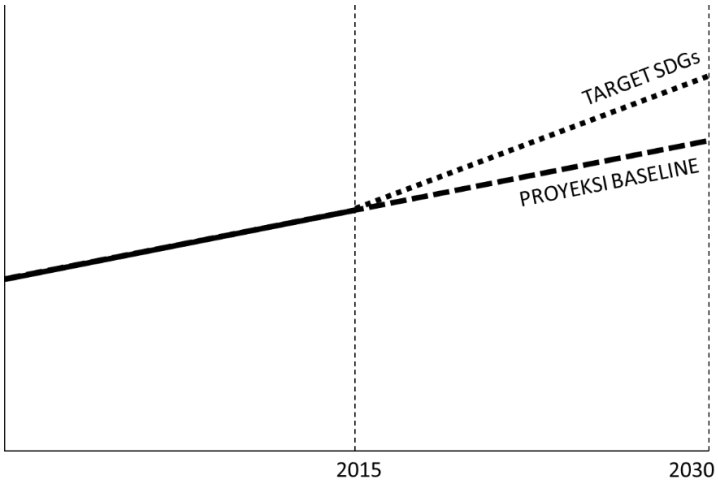
Jenis *Trend*	Spesifikasi Model Regresi
Linear	$y_t = \beta_0 + \beta_1 waktu_t + \varepsilon_t$
Eksponensial	$Ln(y_t) = Ln(\beta_0) + \beta_1 waktu_t + \varepsilon_t$
Logaritmik	$y_t = \beta_0 + \beta_1 Ln(waktu_t) + \varepsilon_t$

3.4 Target dan *Scorecard*

Untuk mendapatkan pemahaman tentang pencapaian indikator TPB/SDGs, diperlukan suatu ukuran atau target yang jelas pada tahun 2030. Target tersebut dapat bersifat kuantitatif dan ditetapkan baik secara global maupun nasional. Selain itu, terdapat pula target yang bersifat kualitatif, namun perlu diukur secara kuantitatif melalui penilaian ahli (*expert judgment*). Hasil proyeksi pencapaian TPB/SDGs pada tahun 2030 dibandingkan dengan target TPB/SDGs 2030 dan disajikan dalam bentuk

bappelitbangda

scorecard dengan penilaian tertentu. Untuk lebih jelasnya, ilustrasi perbandingan hasil proyeksi pencapaian TPB/SDGs terhadap target tahun 2030 dapat dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini.



Gambar 3-2 Ilustrasi Proyeksi Terhadap Target SDGs 2030

3.4.1 Target

Di Kabupaten Bandung Barat, terdapat 71 indikator (sekitar 72,44% dari total 98 indikator terpilih dengan memperhitungkan sub-indikator) yang memiliki target TPB/SDGs yang bersifat kuantitatif. Sementara itu, 25 indikator lainnya memiliki target TPB/SDGs yang bersifat kualitatif, sehingga tim penyusun perlu melakukan kuantifikasi target TPB/SDGs agar dapat melakukan penilaian secara menyeluruh menggunakan *expert judgement*.

Target indikator terpilih berasal dari berbagai sumber, termasuk United Nations (UN), World Health Organization (WHO), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), International Labour Organization (ILO), Rencana Aksi Nasional (RAN), Roadmap TPB/SDGs Indonesia, dan juga melibatkan *expert judgement*. Semua target ini tertera pada Tabel 3.3 di bawah ini.

bappelitbangda

Tabel 3-3 Target Kuantitatif Indikator SDGs Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2030

Tujuan	Kode	Indikator	Target Kuantitatif	Sumber
1. Tanpa Kemiskinan	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Menurun 50% dari 2015	UN
	1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40) (%)	100%	UN
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40)	100%	UN
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)	100%	UN
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (B40)	0	UN
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat (B40) (%)	100%	UN
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat (B40) (%)	100%	UN
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat (B40) (%)	100%	UN
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (B40)	100%	UN
	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (1) akses pada layanan air minum	100%	UN
	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (2) akses pada layanan sanitasi dasar	100%	UN
	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (3) akses pada fasilitas penyehatan dasar	100%	UN
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (B40)	100%	UN
	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Kontrak/Sewa)	Nilai max + 2*std	*
	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Milik Sendiri)	100%	*
2. Tanpa Kelaparan	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment*)	3,60%	Roadmap SDGS Indonesia
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita	0	RAN
	2.2.1*	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun 40%	UN, WHO
	2.2.2*	Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Di bawah 5%	UN, WHO
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100%	UN
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan	100%	UN
	3.3.3	Kejadian Malaria per 1.000 orang	0%	UN
	3.7.1*	Proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern	64,55%	Roadmap SDGS Indonesia
	3.8.1.(a)	Proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan	0%	UN

bappelitbangda

Tujuan	Kode	Indikator	Target Kuantitatif	Sumber
	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih dari 10% total Pengeluaran Rumah Tangga)	0%	*
	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih dari 25% total Pengeluaran Rumah Tangga)	0%	*
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	100%	UN
	3.A.1*	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau	0%	OECD
4.5.4. Pendidikan Berkualitas	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	100%	UN
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	100%	UN
	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	100%	UN
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >=15 tahun.	12 Tahun	*
	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/Sederajat	100%	UN
	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/Sederajat	100%	UN
	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/Sederajat	100%	UN
	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	100%	UN
	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	100%	UN
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Dua kali lipat dari 2015	*
	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	100%	*
	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	100%	*
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio APK-SD antara Pedesaan dan Perkotaan	100%	UN
	4.5.1*	Rasio APK SD antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/Sederajat untuk perempuan/laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio APK-SMA antara Pedesaan dan Perkotaan	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio APK-SMP antara Pedesaan dan Perkotaan	100%	UN

bappelitbangda

Tujuan	Kode	Indikator	Target Kuantitatif	Sumber
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan	100%	UN
	4.5.1*	Rasio APM-SD antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	100%	UN
	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	100%	UN
	4.6.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya	100%	UN
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk 15-59 tahun (%)	100%	UN
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun (%)	100%	UN
5. Kesetaraan Gender	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun	0	UN
	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun	0	UN
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	50%	ILO
	5.b.1*	Proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	100%	*
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	88,20%	*
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	100%	UN
	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	100%	Roadmap SDGs Indonesia
	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	100%	UN
7. Energi Bersih dan Terjangkau	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	100%	UN
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	7%	UN
	8.1.1.(a)	PDB per kapita (ribu rupiah)	119.636 (Ribu rupiah)	*
	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3,78%	OECD
	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal	25%	*
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	75%	*

bappelitbangda

Tujuan	Kode	Indikator	Target Kuantitatif	Sumber
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Menurun	*
	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja		
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	3,80%	Roadmap SDGs Indonesia
	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran		
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	3,80%	*
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta)	Meningkat 50%	*
9. Industri Inovasi dan Infrastruktur	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Meningkat dua kali lipat di negara kurang berkembang	
	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	100	*
10. Mengurangi Kesenjangan	10.1.1*	Koefisien gini	0,31	*
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Menurun 50% dari 2015	UN
	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan	0%	OECD
11. Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	100%	UN
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (1) meninggal		
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (2) terkena dampak (luka)		
	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	0	UN
16. Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	0	UN
	16.3.1.(a)	Proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi	100%	*
	16.9.1*	Proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran	100%	UN
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	100%	UN
	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	100%	UN
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.		
	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet	100%	*

Catatan: * Hasil kuantifikasi target oleh tim penyusun

bappelitbangda

3.4.2 *Scorecard*

Scorecard merupakan penilaian dari setiap indikator TPB/SDGs yang didapatkan melalui perbandingan persentase antara hasil proyeksi dengan target TPB/SDGs tahun 2030. Penilaian ini terbagi menjadi 5 (lima) klasifikasi, yaitu A, B, C, D, dan E, dengan penjelasan dan kriteria masing-masing seperti yang tertera pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3-4 Sistem Penilaian *Scorecard* SDGs Tahun 2030

A	**Mencapai atau hampir mencapai target SDGs** Asumsi *business-as-usual*, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mencapai atau hampir mencapai 97.5% target SDGs.
B	**Mendekati target SDGs** Asumsi *business-as-usual*, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mendekati target SDGs dan mencapai setidaknya 90% target SDGs.
C	**Masih seperempat jalan lagi menuju target SDGs** Asumsi *business-as-usual*, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mengarah kepada target SDGs dan mencapai setidaknya 75% target SDGs.
D	**Baru setengah jalan menuju target SDGs** Asumsi *business-as-usual*, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator mengarah kepada target SDGs dan mencapai setidaknya 50% target SDGs.
E	**Masih cukup jauh mencapai target SDGs** Asumsi *business-as-usual*, hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030 indikator tersebut masih kurang dari 50% target SDGs.

3.5 Catatan Konsistensi Data Kabupaten/Kota

Tingkat akurasi hasil proyeksi dan analisis kesiapan pencapaian indikator TPB/SDGs sangat ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya:

- Ketersediaan dan konsistensi data untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs. Pada kajian ini data yang digunakan untuk mengukur indikator TPB/SDGs tidak selalu tersedia di tingkat Kabupaten/Kota. Beberapa data yang tersedia terkadang tidak konsisten dengan data di tingkat provinsi dan/ atau nasional. Oleh karena itu, kajian ini hanya menganalisis 66 indikator (98 jika memperhitungkan sub-indikator) dari 13 tujuan SDGs yang datanya tersedia dan dapat diakses. Pencapaian TPB/SDGs dihitung menggunakan metode perhitungan yang sesuai dengan metadata SDGs Indonesia. Jumlah indikator yang dianalisis tersebut tentunya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah indikator yang digunakan oleh Indonesia (289 berdasarkan

bappelitbangda

berdasarkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II dan 319 indikator berdasarkan Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi I).

- Penentuan target yang ingin dicapai pada tahun 2030. Dari 66 indikator (98 jika memperhitungkan sub-indikator) yang dianalisis, hanya 35 indikator (53,03%) yang memiliki target kuantitatif yang bersumber dari United Nations, 4 indikator (6,06%) yang memiliki target kuantitatif yang bersumber dari *Roadmap* SDGs Indonesia, 2 indikator yang memiliki target dari UN dan WHO (23,03%), 1 indikator (1,51%) yang memiliki target kuantitatif yang bersumber dari Rencana Aksi Nasional, 1 indikator (1,51%) dengan target kuantitatif bersumber dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan 1 indikator (1,51%) dengan target kuantitatif yang bersumber dari International Labour Organization (ILO). Target kuantitatif untuk indikator lainnya ditentukan berdasarkan penilaian dari kesepakatan para ahli (*expert judgement)* dan dapat berbeda apabila ditentukan oleh para ahli yang lain. Oleh karena itu, hasil dari kuantifikasi target yang dihasilkan tentu bisa menimbulkan pro dan kontra dan menghasilkan nilai dan skor pencapaian SDGs yang berbeda pula.
- Metode tren yang digunakan untuk analisis. Pemilihan metode tren akan sangat mempengaruhi hasil proyeksi dan pada akhirnya nilai *scorecard* capaian SDGs Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan model tren ini biasanya dilakukan dengan menggunakan acuan nilai R^2 tertinggi. Namun demikian, seringkali terdapat beberapa model yang memiliki R^2 yang relatif rendah sehingga, model tren tidak digunakan dan proyeksi digantikan dengan menggunakan nilai rata-rata ataupun nilai data terakhir. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil proyeksi dan pada akhirnya nilai *scorecard* capaian SDGs Kabupaten Bandung Barat.
- Jumlah indikator yang digunakan dalam analisis. Nilai dari masing-masing indikator TPB/SDGs diakumulasi sehingga diperoleh *scorecard* untuk Kabupaten Bandung Barat. Apabila terjadi penambahan indikator TPB/SDGs yang dianalisis, maka *scorecard* Kabupaten Bandung Barat juga dapat berubah.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu diingat bahwa penilaian pencapaian TPB/SDGs dalam kajian ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Hasil analisis yang disajikan mungkin tidak mencerminkan proyeksi pencapaian TPB/SDGs secara menyeluruh. Selain itu, hasil proyeksi pencapaian TPB/SDGs yang ditampilkan dalam kajian ini hanya mewakili 66 indikator TPB/SDGs terpilih (98 jika memperhitungkan sub-indikator) dan dikalkulasikan dengan berbagai asumsi dalam perhitungan serta analisisnya.

bappelitbangda

BAB 4
Hasil dan Pembahasan

Data indikator TPB/SDGs yang terpilih di Kabupaten Bandung Barat diproses menggunakan perangkat STATA, dengan dasar data historis yang memiliki ketersediaan yang bervariasi. Hasil pemrosesan ini direpresentasikan dalam bentuk grafik yang memproyeksikan pencapaian TPB/SDGs terhadap target TPB/SDGs tahun 2030, sehingga dapat menentukan skor dari setiap indikator. Penjelasan hasil untuk setiap tujuan dan indikator disajikan dalam tabel yang mencakup data tahun 2015 (sebagai data terakhir MDGs sebelum SDGs) dan tahun 2020 (sebagai data terakhir saat penelitian ini dilakukan). Selain itu, terdapat juga hasil proyeksi pencapaian indikator pada tahun 2030, serta *scorecard* untuk masing-masing indikator.

4.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tanpa kemiskinan dapat diartikan dengan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimanapun. Terdapat 12 indikator terpilih pada tujuan 1, dengan pemisahan analisis indikator menjadi 15 indikator TPB/SDGs yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. *Scorecard* tujuan 1, Kabupaten Bandung Barat mencapai nilai cukup baik dengan 5 indikator memperoleh nilai *scorecard* A, 1 indikator yang menunjukkan nilai B, 4 indikator memiliki nilai C, 1 indikator dengan nilai D dan 1 indikator bernilai E. Indikator yang memperoleh nilai C diantaranya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat, SMA/MA/sederajat dan proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan sendiri. Sedangkan 2 indikator yang memperoleh nilai D adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan serta sanitasi layak dan berkelanjutan (B40). Dan 1 indikator yang memperoleh nilai E adalah proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan kontrak/sewa.

Tabel 4-1 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 1

KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	12,67	10.82	7.03	6.335	C
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40)	69,91	76,04[d]	100	100	A

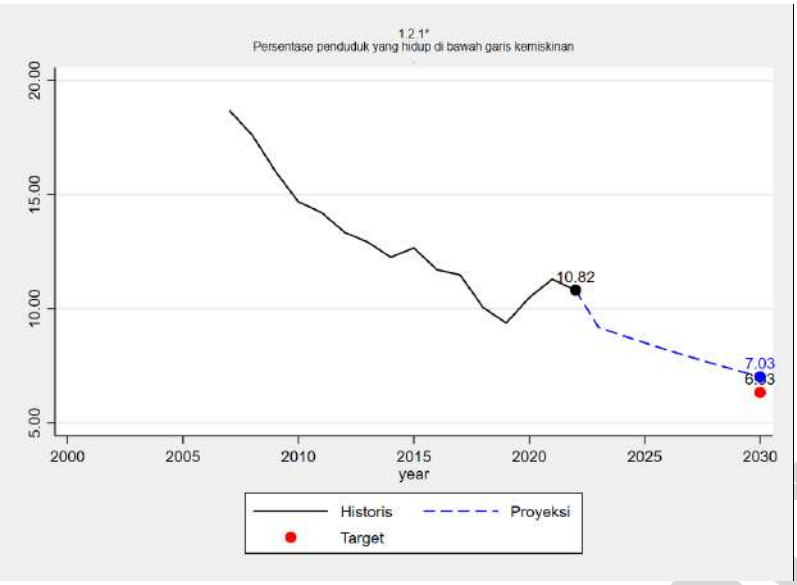
bapelitbangda

KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40)	47,62	61.80[d]	74.02	100	D
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)	36,13	34.80[d]	54.77	100	D
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (B40)	17.9	13.68[d]	4.99	0	B
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat (B40) (%)	96.82	97.33[d]	100	100	A
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat (B40) (%)	73.51	77.46[d]	85.04	100	C
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat (B40) (%)	40.03	39.87[d]	83.01	100	C
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (B40)	64.25	79,57	100	100	A
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (1) akses pada layanan air minum	44,53[c]	44,26	55.53	100	D
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (2) akses pada layanan sanitasi dasar	55,25[c]	50.96	80.86	100	C
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (3) akses pada fasilitas penyehatan dasar	56,63[d]	70.93	100	100	A
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (B40)	100	100[d]	100	100	A
1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan kontrak/sewa	2.60	3.71	5.39	38.34	E
1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan milik sendiri	91.44	83.89	88.89	100	C

Catatan: [a] Hasil analisis proyeksi. [b] Data tahun 2017. [c] Data tahun 2018. [d] Data tahun 2019.

Target 1.2 SDGs mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Dalam analisis ini, terdapat 1 indikator yang termasuk ke dalam target 1.2 dengan data historis hingga 2022 untuk indikator (1.2.1*) persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (Gambar 4.1). Secara umum, angkanya menurun, namun sempat mengalami kenaikan di tahun 2021 (11.3%) sehingga proyeksi pencapaian untuk tahun 2030 adalah 7,03%. Apabila dibandingkan dengan target

kuantitatif yang telah ditentukan oleh United Nations yaitu menurun 50% dari tahun 2015 atau 6,33% pada tahun 2030, maka menghasilkan nilai *scorecard* C.

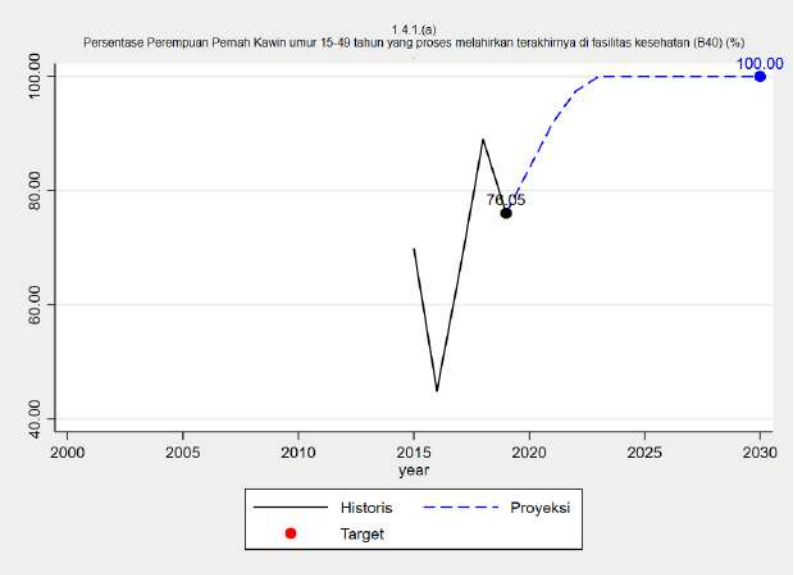


Gambar 4-1 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional

Target 1.4, hal yang ingin dicapai pada tahun 2030 adalah menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Terdapat 11 indikator target 1.4 yang dianalisis pada kajian ini.

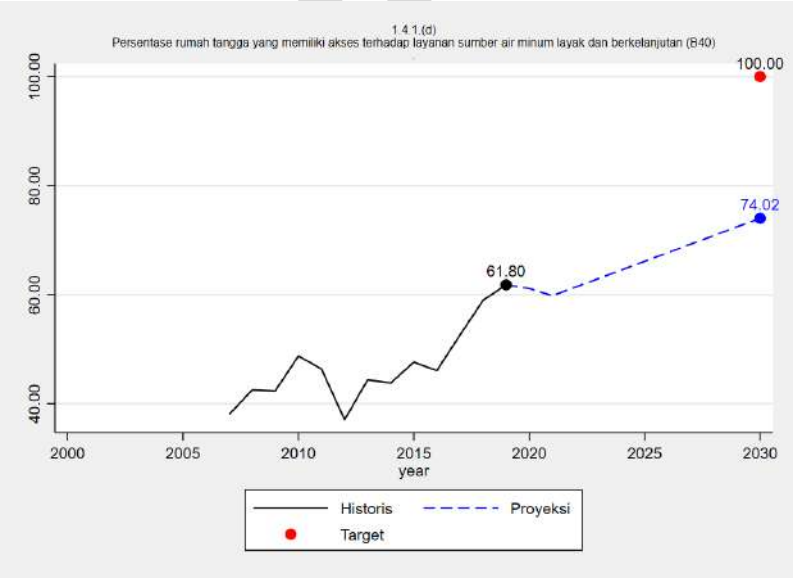
Proyeksi indikator (1.4.1.(a)) yang mengukur persentase perempuan dalam usia 15-49 tahun yang pernah menikah dan melahirkan anak terakhirnya di fasilitas kesehatan untuk kelompok dengan pendapatan terendah, menggunakan data historis dari tahun 2015 hingga 2019. Data historis ini menunjukkan tren penurunan dari tahun 2015 (69,91%) ke tahun 2016 (44,88%), namun mengalami peningkatan kembali pada tahun berikutnya (lihat Gambar 4.2). Hasil proyeksi untuk tahun 2030 adalah 100%, yang sebenarnya diperkirakan akan tercapai pada tahun 2023. Dalam perbandingan dengan target kuantitatif yang telah ditetapkan oleh United Nation (100%), Kabupaten Bandung Barat memperoleh skor A.

bappelitbangda



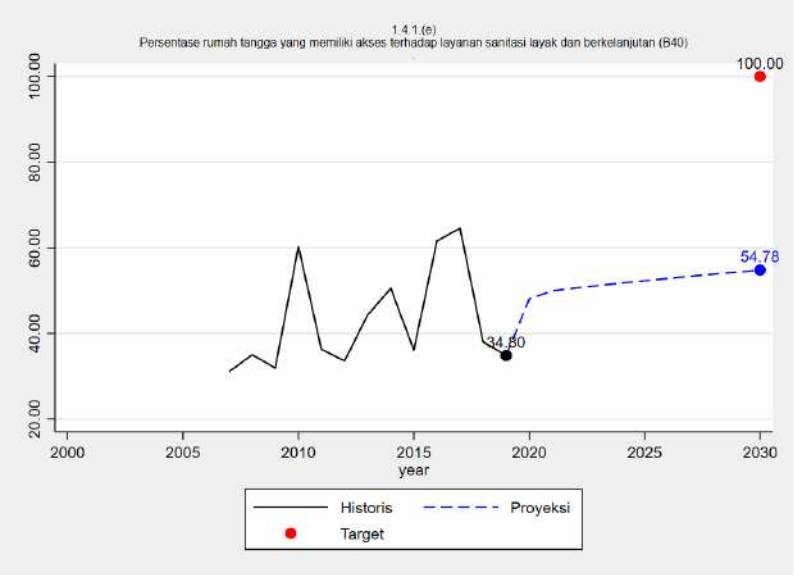
Gambar 4-2 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40) (%)

Gambar 4.3 menjelaskan data historis dari tahun 2007 hingga 2019 terkait dengan persentase rumah tangga di kelompok 40 persen pendapatan terendah yang memiliki akses ke layanan air minum yang layak dan berkelanjutan. Data ini menunjukkan fluktuasi nilai, dengan titik terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 37,06%, sedangkan titik tertinggi tercatat pada tahun 2019 dengan angka 61,8%. Hasil proyeksi untuk tahun 2030 adalah sekitar 74,02%, yang masih jauh dari target kuantitatif yang ditetapkan oleh United Nation (100%). Akibatnya, nilai *scorecard* untuk indikator ini adalah D.



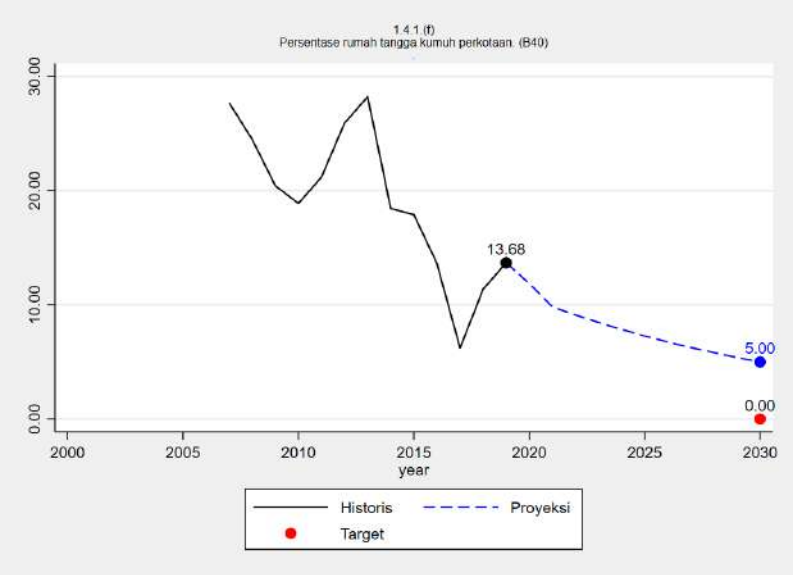
Gambar 4-3 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40)

ba utbangda



Gambar 4-4 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)

Indikator yang mengukur persentase rumah tangga di kelompok 40 persen pendapatan terendah yang memiliki akses ke layanan sanitasi yang layak dan berkelanjutan dianalisis dengan menggunakan data historis hingga 2019 (lihat Gambar 4.4). Data tersebut mengungkapkan tren fluktuatif yang sangat bervariasi, dengan angka terendah mencapai 31,06% pada tahun 2007 dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2017 dengan angka 64,54%. Pada tahun 2019, angka tersebut kembali menurun menjadi 34,8%, yang berdampak pada proyeksi tahun 2030 sebesar 54,77%. Angka ini masih jauh dari target kuantitatif yang telah ditetapkan oleh United Nation, yaitu 100%. Oleh karena itu, indikator ini mendapatkan nilai *scorecard* D.

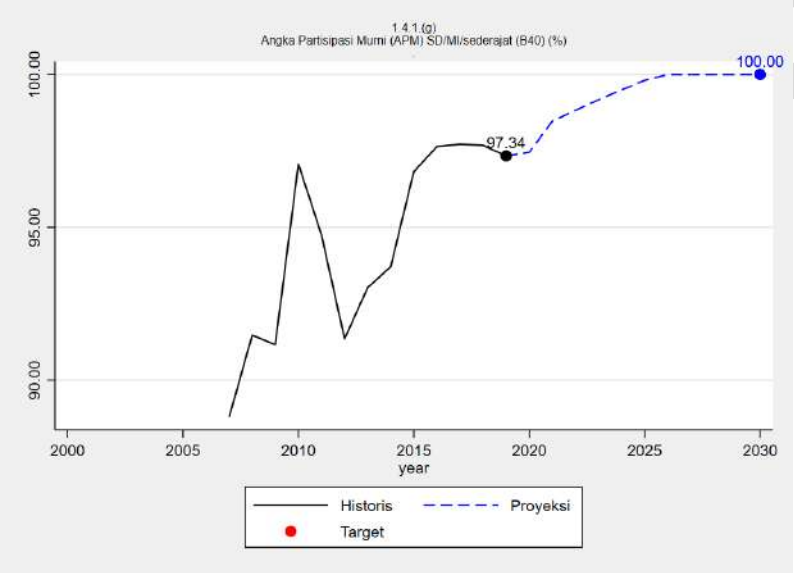


Gambar 4-5 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga kumuh perkotaan (B40)

baslitbangda

Indikator persentase rumah tangga kumuh perkotaan untuk kelompok 40 persen pendapatan terendah digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan masalah kemiskinan yang mungkin muncul akibat ketidakmerataan pembangunan. Di Kabupaten Bandung Barat, persentase rumah tangga kumuh perkotaan umumnya mengalami penurunan, meskipun mengalami peningkatan singkat pada tahun 2011 hingga 2013, serta pada tahun 2018 dan 2019 (13,68%). Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, persentase ini akan mencapai 4,99% atau mendekati 5%, yang cukup mendekati target nol persen yang ditetapkan oleh United Nations dengan nilai B.

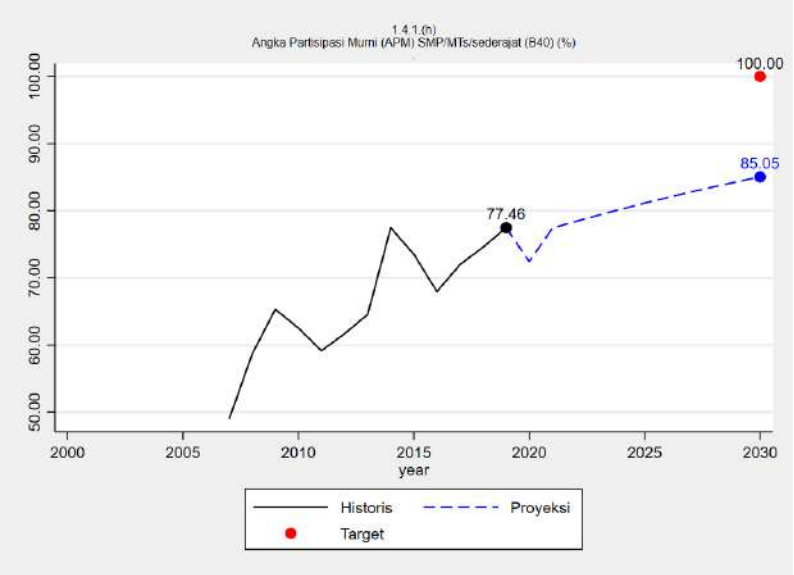
Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) mencerminkan kapasitas sistem pendidikan dalam menjangkau populasi usia sekolah. Dengan menggunakan nilai APM ini, kita dapat mengukur berapa banyak orang usia sekolah yang dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikannya.



Gambar 4-6 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat (B40) (%)

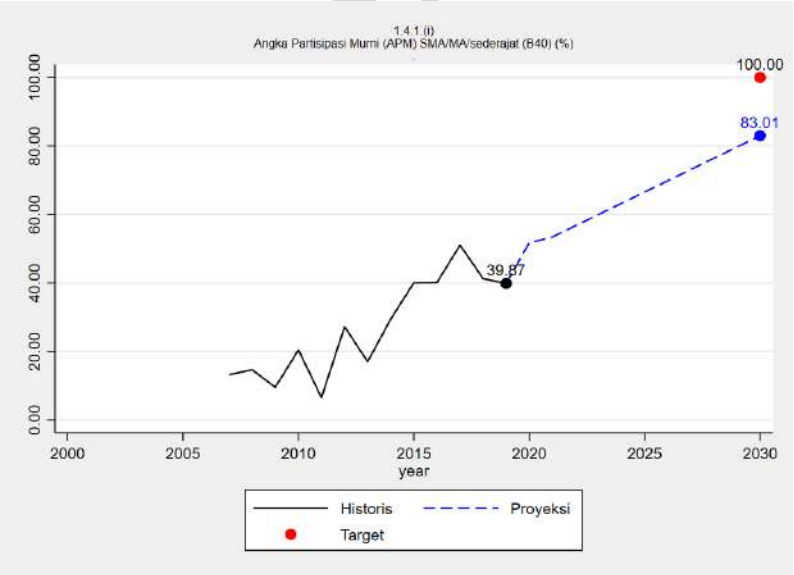
Data historis menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk penduduk dalam kelompok 40% dengan pendapatan terendah di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan, meskipun tidak signifikan (lihat Gambar 4.6). Pada tahun 2019, APM mencapai 97,34%, dan proyeksi menunjukkan bahwa akan mencapai 100% pada tahun 2026, yang sesuai dengan target yang ditetapkan oleh United Nation. Oleh karena itu, skor untuk indikator ini adalah A. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mulai tahun 2026, semua anak dalam kelompok penduduk 40% dengan pendapatan terendah di Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat mengikuti pendidikan dengan tepat waktu.

bappeda



Gambar 4-7 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat (B40) (%)

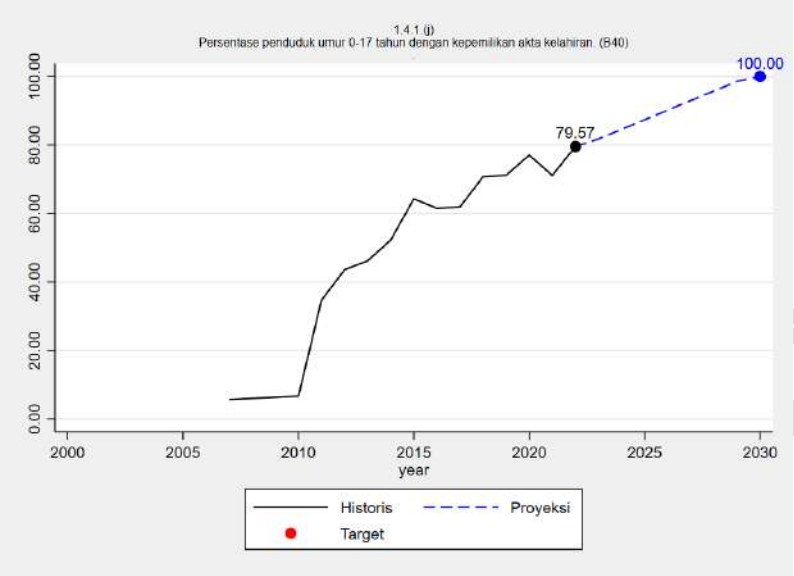
Gambar 4.7 menunjukkan APM SMP/MTs/sederajat yang pada awalnya memiliki angka relatif rendah, hanya mencapai 48,97%. Data historis menunjukkan fluktuasi nilai yang cenderung meningkat, tetapi tidak secara signifikan. Pada tahun 2019, angka tersebut mencapai 77,46%, dan proyeksi untuk tahun 2030 adalah 85,04%. Target yang ditetapkan oleh United Nation adalah 100%, sehingga indikator ini mendapatkan *scorecard* C. Dengan demikian, diperkirakan bahwa semua anak di Kabupaten Bandung Barat dalam kelompok penduduk 40% dengan pendapatan terendah yang berusia SMP/MTs/sederajat masih belum dapat mengikuti pendidikan dengan tepat waktu.



Gambar 4-8 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat (B40) (%)

bandungbarat

Sama seperti yang terjadi pada indikator APM SMP/MTs/sederajat, indikator APM SMA/MA/sederajat untuk kelompok penduduk 40% dengan pendapatan terendah di Kabupaten Bandung Barat mendapat *scorecard* C karena diperkirakan akan mencapai 83,01% pada tahun 2030. Data historis menunjukkan fluktuasi yang signifikan dengan tren umum yang meningkat (lihat Gambar 4.8). Pada tahun 2019, data terakhir menunjukkan angka yang cukup rendah, yaitu 39,87%.



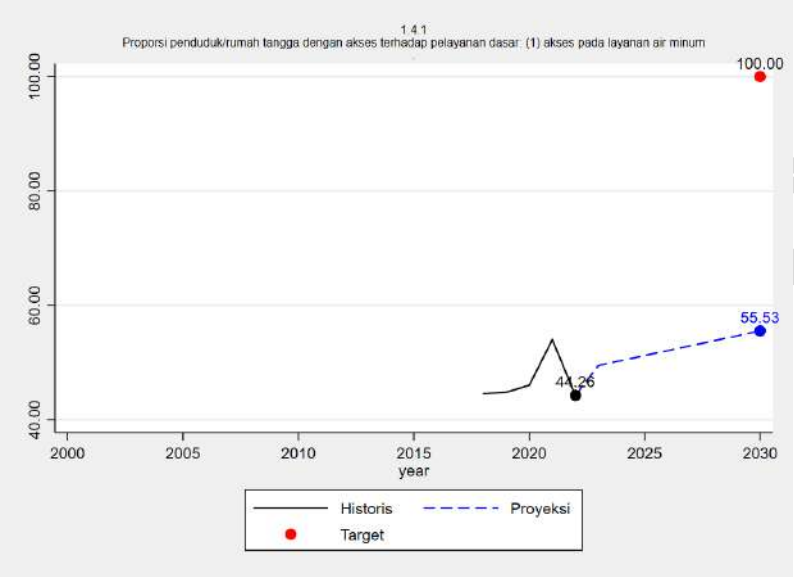
Gambar 4-9 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (B40)

Data historis presentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran memiliki tren yang cenderung meningkat. Pencapaian sebesar 79,57% terjadi pada tahun 2020, dengan hasil proyeksi mencapai target yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (100%) pada tahun 2028. Dengan demikian, persentase kepemilikan akta kelahiran untuk kelompok penduduk 40% dengan pendapatan terendah di Kabupaten Bandung Barat mendapatkan *scorecard* A.

Indikator yang mengukur persentase penduduk berusia 0-17 tahun dalam kelompok pendapatan terendah yang memiliki akta kelahiran digunakan untuk menghitung jumlah anak yang telah memiliki dokumen akta kelahiran sebelum mencapai usia ketika mereka dianggap dewasa atau sudah cukup umur untuk bekerja dan menikah. Setelah anak-anak memiliki akta kelahiran, mereka akan diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang juga tercatat dalam Kartu Keluarga (KK). Dengan memiliki dokumen ini dan diakui identitasnya, mereka dapat dengan mudah mengakses layanan sosial, jaminan sosial, dan pelayanan publik lainnya. Inilah dasar pemikiran di balik pengukuran indikator ini, karena pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran dianggap sebagai langkah awal untuk memastikan pengakuan hukum, perlindungan hak-hak mereka, dan mencegah pelanggaran hak-hak tersebut.

bappelitbangda

Ketika seorang anak tidak memiliki dokumen identifikasi resmi, ia akan menghadapi kesulitan atau bahkan risiko ditolak ketika mencoba mengakses layanan kesehatan atau pendidikan. Selain itu, dampak lainnya yang mungkin dialami oleh anak yang tidak memiliki akta kelahiran adalah kesulitan dalam memutuskan pernikahan, kesempatan untuk bekerja, atau bahkan risiko dipaksa masuk ke dalam militer sebelum mencapai usia legal yang ditentukan. Ketika mereka telah dewasa, akta kelahiran menjadi sangat penting untuk berbagai keperluan, seperti mendapatkan jaminan sosial, mencari pekerjaan dalam sektor formal, melakukan pembelian properti atau tanah, mengakses hak untuk memilih, dan mengajukan permohonan paspor.

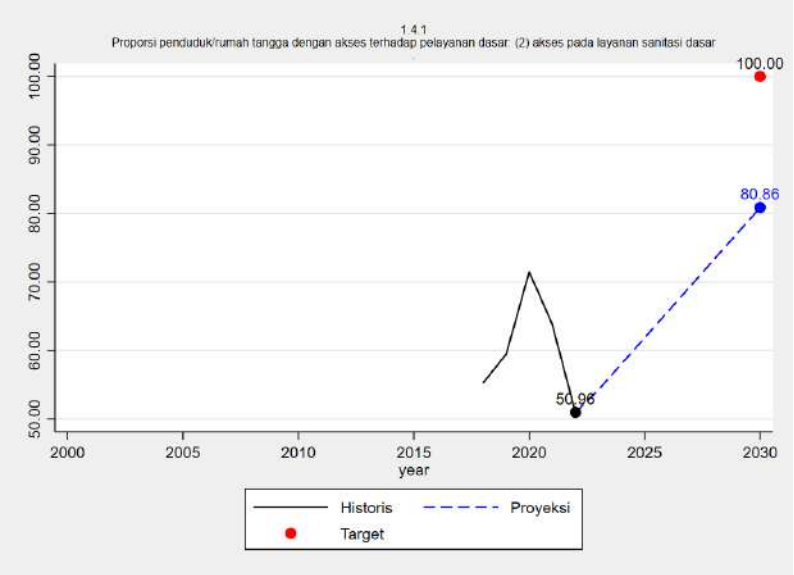


Gambar 4-10 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar, akses pada layanan air minum

Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap layanan air minum memiliki data historis dari tahun 2018 hingga 2022 (44,26%) yang memiliki tren berfluktuasi. Proyeksi tahun 2030 mencapai 55,53%, lebih dari 50% menuju target yang telah ditentukan namun masih jauh, sehingga memperoleh nilai D (Gambar 4.10).

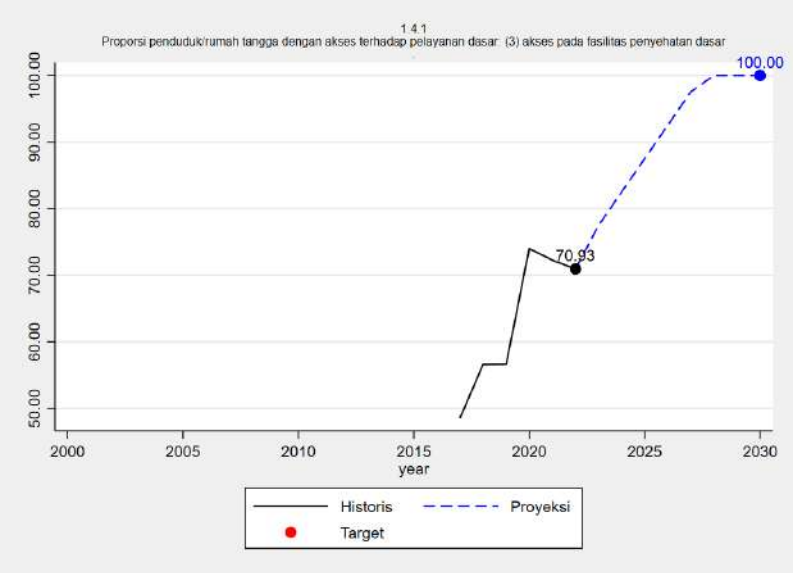
Sedangkan untuk proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap layanan sanitasi dasar memiliki data historis dari tahun 2018 hingga 2022 (50,96%) yang memiliki tren berfluktuasi. Proporsi sempat mencapai titik tertinggi tahun 2020 (di atas 70%) namun menurun kembali. Proyeksi tahun 2030 mencapai 80,86%, lebih dari 75% menuju target yang telah ditentukan namun masih jauh, sehingga memperoleh nilai C (Gambar 4.11).

bappelitbangda



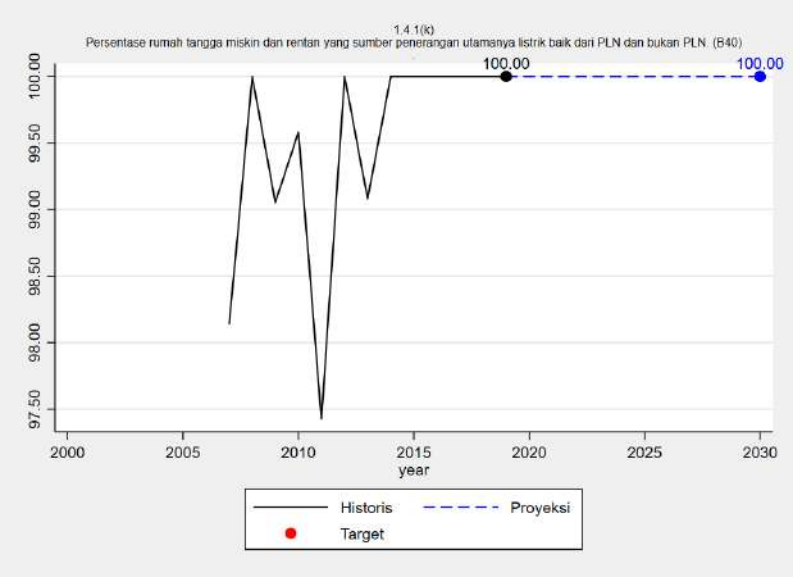
Gambar 4-11 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar, akses pada layanan sanitasi dasar

Untuk proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses pada fasilitas penyehatan dasar memiliki data historis dari tahun 2019 hingga 2022 (70,93%) memiliki tren berfluktuasi. Proporsi sempat mencapai titik tertinggi tahun 2020 (di atas 70%) namun menurun kembali. Tahun 2020 hingga 2022 berada di angka lebih dari 70%, dengan hasil proyeksi 100% akan tercapai pada tahun 2026, sehingga memperoleh nilai A (Gambar 4.12).



Gambar 4-12 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar, akses pada fasilitas penyehatan dasar

baksitbangda

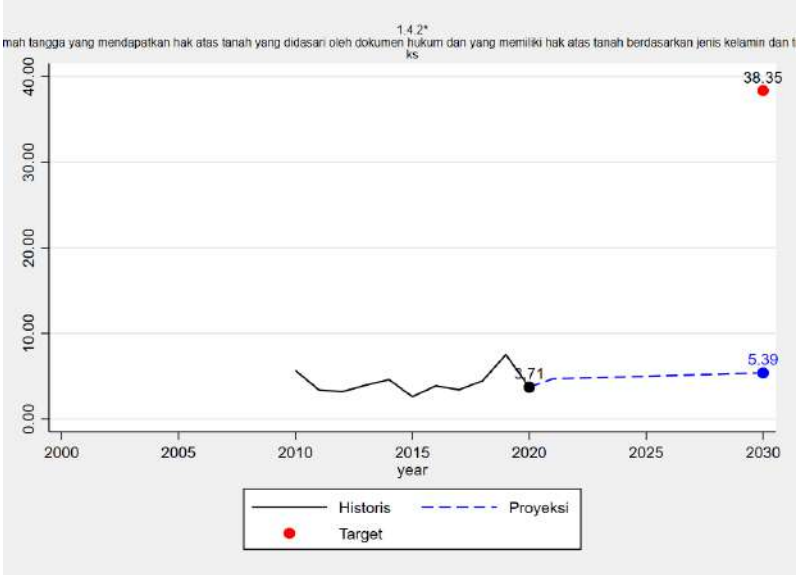


Gambar 4-13 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (B40)

Indikator yang menilai persentase rumah tangga miskin dan rentan yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, baik itu dari PLN atau sumber lainnya, digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku rumah tangga miskin yang sudah memiliki akses listrik. Tujuannya adalah agar akses listrik yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga ini untuk meningkatkan produktivitas, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap informasi. Dengan adanya pasokan listrik yang memadai, kualitasnya yang baik, dan harga yang terjangkau, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, pemberian akses listrik juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

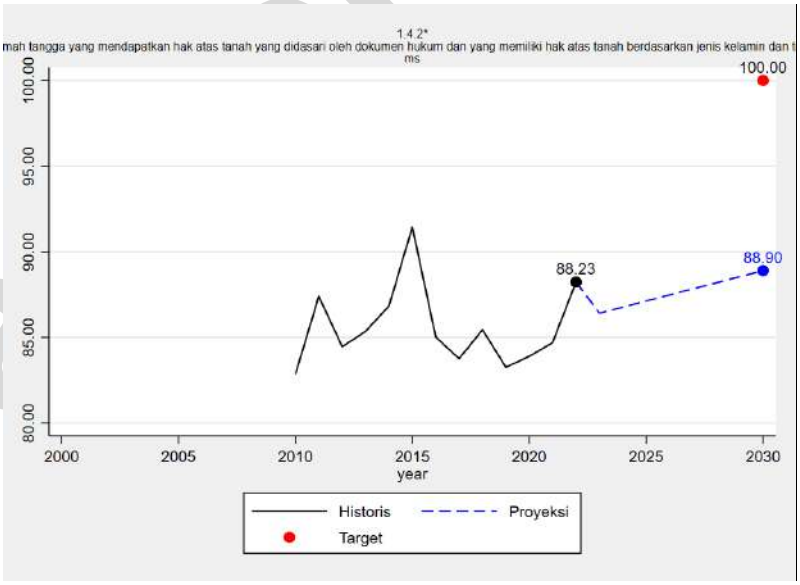
Data historis mengenai indikator rasio elektrifikasi pada kelompok rumah tangga dengan pendapatan terendah 40% di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan adanya fluktuasi. Namun, data tersebut juga mencerminkan bahwa rasio elektrifikasi di kelompok rumah tangga dengan pendapatan terendah 40% di Kabupaten Bandung Barat telah mencapai target 100% yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2014. Akibatnya, indikator ini mendapatkan nilai A. Sejak tahun 2014, rumah tangga miskin dan rentan di Kabupaten Bandung Barat telah memiliki akses penuh ke sistem penerangan.

bappelitbangda



Gambar 4-14 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan kontrak/sewa

Berdasarkan data historis yang diperoleh dari tahun 2010 hingga tahun 2020 mengenai indikator proporsi rumah tangga yang memiliki hak atas tanah berdasarkan dokumen hukum yang berdasarkan tipe kepemilikan kontrak/sewa, terlihat bahwa nilainya sangat rendah, memiliki tren yang cenderung *flat* (Gambar 4.14). Target yang ditetapkan oleh Tim Penyusun sekitar 38,35%, namun proyeksi hasil hingga tahun 2030 masih sangat jauh dari ekspektasi tersebut, yaitu 5,39%, sehingga indikator ini mendapatkan scorecard E, yang merupakan satu-satunya yang mendapat peringkat rendah di dalam tujuan 1.



Gambar 4-15 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah tipe kepemilikan milik sendiri

balitbangda

Proporsi rumah tangga yang memiliki hak atas tanah berdasarkan dokumen hukum dengan kepemilikan milik sendiri di Kabupaten Bandung Barat lebih besar daripada kepemilikan berdasarkan kontrak/sewa. Data historis menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan yang tidak terlalu besar. Proyeksi pencapaian pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 88,90%, lebih dari 75% untuk mencapai target 100% sehingga menghasilkan penilaian dengan scorecard C (Gambarr 4.15).

4.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tanpa kelaparan diartikan dengan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan 2 dipresentasikan oleh 4 indikator yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. 1 indikator tujuan ini diproyeksikan sudah mendekati target yang ditetapkan pada tahun 2030 (*scorecard* A) yaitu prevalensi *wasting*. Sedangkan 2 indikator lainnya belum bisa mencapai target karena memperoleh nilai C diantaranya prevalensi kekurangan gizi dan *stunting*. Satu indikator yang memiliki nilai E pada tujuan 2 di Kabupaten Bandung Barat adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan.

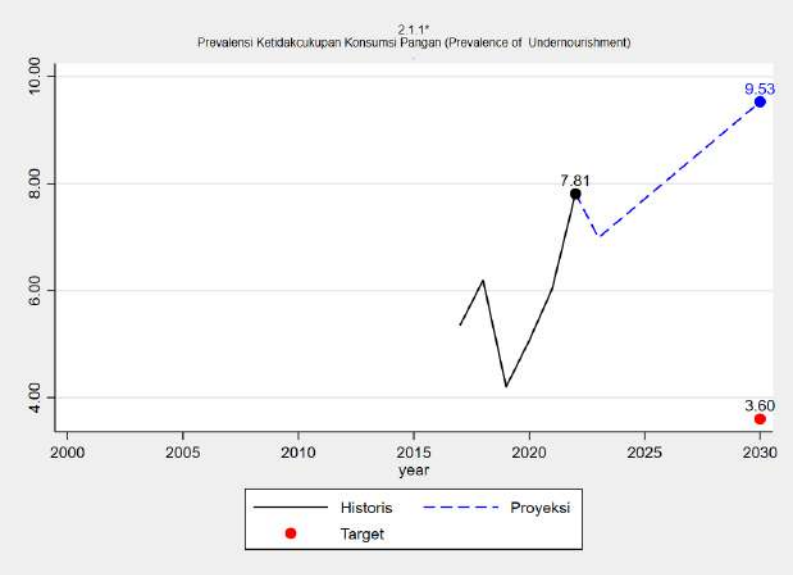
Tabel 4-2 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 2

KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	5,34[b]	7,81	9,53	3,6	E
2.1.1.(a)	Prevelansi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	16,9	15,7	15,50	0	C
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	29,6	27,3	19,72	17,76	C
2.2.2*	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita.	7,3	4,1	0,36	5	A

Catatan: [a] Hasil analisis proyeksi. [b]Data tahun 2017.

Hal yang ingin dicapai sesuai dengan target 2.1 adalah pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

bappelitbangda



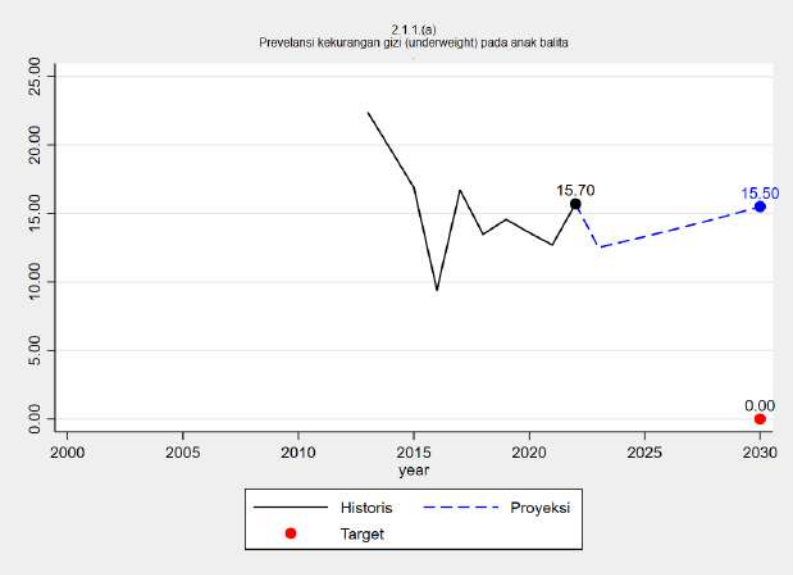
Gambar 4-16 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan

Data historis yang mencakup periode dari tahun 2017 hingga tahun 2022 menunjukkan tingkat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang relatif rendah dan menggambarkan tren yang naik (lihat Gambar 4.16). Berdasarkan proyeksi hingga tahun 2030, tingkat tersebut diprediksi akan mencapai 9,53%, tren yang seharusnya menurun hingga mencapai target 3,6% malah mengalami kenaikan, sehingga indicator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai E.

Target 2.2 SDGs menyatakan bahwa pada tahun 2030 dapat menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Data historis mengenai indikator prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita yang diperoleh dari data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat dan Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES. Tren data historis sangat berfluktuasi dengan angka 15,7% pada tahun 2022 dan hasil proyeksi indikator tersebut pada tahun 2030 mencapai 15,50%. Target kuantitatif yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 0%, sehingga Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai *scorecard* C untuk indikator ini seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.17.

bappelitbangda

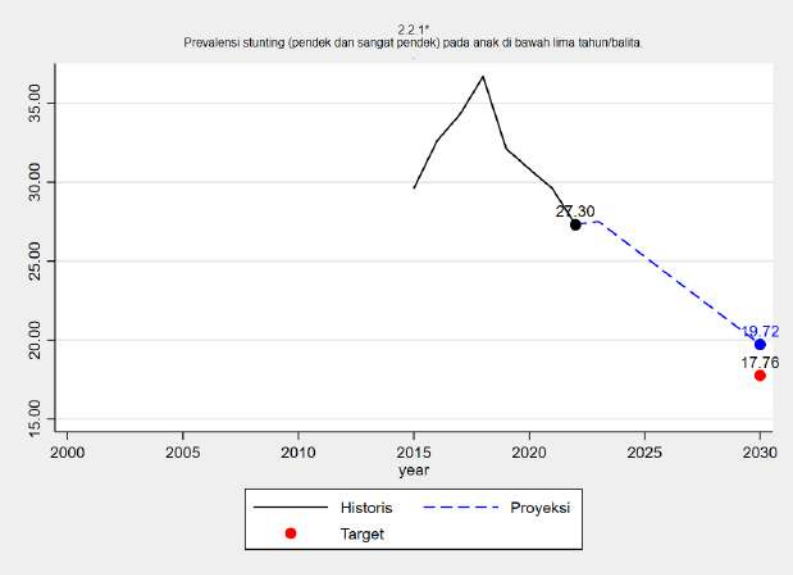


Gambar 4-17 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevelansi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita

Indikator prevalensi stunting pada anak di bawah usia lima tahun digunakan untuk mengukur persentase anak-anak dalam kelompok usia tersebut yang mengalami pertumbuhan fisik yang lebih pendek daripada tinggi badan rata-rata anak sebaya. Masalah stunting pada anak-anak juga dapat mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Hasil dari penelitian empiris menunjukkan bahwa stunting pada usia muda dapat menyebabkan kerusakan permanen pada perkembangan otak, yang sulit untuk diperbaiki ketika anak tumbuh dewasa, bahkan jika mereka menerima asupan gizi yang memadai. Selain itu, anak-anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi terkena berbagai penyakit, baik yang bersifat menular maupun tidak menular, ketika mereka mencapai usia dewasa, seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menggarisbawahi pentingnya memberikan nutrisi yang cukup dan baik bagi anak-anak.

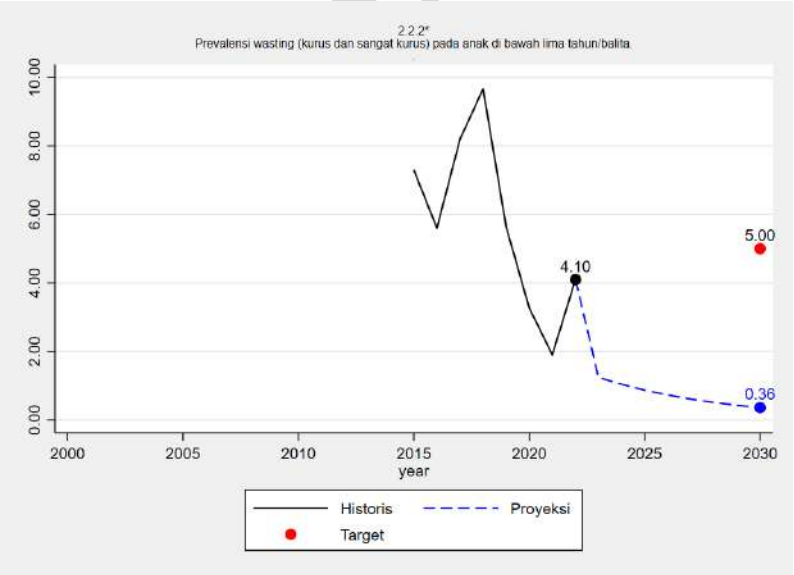
Gambar 4.18 menunjukkan tren data historis dari tahun 2015 hingga 2018 (36,69%) mengalami kenaikan, namun setelah tahun 2018 mengalami penurunan hingga tahun 2022 mencapai angka 27,3%. Proyeksi tahun 2030 menunjukkan tingkat sebesar 19,72%, sementara target yang ditetapkan oleh United Nation dan World Health Organization (WHO) adalah sebesar 17,76%, sehingga prevalensi *stunting* di Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai *scorecard* C.

bappelitbangda



Gambar 4-18 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (0-59 Bulan)

Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada anak-anak di bawah usia lima tahun (0-59 bulan) di Kabupaten Bandung Barat mencapai nilai A, dengan sumber data yang berasal dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Provinsi Jawa Barat dan Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan (KEMENKES). Trend data historis dari tahun 2015 hingga tahun 2022 menunjukkan kecenderungan menurun (lihat Gambar 4.19). Proyeksi hingga tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 0,36% melampaui target kuantitatif (di bawah 5%) yang ditetapkan oleh United Nations dan World Health Organization (WHO).



Gambar 4-19 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita (0-59 Bulan)

baca litbangda

4.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia merupakan Tujuan 3 SDGs. terdapat 7 indikator terpilih dari data Kabupaten Bandung Barat, dengan 2 indikator yang dianalisis berdasarkan sub indikator tertentu (3.1.2* dan 3.8.2*) sehingga terdapat 9 indikator pada Tabel 4.3. Proyeksi hasil indikator menunjukkan kinerja yang memuaskan, meskipun ada dua indikator yang bernilai D diantaranya proporsi perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi modern dan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau.

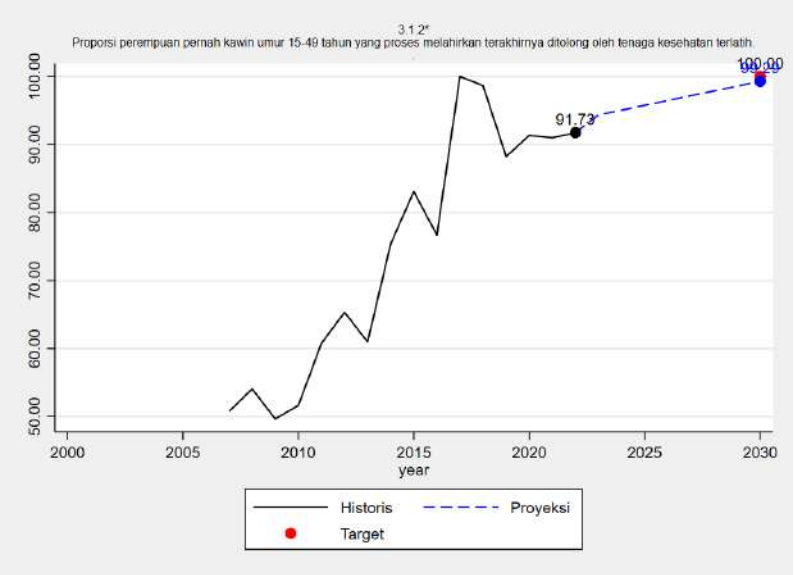
Tabel 4-3 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 3

KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	83,06	91.73	99.29	100	A
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan	78,40	82.9	100	100	A
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	0,003[e]	0,001[d]	0	0	A
3.7.1*	Proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern	56.29	45.84[f]	40.11	64.55	D
3.8.1.(a)	Proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan	2.61	11,89	17.13	0	C
3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih Besar 10%)	1,8[c]	1.15[f]	2.12	0	A
3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih Besar 25%)	0,23[c]	0.11[f]	0.44	0	A
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	59,8[e]	71.76[g]	97.11	100	B
3.A.1*	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau	36,63	35.25	42.29	0	D

Catatan: [a] Hasil analisis proyeksi. [b] Data tahun 2017. [c] Data tahun 2018. [d] Data tahun 2019. [e] Data tahun 2016. [f] Data tahun 2020. [g] Data tahun 2021.

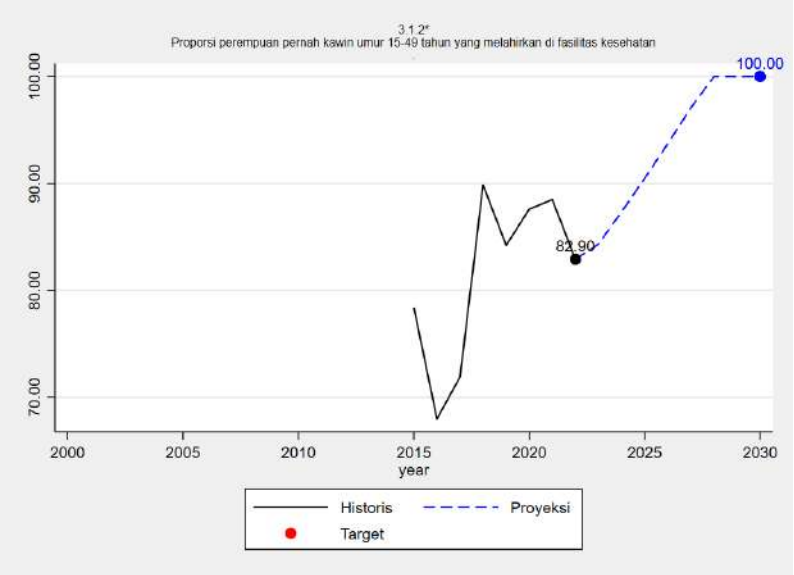
Target 3.1 menentukan bahwa pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

bappelitbangda



Gambar 4-20 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Grafik pada Gambar 4.20 menggambarkan pola data mengenai proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah menikah dan memiliki proses kelahiran terakhir yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Data ini menunjukkan fluktuasi dengan tren positif. Pada tahun 2019, indikator ini telah mencapai target 100% yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), tetapi mengalami penurunan menjadi 97,01% pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan kembali hingga tahun 2022. Proyeksi menunjukkan bahwa proporsi perempuan dalam kelompok usia 15-49 tahun yang melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih diperkirakan akan mencapai 99,29% pada tahun 2030, sehingga indikator ini memperoleh nilai A.

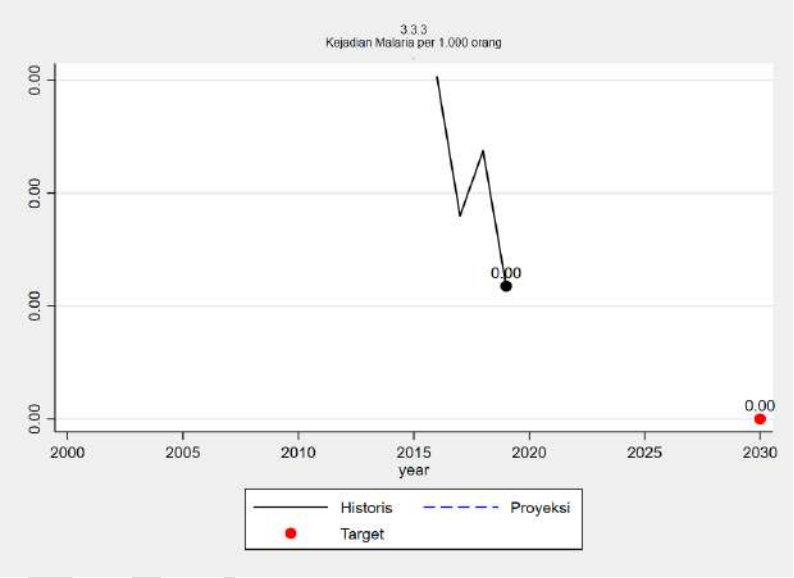


Gambar 4-21 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan

Begitu juga dengan indikator proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menikah dan melahirkan di fasilitas kesehatan juga menunjukkan pola data yang cenderung positif (lihat Gambar 4.21). Sama-sama menurun di tahun 2019, naik kembali hingga tahun 2021 namun tahun 2022 menurun hingga 82,90%. Hasil proyeksi pencapaian hingga tahun 2030 untuk Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa akan mencapai angka 100% (sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 2028. Penting untuk dicatat bahwa proses melahirkan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan rumah sakit memberikan indikasi tentang kualitas layanan kesehatan, karena bantuan dari fasilitas kesehatan dapat mengurangi risiko kematian ibu saat melahirkan.

Target 3.3 mengharapkan pada tahun 2030, Indonesia dapat mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

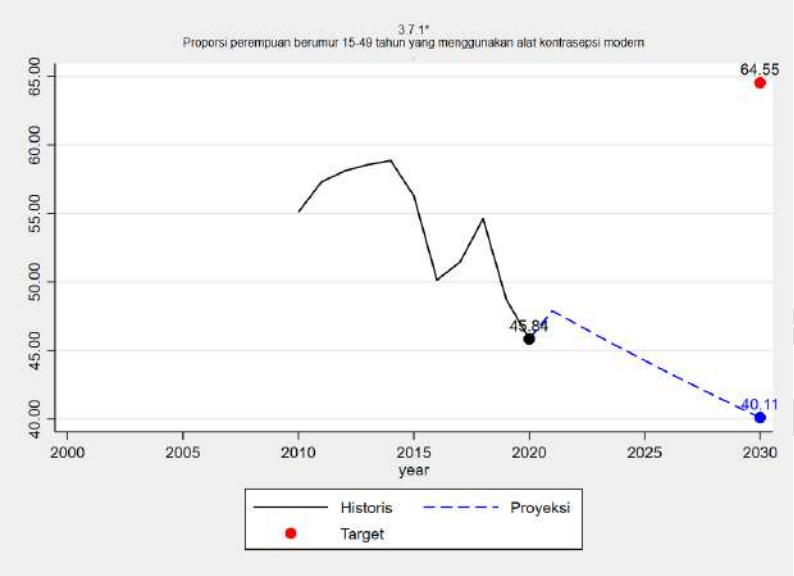
Indikator yang dianalisis dari target 3.3 adalah indicator 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang dengan data yang bersumber dari Profil Kesehatan Indonesia (Kemenkes).



Gambar 4-22 Kejadian malaria per 1000 orang

Data historis dimulai dari tahun 2016 hingga 2019 dan telah berkisar di angka 0% (0,0011%-0,003%), dapat dikatakan bahwa kejadian malaria per 1000 orang di Kabupaten Bandung Barat telah mencapai target yang ditetapkan oleh United Nations yaitu 0% dengan *scorecard* A.

Pada tahun 2030, mencapai akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, serta mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional menjadi target 3.7. Dalam konteks ini, indikator yang dipilih untuk Kabupaten Bandung Barat yang akan dibahas selanjutnya adalah proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern (3.7.1*).



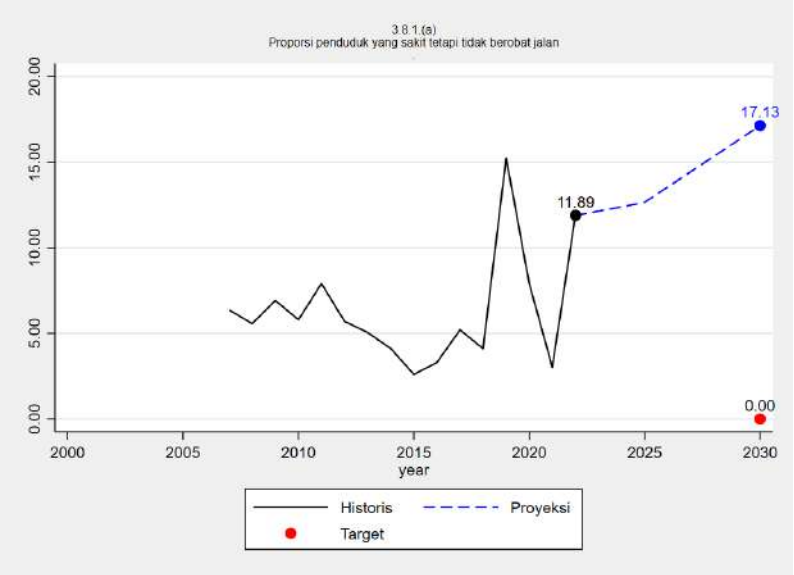
Gambar 4-23 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern

Tren data historis dari tahun 2010 hingga tahun 2020 mengenai proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan kecenderungan penurunan. Proyeksi hasil indikator tersebut pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 40,11%, yang jauh dari target kuantitatif yang ditetapkan dalam Roadmap SDGs Indonesia (lihat Gambar 4.23) yaitu 64,55%. Jika dibandingkan dengan target kuantitatif, hasil proyeksi ini memperoleh nilai *scorecard* D.

Upaya untuk mencapai kesehatan universal, yang mencakup perlindungan keuangan, akses kepada layanan kesehatan dasar yang berkualitas, serta ketersediaan obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan terjangkau bagi semua individu, merupakan target 3.8 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Indikator 3.8.1.(a) berbicara mengenai proporsi penduduk yang menderita penyakit tetapi tidak mencari perawatan medis secara konsisten mencerminkan situasi di mana sebagian penduduk yang mengalami sakit pada prinsipnya memerlukan pengobatan, namun memilih untuk tidak mencarinya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan finansial dalam membayar perawatan medis, biaya transportasi yang tinggi, kurangnya aksesibilitas transportasi, atau antrian panjang untuk mendapatkan pelayanan yang membuat mereka enggan mencari pengobatan.

bappelitbangda



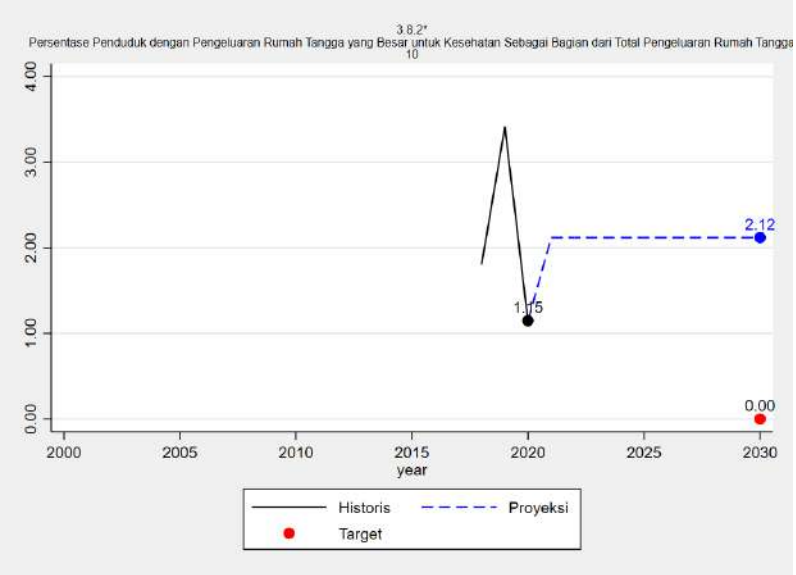
Gambar 4-24 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan

Berdasarkan grafik yang didasarkan pada data historis hingga 2022 (11,89%) mengenai proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak mencari perawatan medis secara konsisten, terlihat bahwa angkanya mengalami fluktuasi terutama tahun 2019-2022, namun ada kecenderungan peningkatan (lihat Gambar 4.24). Oleh karena itu, hasil proyeksi indikator ini pada tahun 2030 di Kabupaten Bandung Barat diperkirakan akan mencapai 17,13% (*scorecard* C). Jika dibandingkan dengan target kuantitatif yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) yaitu 0%, angka indikator ini cenderung meningkat, berlawanan dengan yang diharapkan untuk menurun.

Indikator 3.8.2* terbagi menjadi 2 subindikator berdasarkan pengeluaran lebih dari 10% dan 25% dengan hasil yang dapat dilihat pada grafik Gambar 4.25 dan 4.26.

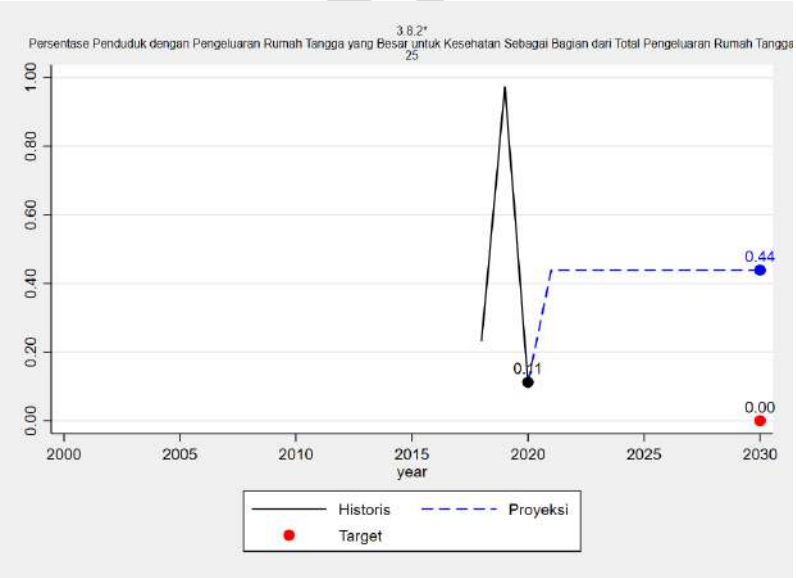
Indikator yang mengukur persentase penduduk yang mengalokasikan sebagian besar pengeluaran rumah tangga mereka untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga (lebih dari 10% dari total pengeluaran rumah tangga) memiliki data historis yang mencakup tiga tahun, yaitu 2018, 2019, dan 2020 (Gambar 4.25). Persentase ini mengalami peningkatan pada tahun 2019, namun kembali menurun pada tahun 2020 hingga mencapai 1,15%. Proyeksi pencapaian pada tahun 2030 merupakan rata-rata pencapaian dari data ketiga tahun tersebut, yaitu 2,12%. Jika dibandingkan dengan target kuantitatif yang ditetapkan oleh tim penyusun, yaitu 0%, Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai *scorecard* A.

bappelitbangda



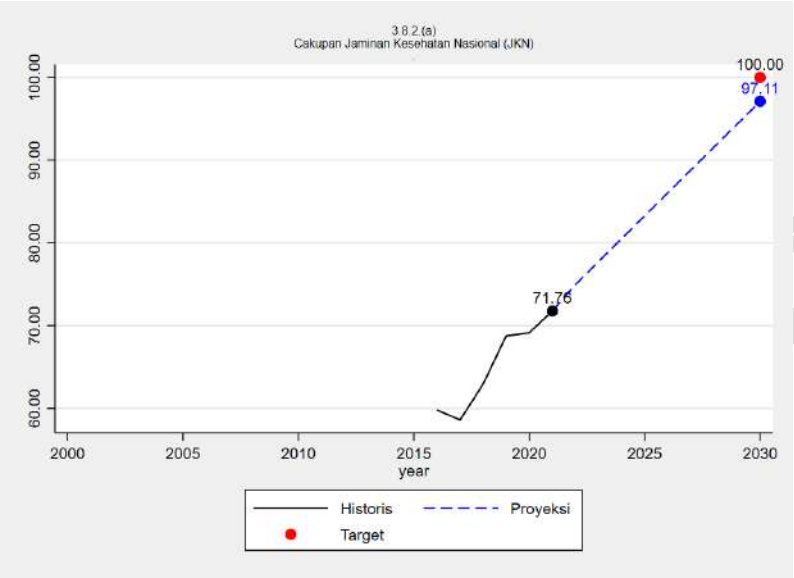
Gambar 4-25 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase penduduk dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga (Lebih dari 10% total pengeluaran rumah tangga)

Hal yang sama berlaku untuk persentase penduduk yang mengalokasikan sebagian besar pengeluaran rumah tangga mereka untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga (lebih dari 25% dari total pengeluaran rumah tangga). Indikator ini memperoleh nilai A karena proyeksi pencapaian pada tahun 2030 hampir mencapai target 0% yang ditetapkan oleh tim penyusun, yaitu sekitar 0,44% (lihat Gambar 4.26) yang merupakan rata-rata pencapaian dari data historis karena data berfluktuasi.



Gambar 4-26 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase penduduk dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga (Lebih dari 25% total Pengeluaran Rumah Tangga)

Data Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 baru mencapai 71,76% dengan tren data historis selama 6 tahun meningkat secara cukup signifikan (2016-2021). Hasil proyeksi tahun 2030 menunjukkan 97,11% penduduk Kabupaten Bandung Barat akan termasuk dalam cakupan jaminan kesehatan nasional dengan nilai B jika dibandingkan target 100% yang ditetapkan oleh United Nations (Gambar 4.27).

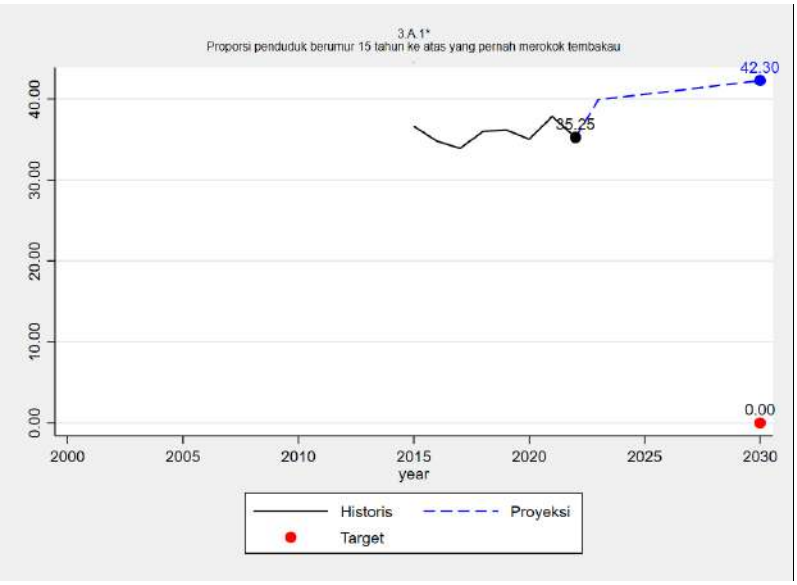


Gambar 4-27 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)

Target 3.a TPB/SDGs berusaha memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. Persentase jumlah perokok yang berusia 15 tahun ke atas merupakan indikator proksi untuk memonitor pelaksanaan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) World Health Organization (WHO) di Indonesia. Ketika prevalensi penduduk yang merokok tinggi, maka dapat memberikan resiko terhadap kondisi kesehatan dari masyarakat.

Indikator lain yang mendapatkan *scorecard* D dalam pencapaian Tujuan 3 di Kabupaten Bandung Barat adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau. Berdasarkan data historis dari tahun 2015 (36,63%) hingga tahun 2022 (35,25%), tidak terlihat penurunan yang signifikan (lihat Gambar 4.28), bahkan cenderung meningkat. Proyeksi pencapaian pada tahun 2030 masih berada pada angka 42,3%, sedangkan target yang ditetapkan oleh OECD adalah 0%.

bappelitbangda



Gambar 4-28 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau

4.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) adalah memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dikenakan biaya, dengan mutu yang setara dan berkualitas, sehingga mencapai hasil pembelajaran yang relevan dan efektif. Dalam studi ini, terdapat 12 indikator terpilih, namun beberapa di antaranya dianalisis dengan mempertimbangkan sub-indikator tertentu (misalnya, 4.1.2* memiliki 3 sub-indikator, 4.4.1.(a) memiliki 2 sub-indikator, 4.5.1* memiliki 22 sub-indikator, dan 4.6.1.(b) memiliki 2 sub-indikator). Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 37 indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian Tujuan 4.

Scorecard untuk Tujuan 4 di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan hasil yang cukup positif, dengan 17 dari 37 indikator terpilih mencapai atau mendekati target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan diberi nilai A. 8 indikator lainnya yang mendekati target TPB/SDGs dengan mendapatkan nilai B, sementara 8 indikator masih berada pada tahap perempat jalan menuju pencapaian target TPB/SDGs, yang dihasilkan nilai C. Sebanyak 3 indikator lainnya masih berada jauh dari pencapaian target TPB/SDGs atau mendapatkan nilai D, dan terdapat 1 indikator yang sangat jauh dari mencapai target TPB/SDGs sehingga memerlukan perhatian khusus, diantaranya APM SMA antara kuintil terbawah dan teratas, rasio gender APK PT, rasio perdesaan dan perkotaan, rasio kuintil APM SMA dan rasio kuintil APM PT.

bappelitbangda

Tabel 4-4 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 4

KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	108.58	104.54[f]	106.27	100	A
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	93.18	90.99[f]	100.80	100	A
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	58.30	66.99[f]	142.61	100	A
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >=15 tahun.	7.81	8.71[d]	9.87	12	C
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat	88.91	96.09[f]	100.00	100	A
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/sederajat	33.33	61.82[f]	81.36	100	C
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/sederajat	66.94	84.26[f]	100.00	100	A
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	89.48	98.55[f]	100.00	100	A
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	32.38	30,63[d]	86.58	100	C
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	9.72	15.55	18.23	19.44	B
4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	35.03	93.59	100.00	100	A
4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	16.93	76.17	100.00	100	A
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	84.80	116.76	130.97	100	D

bappeda banga

KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	[h]	41.25	92.86	100	B
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	98.65	100.44	103.70	100	B
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	108.62	101.17	86.93	100	C
4.5.1*	Rasio APK-SD antara Pedesaan dan Perkotaan	[h]	99.07	98.63	100	A
4.5.1*	Rasio APK SD antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas	[h]	102.00	102.13	100	A
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	121.84	119.94	111.23	100	C
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	66.53	59.78	76.41	100	C
4.5.1*	Rasio APK-SMA antara Pedesaan dan Perkotaan	[h]	73.04	71.75	100	D
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	94.11	106.55	99.05	100	A
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	75.25	101.45	109.89	100	B
4.5.1*	Rasio APK-SMP antara Pedesaan dan Perkotaan	[h]	90.39	90.01	100	B
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	134.02	208.34[f]	107.27	100	B

bappeda banga

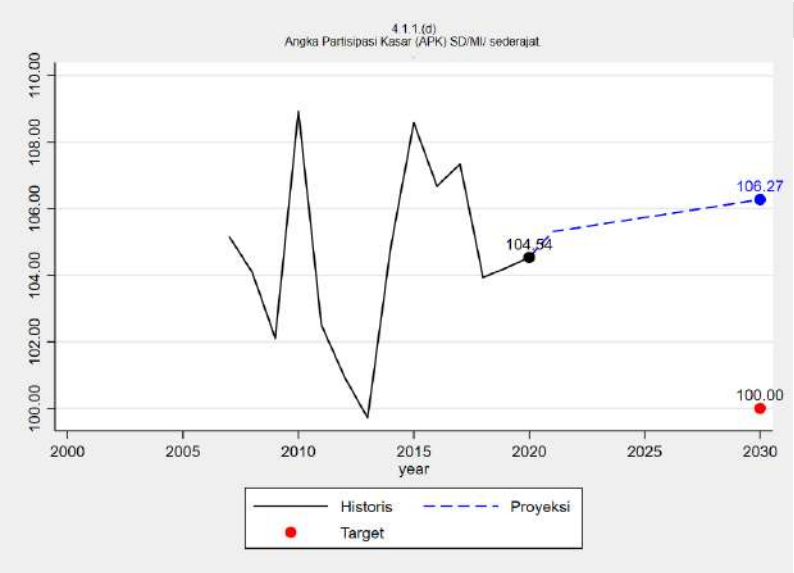
KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	[h]	43.48[f]	15.40	100	E
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	107.04	100.50	100.60	100	A
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	100.70	101.20	96.14	100	B
4.5.1*	Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan	[h]	99.00	98.58	100	A
4.5.1*	Rasio APM-SD antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas	[h]	102.14	102.26	100	A
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	94.41	119.23[f]	113.44	100	C
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	65.07	72.24[f]	52.88	100	D
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	97.50	104.67[f]	106.40	100	B
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	77.95	74.19[f]	80.12	100	C
4.6.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya	98.90	99.55	100.00	100	A
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk 15-59 tahun (%)	99.91	99.91[f]	100.00	100	A
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun (%)	100.00	100[f]	100.00	100	A

bappeda pangda

Catatan: [a] Hasil analisis proyeksi. [b] Data tahun 2017. [c] Data tahun 2018. [d] Data tahun 2019. [e] Data tahun 2016. [f] Data tahun 2020. [g] Data tahun 2021. [h] Tidak ada data pada tahun tersebut.

Target 4.1 TPB/SDGs menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Indikator yang dianalisis diantaranya angka partisipasi kasar (APK), rata-rata lama sekolah dan tingkat penyelesaian pendidikan.

APK merupakan sebuah metrik sederhana yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk pada berbagai kelompok usia terlibat dalam pendidikan pada berbagai tingkat sekolah. APK menggambarkan tingkat partisipasi penduduk pada tingkat pendidikan tertentu tanpa mempertimbangkan kesesuaian usia mereka. Dengan menghitung APK, kita dapat menentukan jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan pada tingkat tertentu, bahkan jika usia mereka belum memenuhi persyaratan atau bahkan jika mereka melebihi usia sekolah yang seharusnya.

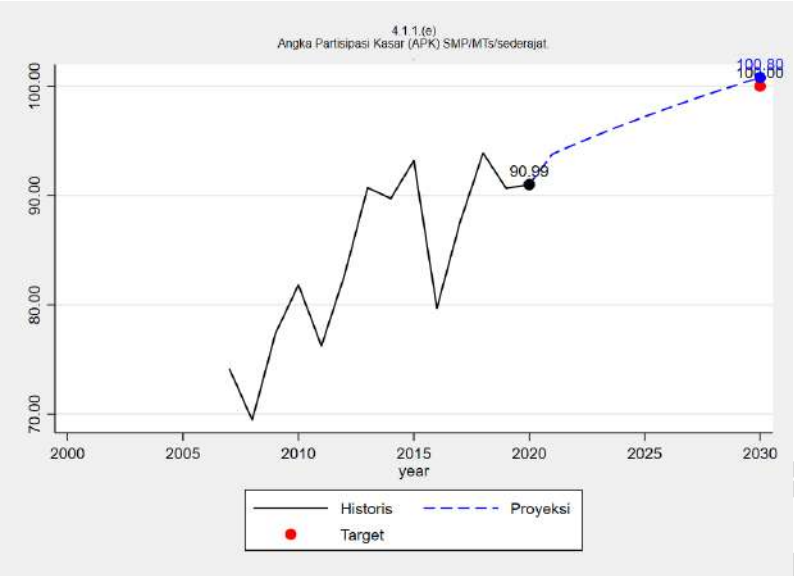


Gambar 4-29 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 APK SD/MI/ sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat di Kabupaten Bandung Barat memiliki data historis mulai dari tahun 2007 (105,16%) hingga 2020 (104,54%). Grafik yang menunjukkan data historis indikator ini mengalami fluktuasi dan cenderung agak meningkat (lihat Gambar 4.29). Berdasarkan proyeksi pencapaian pada tahun 2030, diperkirakan akan mencapai 106,27%. Proyeksi ini sudah melebihi target kuantitatif yang ditetapkan oleh United Nations, yaitu 100%. Oleh karena itu, Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai A dalam *scorecard*.

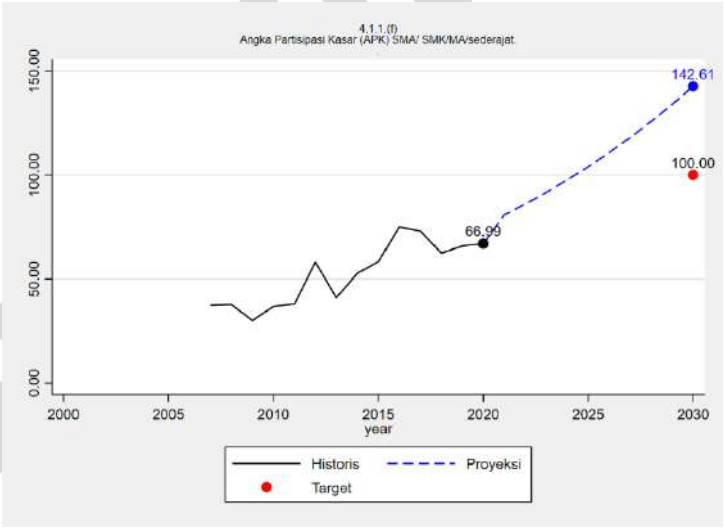
Sama halnya dengan indikator APK SMP/MTs/sederajat, tren data historis dari tahun 2007 (74,17%) hingga tahun 2020 (90,99%) menunjukkan kecenderungan peningkatan (lihat Gambar 4.30). Target yang telah ditetapkan oleh United Nations, yaitu mencapai 100%, diperkirakan akan tercapai pada tahun

2029 dengan tingkat pencapaian sekitar 100,13%. Oleh karena itu, Kabupaten Bandung Barat mendapatkan nilai A dalam *scorecard* untuk indikator ini.



Gambar 4-30 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 APK SMP/MTS/sederajat

Indikator APK SMA/MA/sederajat juga meraih nilai A dalam *scorecard* karena proyeksi pencapaian target 100% yang ditetapkan oleh United Nations diperkirakan akan tercapai mulai tahun 2025 (sekitar 103,96%). Data historis yang tersedia dari tahun 2007 hingga 2020 (66,99%) menunjukkan kecenderungan peningkatan, seperti yang terlihat dalam Gambar 4.31.

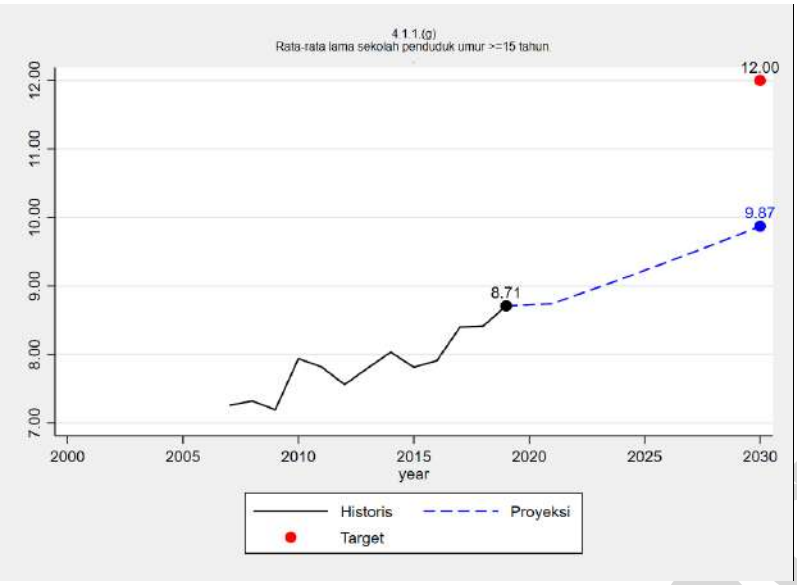


Gambar 4-31 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 APK SMA/SMK/Sederajat

Indikator rata-rata lama sekolah (RLS), yang mengukur total tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Dalam perhitungannya, lama sekolah dianggap sebagai 6 tahun

bapperidabangda

untuk pendidikan dasar (SD), 9 tahun untuk pendidikan menengah pertama (SMP), dan 12 tahun untuk pendidikan menengah atas (SMA), tanpa memperhitungkan apakah ada pengulangan kelas atau tidak.



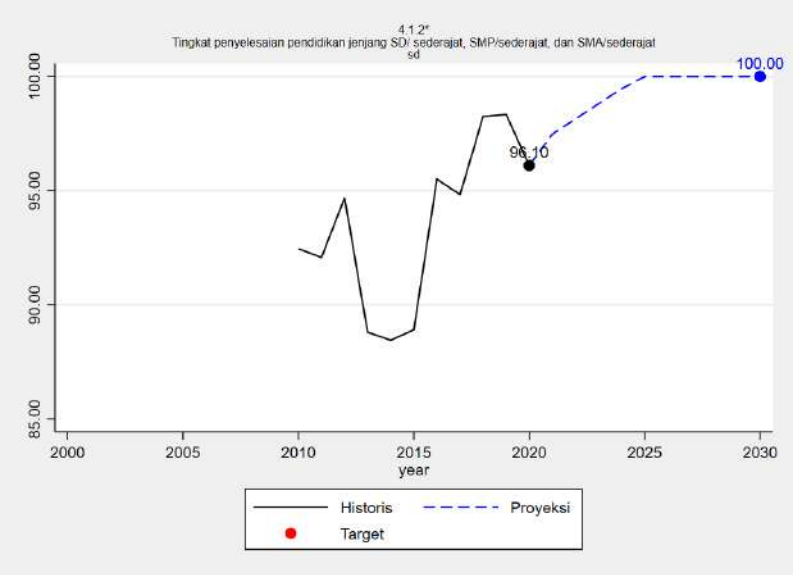
Gambar 4-32 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun keatas

Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat diperkirakan akan mencapai 9,87 tahun pada tahun 2030 (memperoleh *scorecard* C). Ini berarti rata-rata penduduk Kabupaten Bandung Barat hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP dan belum mencapai target yang ditetapkan oleh tim penyusun, yaitu 12 tahun. Data historis yang tersedia dari tahun 2007 (7,25) hingga tahun 2019 (8,71) menunjukkan kecenderungan peningkatan, sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.32.

Tingkat penyelesaian pendidikan adalah salah satu indikator untuk mengukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin banyak penduduk yang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, menandakan peningkatan kualitas SDM mereka.

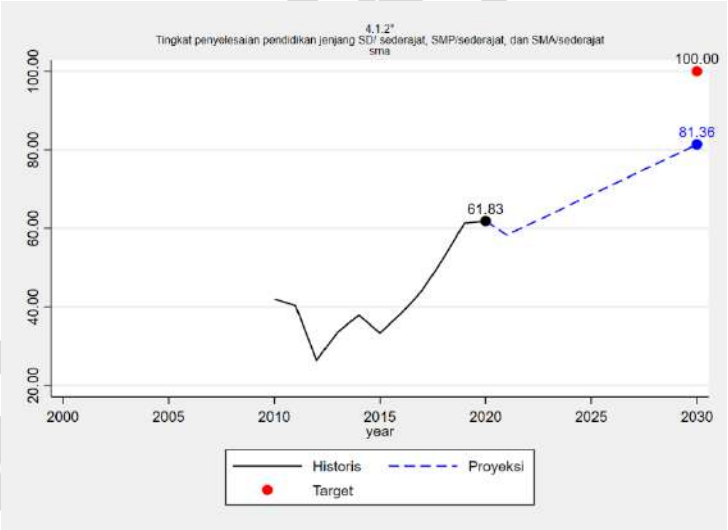
Data historis mengenai tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/Sederajat dari tahun 2010 hingga 2020 (lihat Gambar 4.33) menunjukkan variasi yang fluktuatif dalam tren, namun secara keseluruhan mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2013-2015 dan tahun 2020 (96,10%). Menurut United Nations, target pencapaian adalah 100%, dan perkiraan mencapainya pada tahun 2025. Oleh karena itu, indikator ini memperoleh nilai A karena proyeksinya sesuai dengan target TPB/SDGs.

bappelitbangda



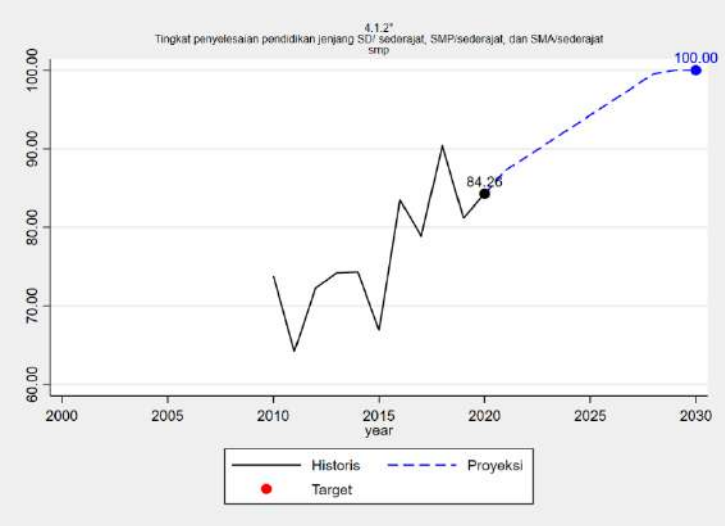
Gambar 4-33 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/Sederajat

Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/sederajat, dalam perbandingan, meraih nilai C karena proyeksinya pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 81,36% dari target 100% (sebagaimana tercantum dalam Metadata TPB/SDGs Indonesia Edisi II yang ditentukan oleh United Nations). Data historis yang tersedia dari tahun 2010 hingga tahun 2020 (61,83%) menunjukkan peningkatan namun masih belum mencukupi untuk mencapai target yang seharusnya (lihat Gambar 4.34).



Gambar 4-34 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/Sederajat

baritbangda



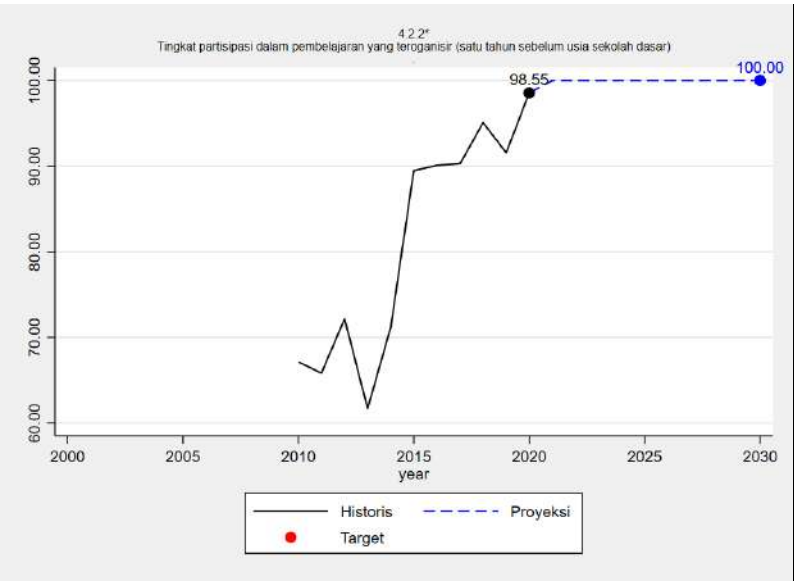
Gambar 4-35 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/Sederajat

Seperti halnya dengan tingkat kelulusan sekolah dasar/sederajat, penyelesaian pendidikan menengah pertama (SMP/sederajat) di Kabupaten Bandung Barat juga meraih skor A, dengan proyeksi pencapaian pada tahun 2030 mencapai 100%, sesuai dengan target kuantitatif yang ditentukan United Nations. Data historis dari tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan tren peningkatan yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut (lihat Gambar 4.35).

Target 4.2 menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Indikator yang dianalisis pada kajian ini adalah tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) dan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD).

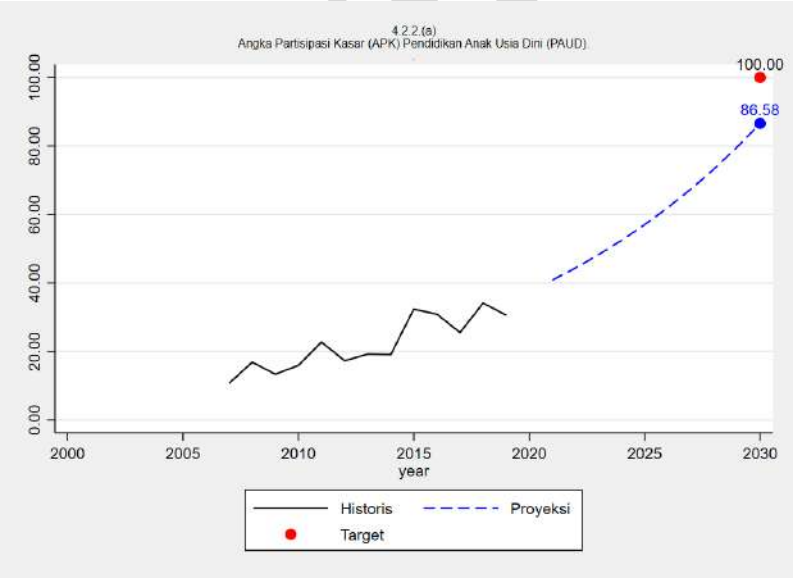
Data historis tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir dari tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan pola fluktuatif dengan tren peningkatan yang cukup signifikan (lihat Gambar 4.36). Pada tahun 2020, pencapaian mencapai 98,55%, mendekati target 2030 sebesar 100%. Saat data historis Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan hingga tahun 2030, diperoleh angka 100% sesuai dengan target yang ditentukan oleh United Nations, sehingga memperoleh nilai A.

bappelitbangda



Gambar 4-36 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Terorganisir

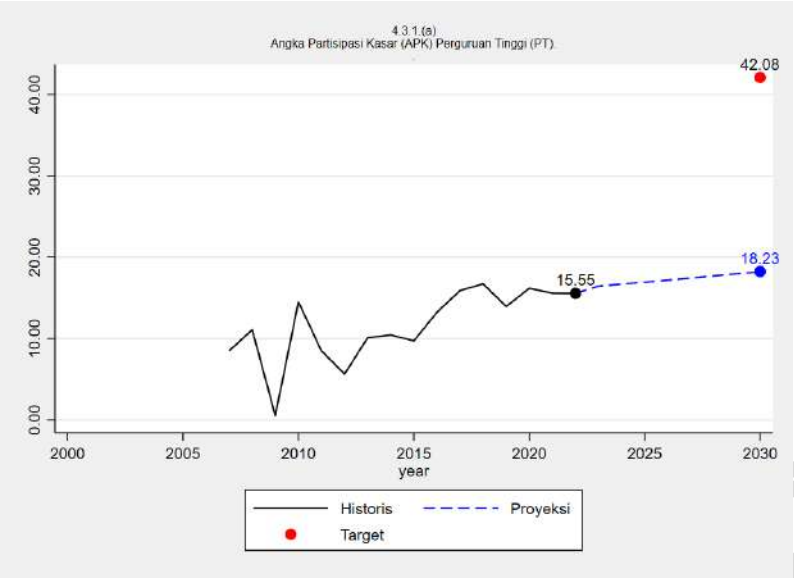
Gambar 4.37 menggambarkan data historis Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dari tahun 2007 hingga 2019. Data ini menunjukkan pola fluktuatif dengan tren peningkatan. Proyeksi pencapaian pada tahun 2030 memperlihatkan angka sebesar 86,58%. Meskipun terjadi peningkatan, angka tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu 100%. Oleh karena itu, penilaian yang diberikan adalah C.



Gambar 4-37 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menyediakan akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki ke pendidikan teknik, vokasional, dan tinggi, termasuk universitas yang terjangkau dan bermutu, merupakan fokus dari target 4.3. Dalam

analisis ini, aspek tersebut dievaluasi melalui penggunaan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) di perguruan tinggi (PT).



Gambar 4-38 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

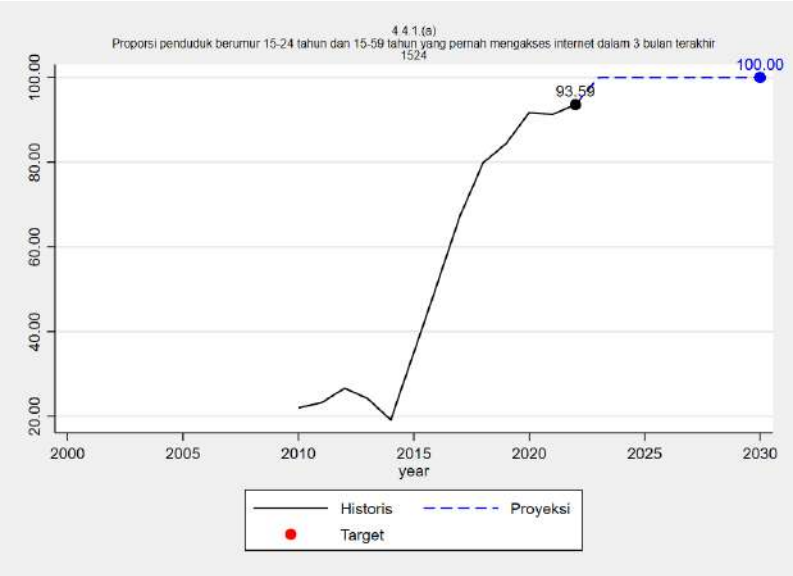
Gambar 4.38 memperlihatkan data historis untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi dari tahun 2007 hingga tahun 2022 (15,55%). Terdapat kecenderungan peningkatan dalam pola data historis tersebut, namun belum mencukupi untuk mencapai target pada tahun 2030. Proyeksi pada tahun 2030 menunjukkan angka sebesar 18,23%. Ketika hasil proyeksi dibandingkan dengan target kuantitatif yang telah ditetapkan oleh tim penyusun, yaitu 42,08% (dua kali lipat dari tahun 2015), APK PT Kabupaten Bandung Barat memperoleh penilaian D.

Berikutnya, target 4.4 yaitu peningkatan yang signifikan pada tahun 2030 terhadap jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang sesuai, termasuk keterampilan teknis dan vokasional, untuk pekerjaan yang layak dan pengembangan wirausaha. Indikator yang digunakan untuk mengukur hal ini adalah proporsi penduduk berusia 15-24 tahun dan 15-59 tahun yang pernah menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir.

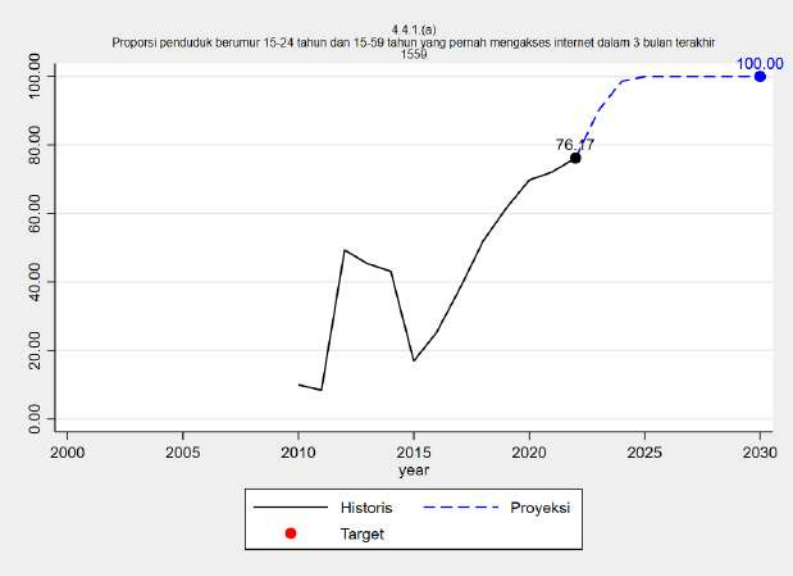
Data proporsi individu yang mengakses internet bermanfaat untuk menilai kemajuan pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi dan evolusi masyarakat digital. Secara keseluruhan, grafik data historis dari tahun 2010 hingga 2022 untuk indikator proporsi penduduk berusia 15-24 tahun dan 15-59 tahun yang menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir menunjukkan tren positif (lihat Gambar 4.39 dan Gambar 4.40). Pada tahun 2022 data untuk usia 15-59 tahun menunjukkan angka yang lebih rendah (76,17%) dibandingkan dengan usia 15-24 tahun yang mencapai 93,59%. Keduanya diproyeksikan mencapai target 100% pada tahun 2030 yang ditetapkan oleh tim penyusun. Oleh karena

bappelitbangda

itu, indikator proporsi penduduk yang menggunakan internet dalam tiga bulan terakhir mendapatkan penilaian A, baik untuk subindikator usia 15-24 tahun maupun usia 15-59 tahun.



Gambar 4-39 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir

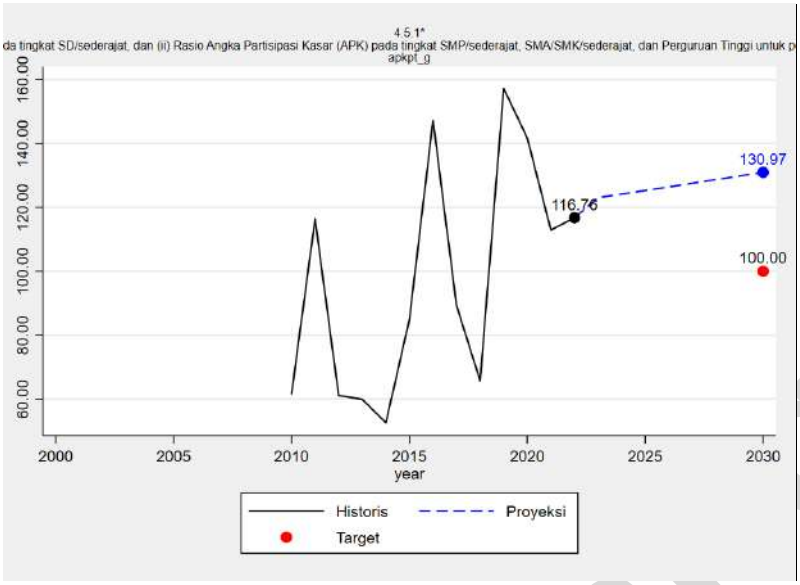


Gambar 4-40 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir

Target 4.5 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. Terdapat satu indikator (dengan 22 sub-indikator) yang dianalisis yaitu rasio angka partisipasi kasar (APK) dan murni (APM) pada tingkat SD, SMP, SMA/SMK, serta perguruan tinggi atau sederajat yang di disagregasi berdasarkan jenis

kelamin, kuintil terbawah/teratas, perdesaan terhadap perkotaan dan disabilitas.

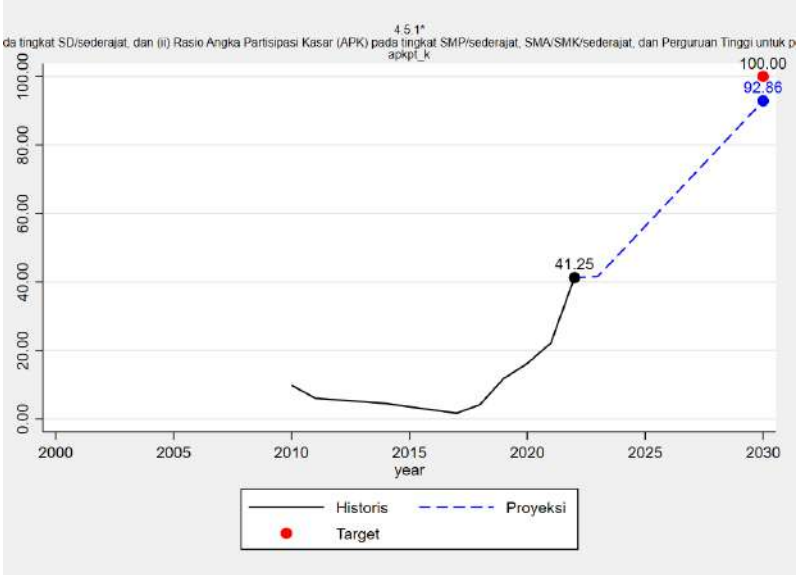
Analisis untuk indikator yang berupa rasio dinilai A apabila mendekati 100% (±3%), begitu juga dengan nilai B (100±10%), C (100±25%), D (100±50%), dan lainnya E.



Gambar 4-41 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi untuk perempuan dan laki-laki dapat diamati pada Gambar 4.41, dengan data dari tahun 2010 hingga 2022 yang mengalami fluktuasi, namun menunjukkan kecenderungan agak meningkat. Tahun 2022 mencapai 116,76% dan proyeksi untuk tahun 2030 adalah 130,97%. Oleh karena itu, penilaian APK perguruan tinggi untuk perempuan dan laki-laki di Kabupaten Bandung Barat adalah D karena masih terdapat ketidakseimbangan relatif antara partisipasi laki-laki dan perempuan.

bappelitbangda

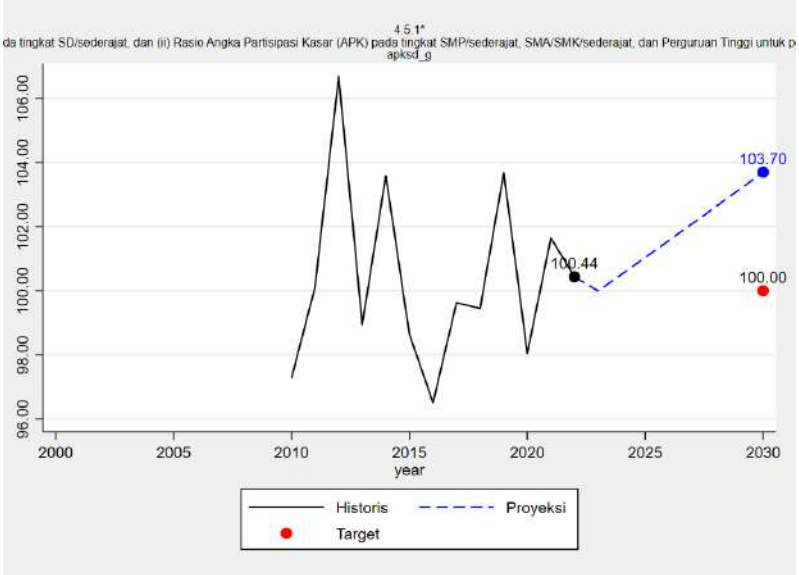


Gambar 4-42 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi yang didisagregasi berdasarkan kuintil teratas dan terbawah menunjukkan tren data historis yang naik secara signifikan (lihat Gambar 4.42). Data terkini pada tahun 2022 masih rendah yaitu 41,25%, sementara proyeksi untuk Kabupaten Bandung Barat mencapai 92,86%. Proyeksi ini cukup mendekati target yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu 100% sehingga memperoleh nilai B. Ketimpangan di perguruan tinggi antara kuintil terbawah dan teratas masih ada, dimana partisipasi kuintil teratas lebih tinggi sedikit dibandingkan kuintil terbawah.

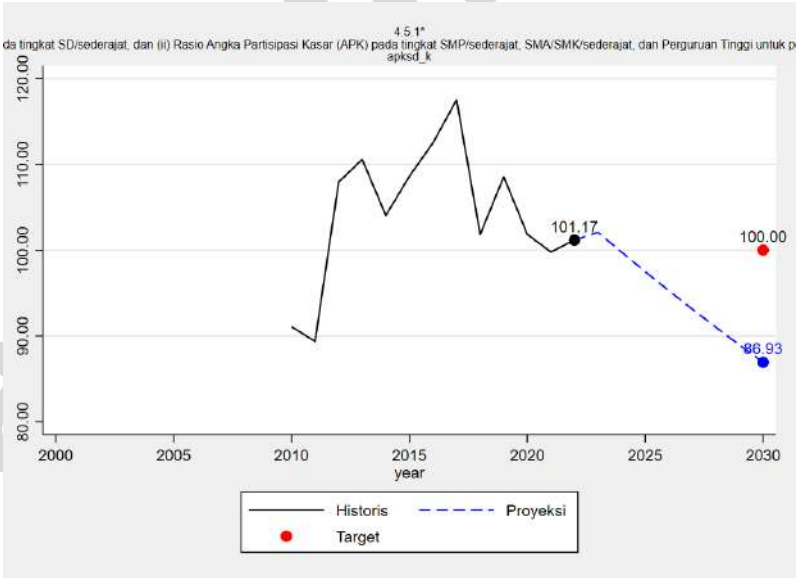
Data historis Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2010 hingga 2022 mengalami fluktuasi, namun selalu berada di atas 96%. Grafik data historis untuk indikator rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat antara perempuan dan laki-laki tergambar pada Gambar 4.43, dengan data terbaru pada tahun 2022 mencapai 100,44%. Proyeksi pencapaian dari indikator tersebut pada tahun 2030 melebihi target Perserikatan Bangsa-Bangsa (100%), yakni mencapai 103,70%, sehingga memperoleh penilaian B.

bappelitbangda



Gambar 4-43 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki

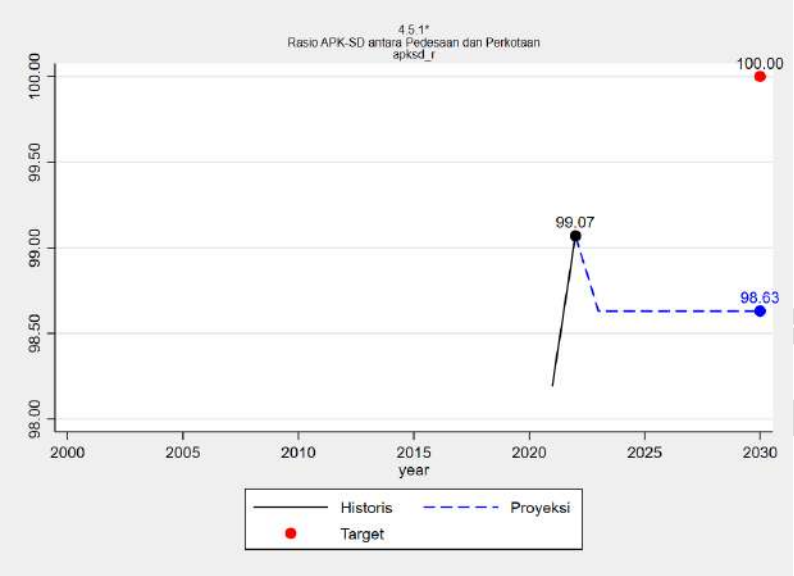
Gambar 4.44 memperlihatkan tren data historis dari tahun 2010 hingga 2022 (101,17%) untuk indikator rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat antara penduduk kuintil terbawah dan kuintil teratas menunjukkan nilai yang fluktuatif dan cenderung menurun. Berdasarkan analisis data historis tersebut, proyeksi pencapaian pada tahun 2030 diperkirakan menurun hingga 86,9% menjauhi target kuantitatif yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu 100%, sehingga mendapatkan penilaian C.



Gambar 4-44 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas

bankitbangda

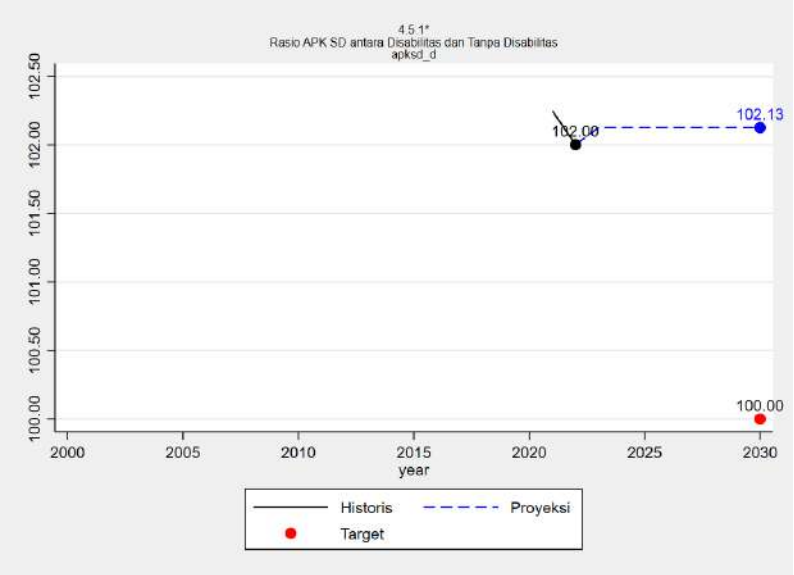
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat antara perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bandung Barat hanya memiliki dua data di tahun 2021 dan 2022 (99,07%), sehingga hasil proyeksi merupakan rata-rata pencapaian dari kedua tahun tersebut. Tahun 2030 APK SD antara perdesaan dan perkotaan adalah 98,63% (mendekati target 100%), sehingga memperoleh nilai A. Artinya, partisipasi anak sekolah dasar di pedesaan hampir setara dengan di perkotaan (Gambar 4.45).



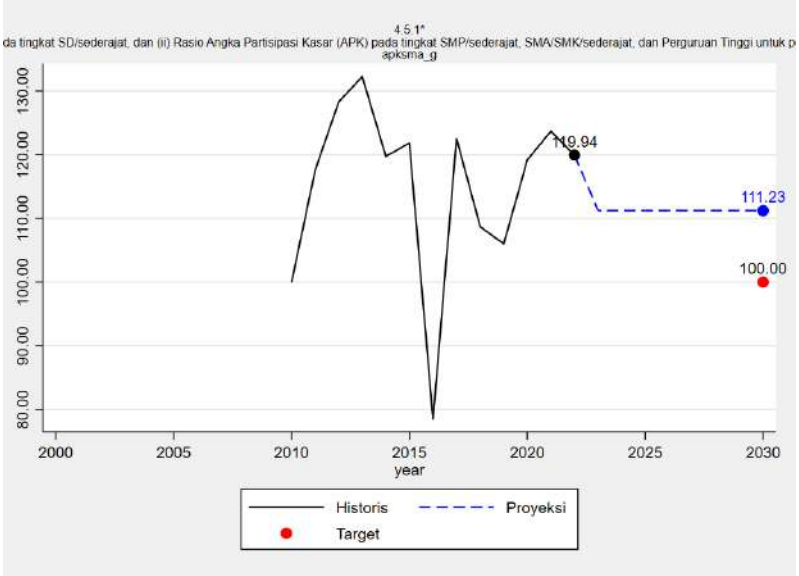
Gambar 4-45 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk perdesaan dan perkotaan

Begitu juga dengan rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat antara disabilitas dan non-disabilitas di Kabupaten Bandung Barat hanya mencakup dua data pada tahun 2021 dan 2022 (102%). Oleh karena itu, proyeksi pencapaian di tahun 2030 didasarkan pada rata-rata hasil dari kedua tahun tersebut. Pada tahun 2030, APK SD antara disabilitas dan non-disabilitas diproyeksikan mencapai 102,13%, mendekati target 100%, sehingga memperoleh penilaian A. Ini berarti bahwa partisipasi anak-anak sekolah dasar dengan disabilitas dan tanpa disabilitas hampir setara di Kabupaten Bandung Barat (lihat Gambar 4.46).

bappelitbangda



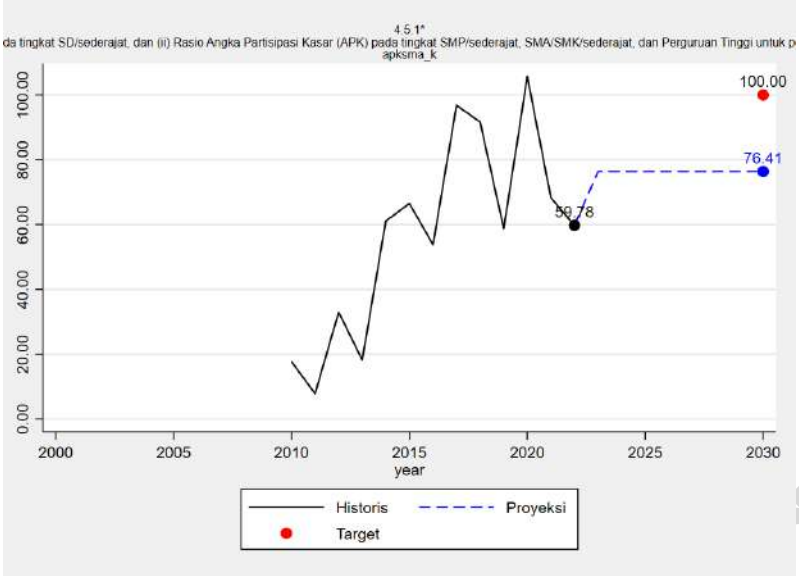
Gambar 4-46 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat antara disabilitas dan non-disabilitas



Gambar 4-47 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/Sederajat untuk perempuan/laki-laki

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/sederajat antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Bandung Barat dinilai C karena proyeksi pencapaian pada tahun 2030 mencapai 111,23%, melebihi target yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu 100%. Ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan pada tingkat SMA/sederajat di Kabupaten Bandung Barat masih lebih tinggi daripada partisipasi laki-laki. Tren data historis dari tahun 2010 hingga 2022 menunjukkan fluktuasi yang signifikan sehingga proyeksi pencapaian dilakukan dengan menghitung rata-rata pencapaian,

sebagaimana tergambar pada Gambar 4.47.

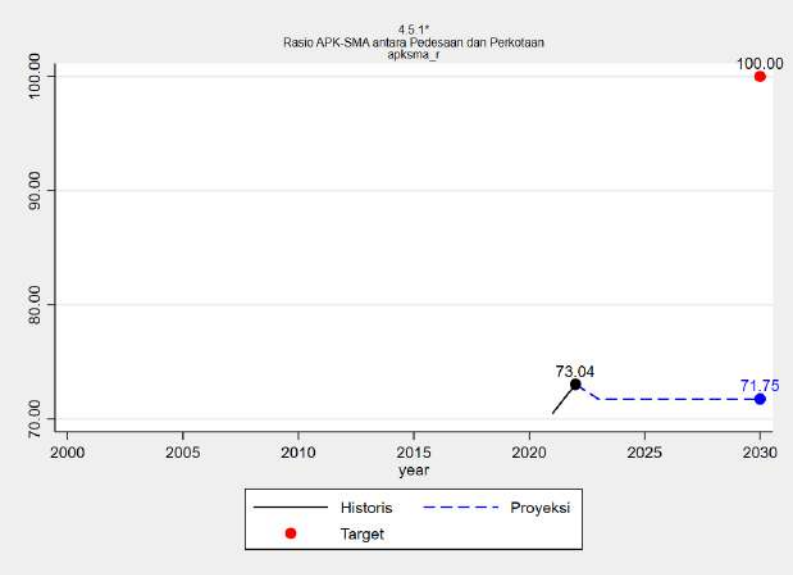


Gambar 4-48 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas

Gambar 4.48 memperlihatkan data historis Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA/sederajat antara kuintil terbawah dan kuintil teratas dari tahun 2010 hingga 2022 (59,78%). Angka sempat berada di atas 100% tahun 2020 (105,72%) namun kembali menurun di tahun 2021 (68,28%) dan 2022 (59,78%). Karena sangat berfluktuasi, maka proyeksi tahun 2030 dilakukan dengan menghitung reata-rata pencapaian dari tahun 2015 hingga 2022 dan menghasilkan angka proyeksi sebesar 76,41%. Proyeksi tersebut jauh target kuantitatif yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni 100%, sehingga perolehan nilai yang diberikan adalah C. Dengan kata lain, pada tahun 2030, Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan belum berhasil mengatasi ketimpangan dalam Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/Sederajat antara penduduk kuintil terbawah dan kuintil teratas.

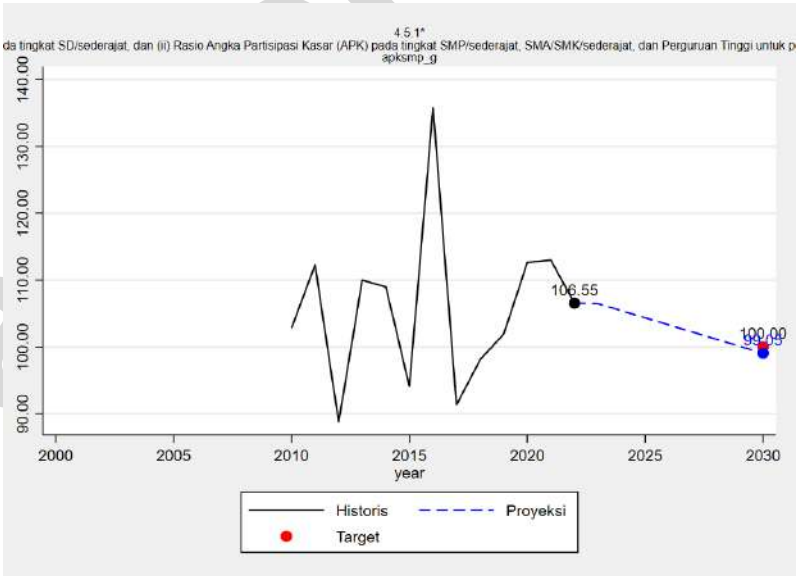
Untuk rasio APK SMA/sederajat antara pedesaan dan perkotaan memperoleh nilai D karena hasil proyeksi tahun 2030 menunjukkan angka 71,75% yang merupakan rata-rata dari dua tahun pencapaian yaitu 2021 (70,45%) dan 2022 (73,04%). Dapat dikatakan bahwa ketimpangan partisipasi anak SMA/sederajat antara pedesaan dan perkotaan masih cukup tinggi di Kabupaten Bandung Barat (Gambar 4.49).

bappelitbangda



Gambar 4-49 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/sederajat, antara pedesaan dan perkotaan

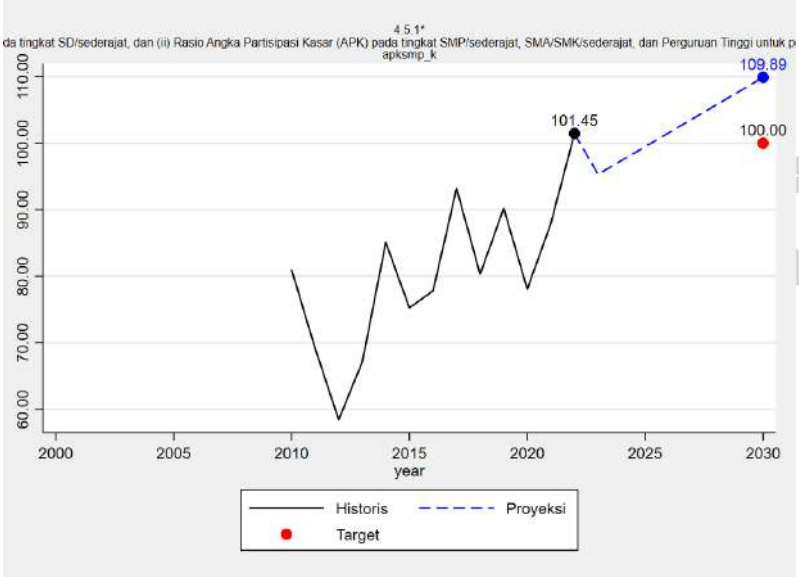
Gambar 4.50 memperlihatkan rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/sederajat antara perempuan dan laki-laki, dengan data historis yang menunjukkan fluktuasi angka dan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2022, rasio mencapai 106,55%, dan proyeksi untuk tahun 2030 mencapai angka 99,05%. Jika dibandingkan dengan target kuantitatif yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebesar 100%, nilai yang diperoleh adalah A. Pada tahun 2030, Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan telah menghilangkan ketimpangan dalam partisipasi sekolah tingkat SMP/Sederajat antara perempuan dan laki-laki.



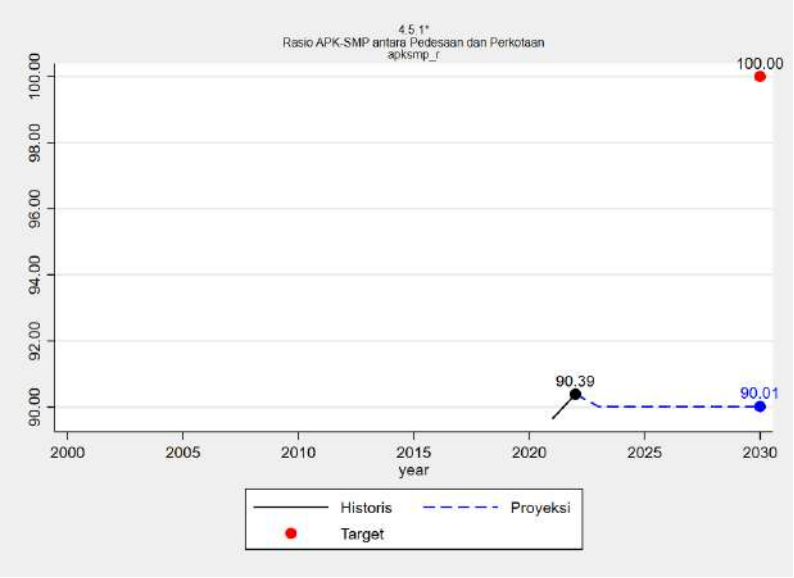
Gambar 4-50 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, untuk perempuan/ laki-laki

bappelitbangda

Tren yang serupa terlihat dalam pola data Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat SMP/Sederajat antara kuintil terendah dan tertinggi (lihat Gambar 4.51). Terdapat peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 dan 2022 (101,45%), proyeksi menunjukkan 109,89%. Ketika hasil proyeksi ini dibandingkan dengan target SDGs yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), yang sebesar 100%, indikator ini memperoleh nilai B. Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan masih mengalami ketidaksetaraan dalam Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat SMP/Sederajat antara penduduk yang berada di kuintil terendah dan tertinggi (dengan partisipasi lebih tinggi di kuintil tertinggi dibandingkan kuintil terendah).

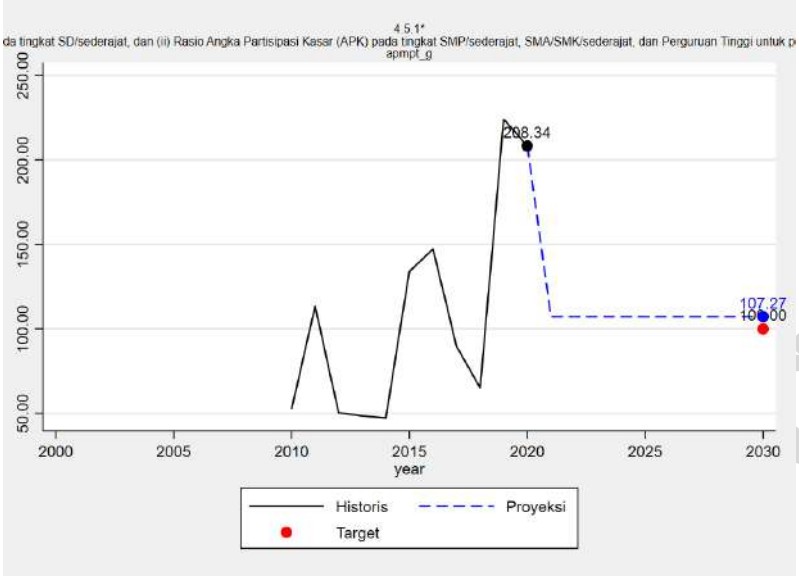


Gambar 4-51 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas



Gambar 4-52 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat antara pedesaan dan perkotaan

Data untuk rasio APK SMP antara pedesaan dan perkotaan hanya terdiri dari 2 tahun, tahun 2021 (89,64%) dan 2022 (90,39%), sehingga hasil proyeksi tahun 2030 merupakan rata-rata dari kedua data tersebut yaitu 90,01%. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, indikator ini memperoleh nilai B (Gambar 5.52).



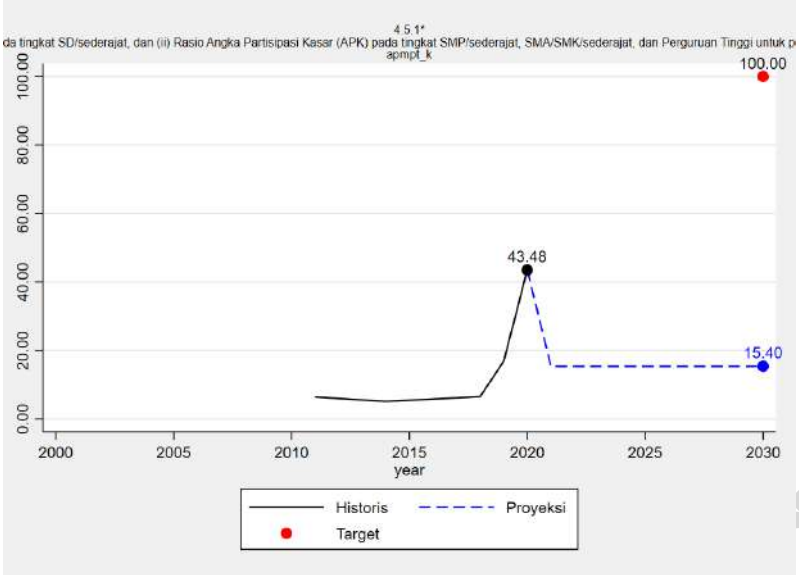
Gambar 4-53 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki

Gambar 4.53 mencerminkan tren data dari tahun 2010 hingga tahun 2020 (208,34%) untuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat Perguruan Tinggi, berfokus pada perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Grafik tersebut menggambarkan fluktuasi data, dengan hasil proyeksi yang menunjukkan pencapaian indikator tersebut pada tahun 2030 sebesar 107,27%. Angka proyeksi tersebut melebihi target kuantitatif yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebesar 100%. Oleh karena itu, Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai B. Dengan kata lain, pada tahun 2030, Kabupaten Bandung Barat diperkirakan hampir mengatasi ketidaksetaraan Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat Perguruan Tinggi antara perempuan dan laki-laki (dengan partisipasi perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki).

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat Perguruan Tinggi antara penduduk kuintil terendah dan tertinggi diukur menggunakan data historis dari tahun 2010 hingga tahun 2020 (43,48%). Hasil proyeksi dari data historis tersebut menunjukkan angka 15,40% (lihat Gambar 4.54). Angka ini jauh dari target yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga memperoleh penilaian E. Pada tahun 2030, Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan belum mampu mengatasi ketidaksetaraan Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat Perguruan Tinggi antara penduduk yang berada di kuintil terendah

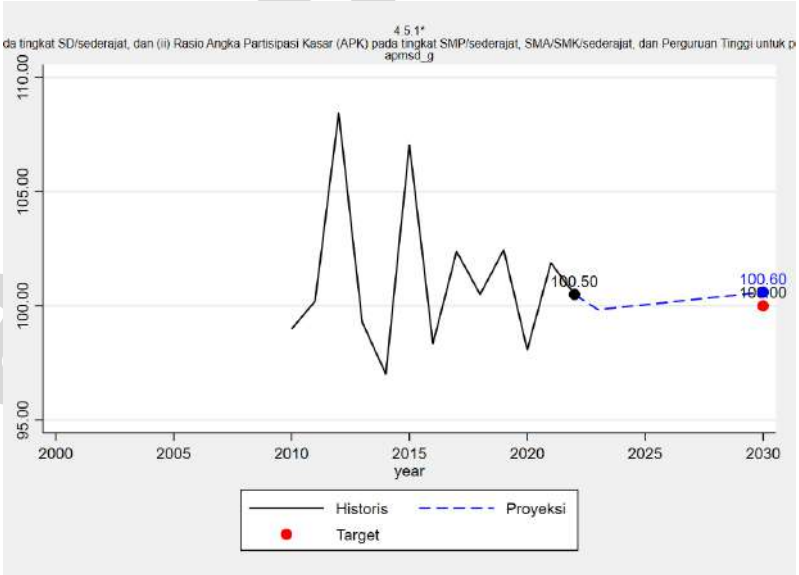
bappelitbangda

dan tertinggi, di mana partisipasi di kuintil tertinggi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kuintil terendah.



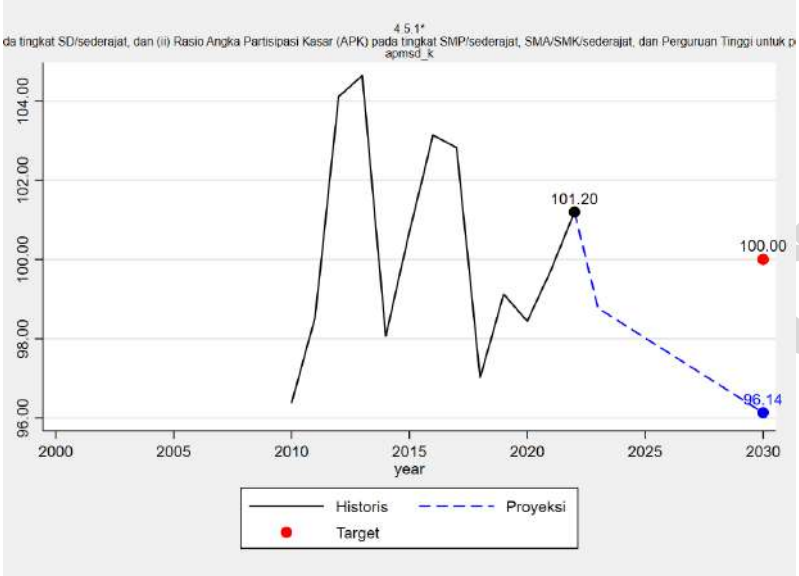
Gambar 4-54 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas

Data historis Rasio APM SD untuk perempuan/laki-laki ditunjukkan oleh Gambar 4.55 dengan tren yang sangat fluktuatif. Data terakhir (tahun 2022) mencapai 100,5% dan hasil proyeksi menunjukkan pencapaian tahun 2030 sebesar 100,6%. Hasil proyeksi ini mencapai target kuantitatif yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu 100%. Dengan demikian, Kabupaten Bandung Barat meraih nilai A, artinya tahun 2030 partisipasi murni jenjang SMP/sederajat di Kabupaten Bandung Barat sama antara perempuan dan laki-laki.

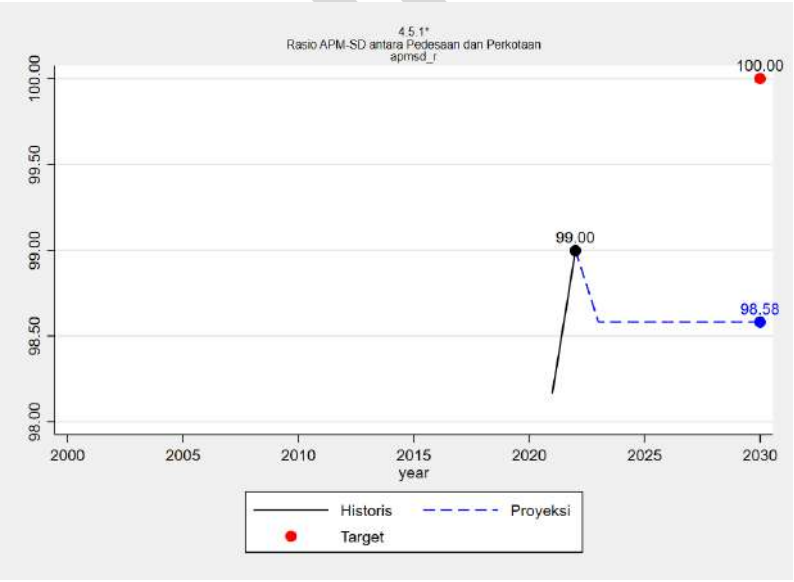


Gambar 4-55 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki

Berdasarkan gambar 4.56 terlihat bahwa data historis rasio APM SD antara kuintil terbawah dan teratas berfluktuasi dengan data terakhir berada pada angka 101,2% di tahun 2022. Hasil proyeksi menunjukkan penurunan sehingga tahun 2030 diproyeksikan mencapai 96,14%, artinya tahun 2030 Kabupaten Bandung Barat hampir dapat menyetarakan partisipasi murni kuintil terbawah dan teratas pada jenjang SD/sederajat, sehingga memperoleh nilai B.

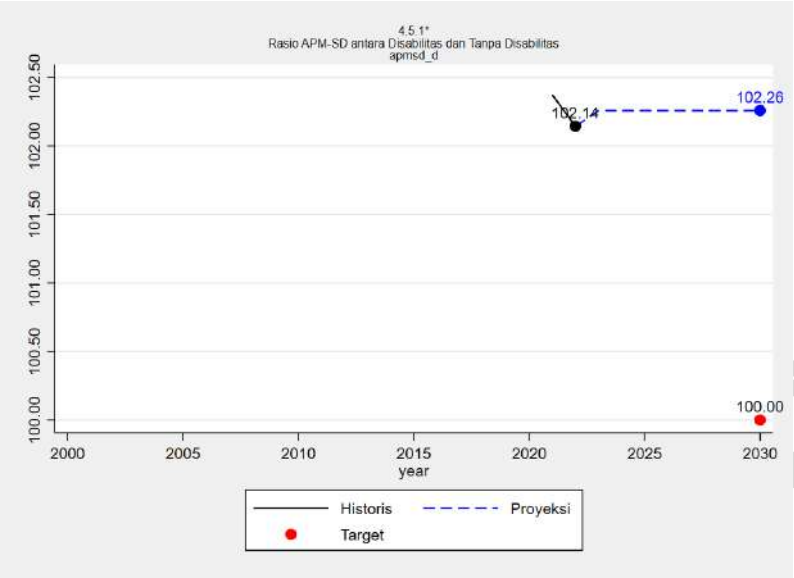


Gambar 4-56 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas



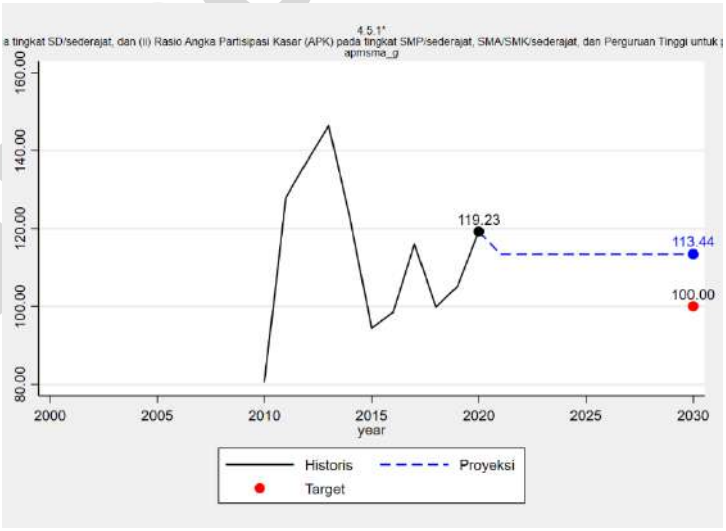
Gambar 4-57 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat antara pedesaan dan perkotaan

Hanya terdapat dua data untuk rasio APM SD/sederajat antara pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu tahun 2021 (98,16%) dan 2022 (99%) sehingga hasil proyeksi tahun 2030 merupakan rata-rata dari kedua data tersebut dengan pencapaian 98,58% sehingga memperoleh nilai A (Gambar 4.57).



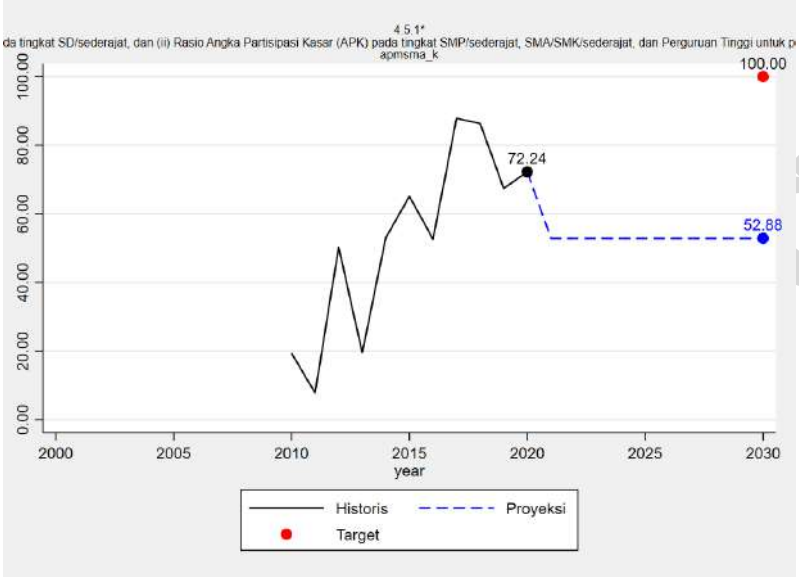
Gambar 4-58 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat antara disabilitas dan non-disabilitas

Begitu juga dengan rasio APM SD/sederajat antara disabilitas dan non-disabilitas yang hanya memiliki dua data, yaitu tahun 2021 (102,37%) dan 2022 (102,14%) sehingga hasil proyeksi tahun 2030 merupakan rata-rata dari kedua data tersebut dengan pencapaian 102,26% sehingga memperoleh nilai A juga (Gambar 4.58).



Gambar 4-59 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk perempuan/ laki-laki

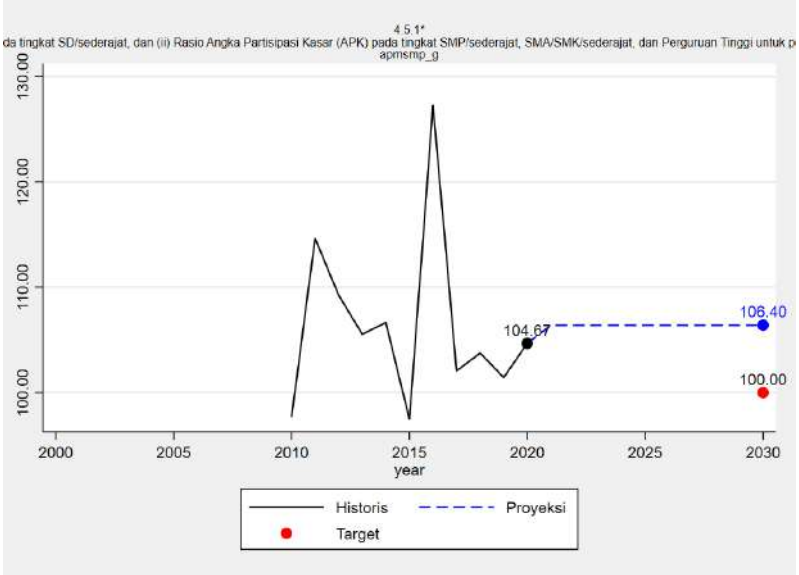
Data historis rasio APM SMA/sederajat untuk perempuan/laki-laki ditunjukkan pada gambar 4.59 dengan data terakhir tahun 2020 (119,23%). Data sejarah tersebut menunjukkan angka yang sangat fluktuatif, sehingga proyeksi tahun 2030 diperoleh dari rata-rata pencapaian yang sudah ada, dengan hasil 113,44%. Jika dibandingkan dengan target kuantitatif yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebesar 100%, maka perolehan nilai pada *scorecard* TPB/SDGs adalah C. Pada tahun 2030, Kabupaten Bandung Barat diperkirakan dapat mengurangi ketidaksetaraan Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat SMA/SMK/Sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 75%, dengan partisipasi laki-laki yang masih lebih tinggi.



Gambar 4-60 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas

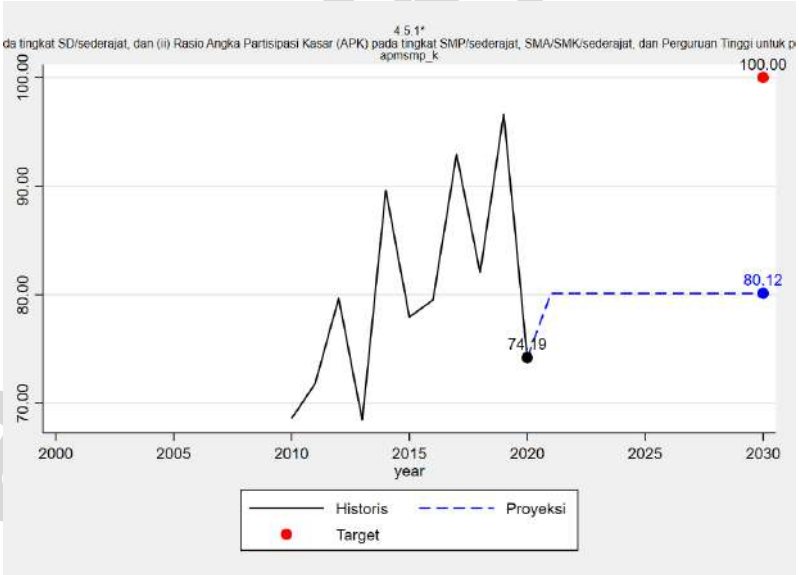
Gambar 4.60 menampilkan kecenderungan data historis Rasio APM SMA/SMK/Sederajat untuk kuintil terendah dan tertinggi dari tahun 2010 hingga tahun 2020 (72,24%). Grafik tersebut menggambarkan fluktuasi tren data, dengan hasil proyeksi menunjukkan kecenderungan mendatar (rata-rata dari angka pencapaian yang telah ada). Pada tahun 2030, rasio APM SMA/SMK/Sederajat di Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan mencapai 52,88%. Jika dibandingkan dengan target SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebesar 100%, maka perolehan nilai adalah D. Kesimpulannya, pada tahun 2030, Kabupaten Bandung Barat diperkirakan masih belum mampu mengatasi ketidaksetaraan Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat pendidikan SMA/SMK/Sederajat antara penduduk kuintil terendah dan tertinggi (dengan partisipasi kuintil tertinggi tetap lebih tinggi).

bappelitbangda



Gambar 4-61 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk perempuan/ laki-laki

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat SMP/sederajat diproyeksikan akan memperoleh nilai B karena hasil proyeksi tahun 2030 adalah 106,4% yang merupakan rata-rata dari pencapaian yang sudah ada karena datanya berfluktuasi. Pada data terakhir tahun 2020, Kabupaten Bandung Barat telah mencapai pencapaian sebesar 104,67% untuk APM SMP/sederajat, di mana partisipasi perempuan masih lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (Gambar 4.61).



Gambar 4-62 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas

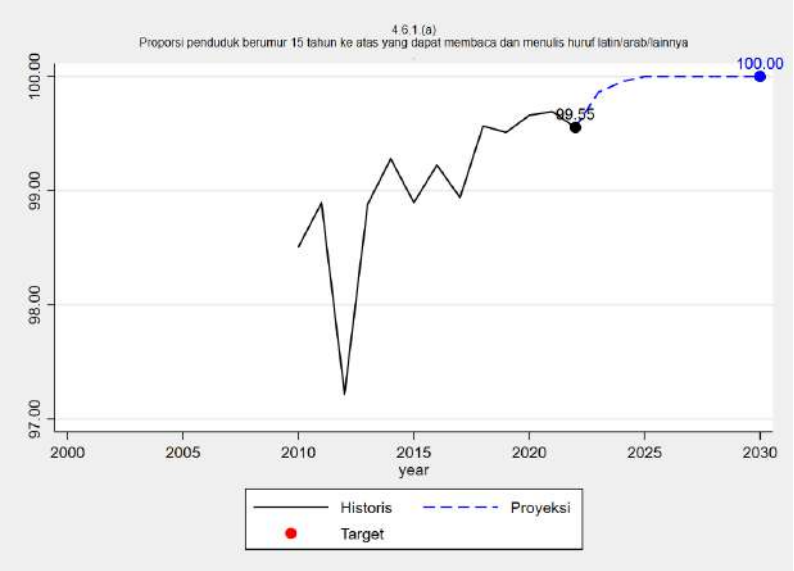
Indikator terakhir pada target 4.5 adalah rasio Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat SMP/sederajat yang tergambar dalam Gambar 4.62 dengan tren yang serupa, yaitu berfluktuasi dengan kecenderungan

bapperbangda

proyeksi mendatar karena merupakan hasil rata-rata dari angka pencapaian. Pada tahun 2020, angkanya mencapai 74,19%, sementara hasil proyeksi untuk tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 80,12%, proyeksi tersebut belum mencukupi target yang ditentukan (100%) sehingga nilai yang diperoleh adalah C. Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan masih belum mampu mengatasi ketidaksetaraan Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat pendidikan SMP/Sederajat antara penduduk kuintil terendah dan tertinggi (dengan partisipasi kuintil terendah lebih rendah dibandingkan kuintil tertinggi).

Target 4.6 menginginkan tahun 2030 dapat menjamin semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang dianalisis dengan indikator terpilih proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya dan indikator persentase angka melek aksara penduduk (15-24 tahun dan 15-59 tahun).

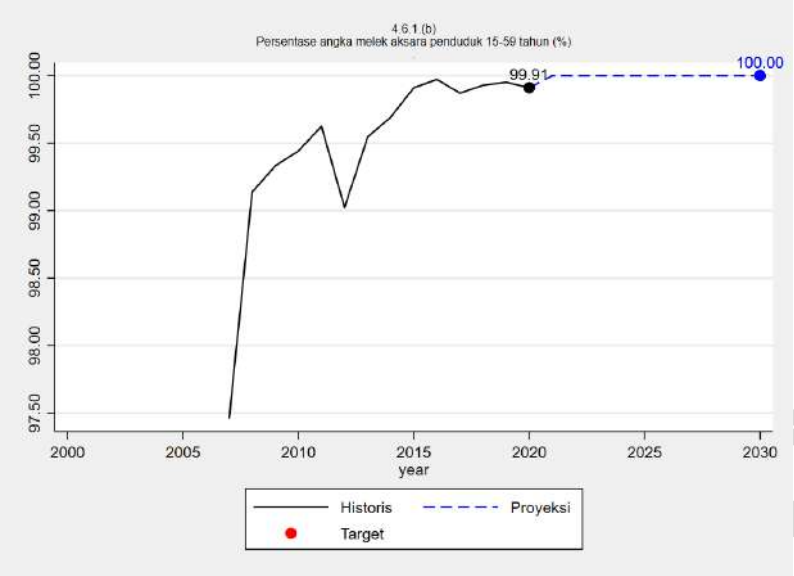
Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Pencapaian indikator persentase melek aksara di Kabupaten Bandung Barat sudah sangat baik (mencapai target yang ditentukan pada tahun 2030). Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 4.63, 4.64, dan 4.65.



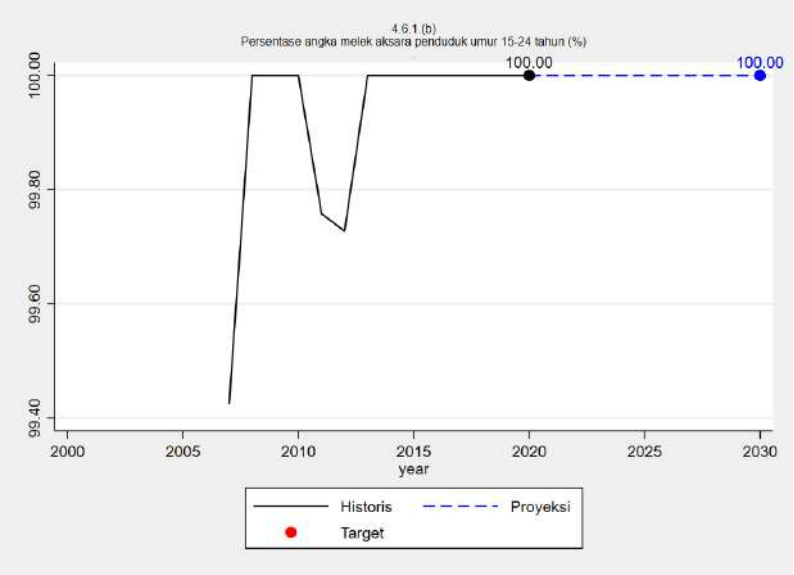
Gambar 4-63 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya

Gambar 4.63 menunjukkan data historis mengenai proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya dimulai sejak tahun 2010 hingga 2022 (99,55%) yang menunjukkan tren cenderung meningkat. Proyeksi pencapaian indikator ini pada tahun 2030 di Kabupaten Bandung Barat menyentuh target 100%, bahkan diperkirakan akan tercapai

sejak tahun 2023. Oleh karena itu, Kabupaten Bandung Barat meraih nilai A untuk indikator ini. Pada tahun 2030, diproyeksikan bahwa seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat akan memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya.



Gambar 4-64 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya



Gambar 4-65 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya

Untuk indikator 4.6.1(b) yang terbagi menjadi kelompok umur 15-59 tahun dan 15-24 tahun ditunjukkan dengan gambar 4.64 dan 4.65. Data historis dari tahun 2007 hingga 2020 menunjukkan pola peningkatan dan diproyeksikan mencapai target 100% pada tahun 2030. Kategori umur 15-24 tahun, target 100% sudah tercapai sejak tahun 2013, sementara untuk kelompok usia 15-59 tahun,

proyeksi mencapai target 100% pada tahun 2021, sehingga kedua indikator ini meraih nilai A. Pada tahun 2030, penduduk berusia 15-24 tahun dan 15-59 tahun di Kabupaten Bandung Barat diharapkan mampu membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan/atau huruf lainnya.

4.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, yang selanjutnya diharapkan dapat membantu dalam menciptakan pembangunan manusia yang merata. Target yang akan dianalisis pada kajian ini diantaranya adalah target 5.3, 5.5, dan 5.b dengan 3 indikator pilihan (indikator 5.3.1* dianalisis berdasarkan 2 kelompok umur) yang tercantum pada Tabel 4.5. Tujuan 5 memiliki 1 indikator yang sudah mendekati target yaitu proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun (A) dan sebelum berumur 18 tahun (B). Sedangkan, 2 indikator lainnya masih jauh dari target, terutama proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.

Tabel 4-5 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 5

KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun	2.18	1.14	1.89	0.00	A
5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun	22.37	18.29	9.77	0.00	B
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	9.28[b]	21.84[f]	18.52	50	E
5.b.1*	Proporsi penduduk yang menguasai/ memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	55.10	64.4	69.3	100	D

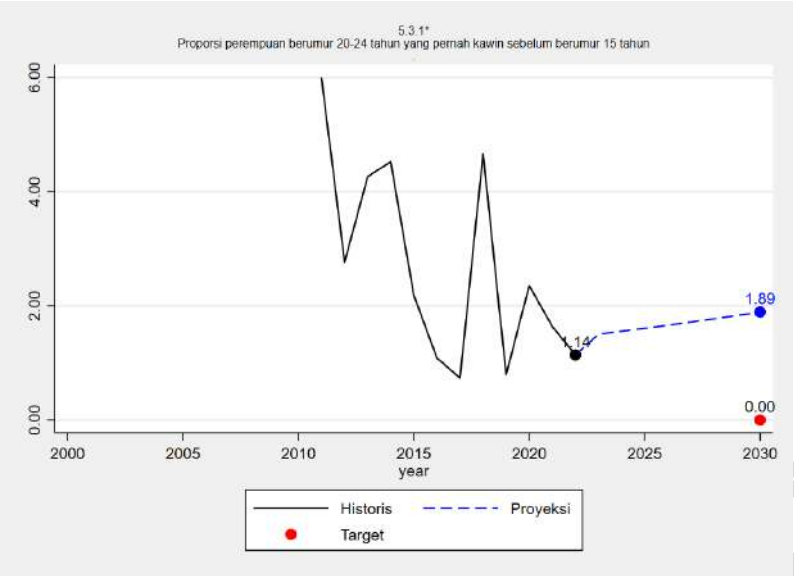
Catatan: [a] Hasil analisis proyeksi. [b] Data tahun 2017. [c] Data tahun 2018. [d] Data tahun 2019. [e] Data tahun 2016. [f] Data tahun 2020. [g] Data tahun 2021. [h] Tidak ada data pada tahun tersebut.

Target 5.3 berusaha menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Melalui target tersebut terdapat 1 indikator (2 sub indikator) yang hasil proyeksinya akan dijelaskan di bawah ini.

Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun memiliki data historis sampai tahun 2022 (1,14%) dengan tren yang berfluktuasi seperti pada gambar 4.66. Hasil proyeksi tahun 2030 mencapai 1,89% (lihat Gambar 4.58), angka ini mendekati target kuantitatif, yaitu 0%, yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga scorecard untuk indikator ini adalah

bappelitbangda

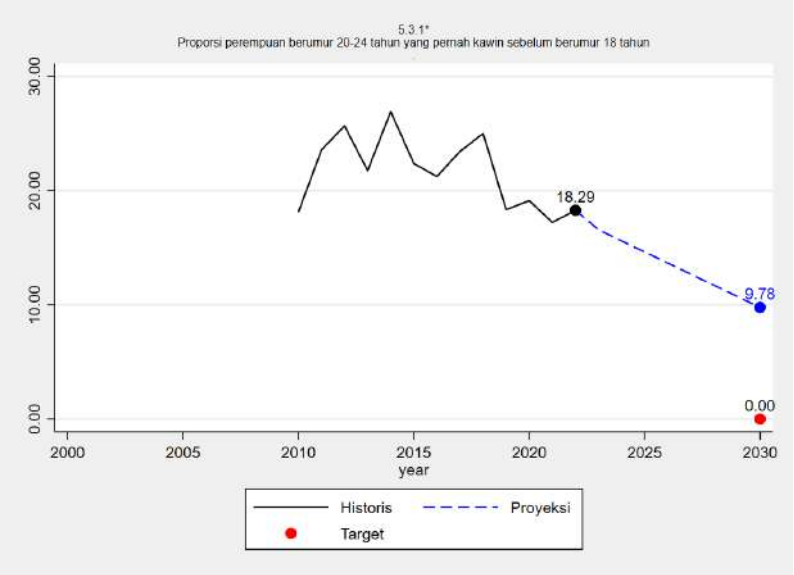
A. Kabupaten Bandung Barat hampir berhasil menghentikan perkawinan pada perempuan berusia 20-24 tahun sebelum mencapai usia 15 tahun.



Gambar 4-66 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun

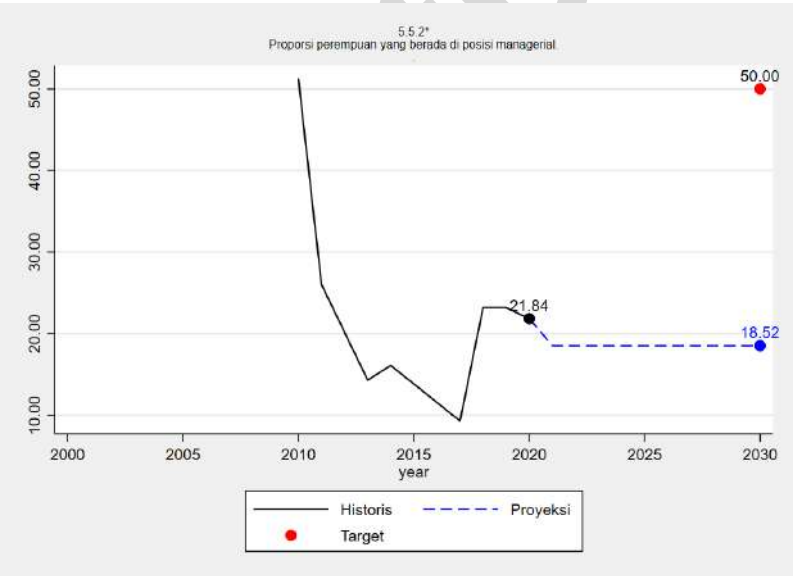
Sama halnya dengan proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun, terdapat data historis hingga tahun 2022 (18,29%) dengan pola yang cenderung menurun sepeprti yang dapat dilihat pada gambar 4.67. Dengan pola data yang menurun, menghasilkan proyeksi pencapaian tahun 2030 adalah 9,78%. Meskipun menurun, masih tidak cukup untuk mencapai target kuantitatif 0% yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga *scorecard* untuk indikator ini meraih nilai B. Kabupaten Bandung Barat masih belum berhasil menghentikan perkawinan pada perempuan berusia 20-24 tahun sebelum mencapai usia 18 tahun.

bappelitbangda



Gambar 4-67 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun

Target 5.5. berusaha untuk menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Penjelasan mengenai hasil proyeksi dari satu indikator terpilih pada target ini akan dijelaskan di bawah ini.



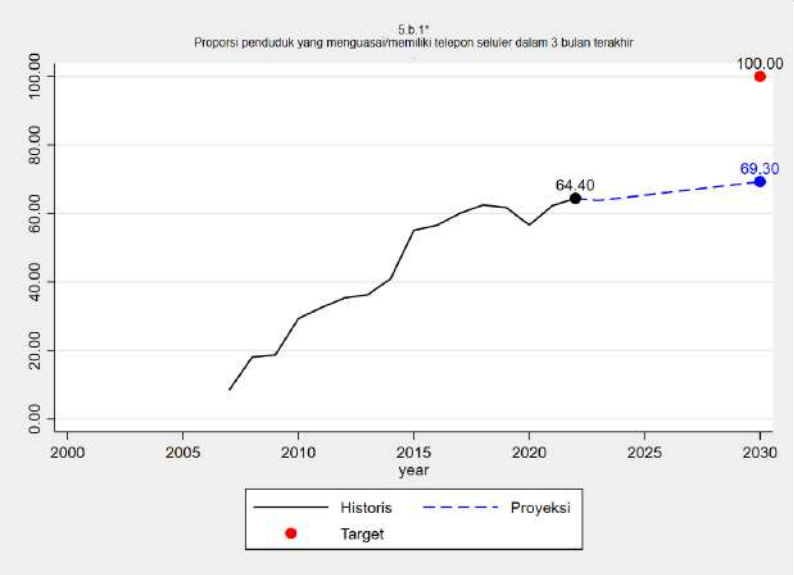
Gambar 4-68 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.68, data historis dari tahun 2007 hingga 2020 mengenai proporsi perempuan dalam posisi manajerial menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Meskipun mencapai puncak pada tahun 2018, angka tersebut kemudian mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 21,84% pada tahun 2020. Proyeksi pencapaian tahun 2030 merupakan rata-rata pencapaian

dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga diperkirakan akan mencapai 18,52% pada tahun 2030. Target kuantitatif yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) adalah sebesar 50%. Angka tersebut masih jauh dari target kuantitatif ILO sebesar 50%. Dalam perbandingan antara hasil proyeksi dan target kuantitatif, Kabupaten Bandung Barat mendapatkan nilai E. Posisi manajerial di kabupaten tersebut masih didominasi oleh laki-laki.

Target 5.b pada tahun 2030 yaitu meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Terdapat 1 indikator pada target 5.b yaitu proporsi penduduk yang memiliki atau menguasai telepon seluler dalam tiga bulan terakhir, dengan pola data historis cenderung meningkat seperti pada Gambar 4.69. Data terakhir tahun 2022 mencapai 64,40% namun karena pola kenaikan yang landai menghasilkan proyeksi pencapaian tahun 2030 sebesar 69,3% sehingga Kabupaten Bandung Barat mendapatkan nilai D untuk mencapai target 100%.



Gambar 4-69 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir

4.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua masyarakat merupakan Tujuan 6. Terdapat 4 indikator terpilih untuk Kabupaten Bandung Barat yang termasuk ke dalam 2 target TPB/SDGs yaitu target 6.1 dan 6.2. Dua indikator diantaranya diproyeksikan dapat mencapai target seperti persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap

layanan sumber air minum layak dan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, sedangkan 2 indikator lainnya masih sangat jauh dari target yaitu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman dan yang memiliki akses terhadap sanitasi layak.

Tabel 4-6 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 6

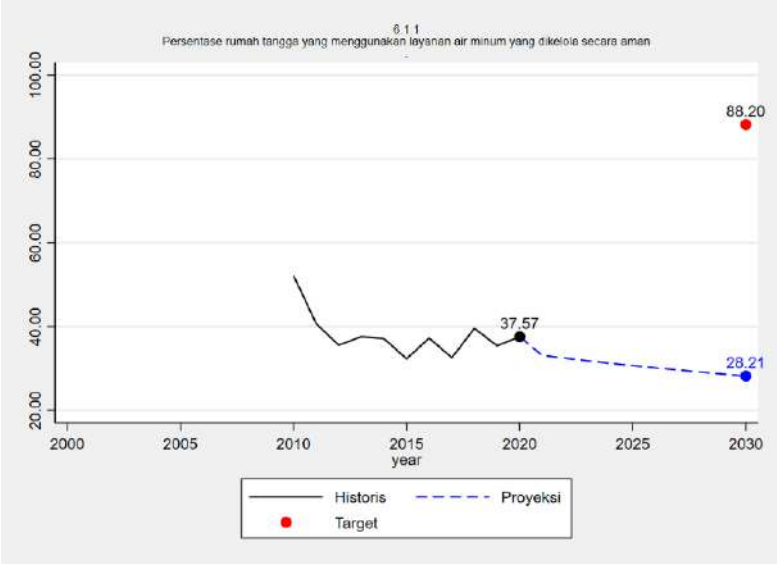
KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	32.28	37.57[f]	28.21	88.20	E
6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	51.70	86.6	100	100	A
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	48.55[b]	70.93	100	100	A
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	43.04	50.96	80.86	100	C

Catatan: [a] Hasil analisis proyeksi. [b] Data tahun 2017. [c] Data tahun 2018. [d] Data tahun 2019. [e] Data tahun 2016. [f] Data tahun 2020. [g] Data tahun 2021. [h] Tidak ada data pada tahun tersebut.

Target 6.1 menginginkan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil proyeksi empat indikator terpilih yang termasuk dalam target ini.

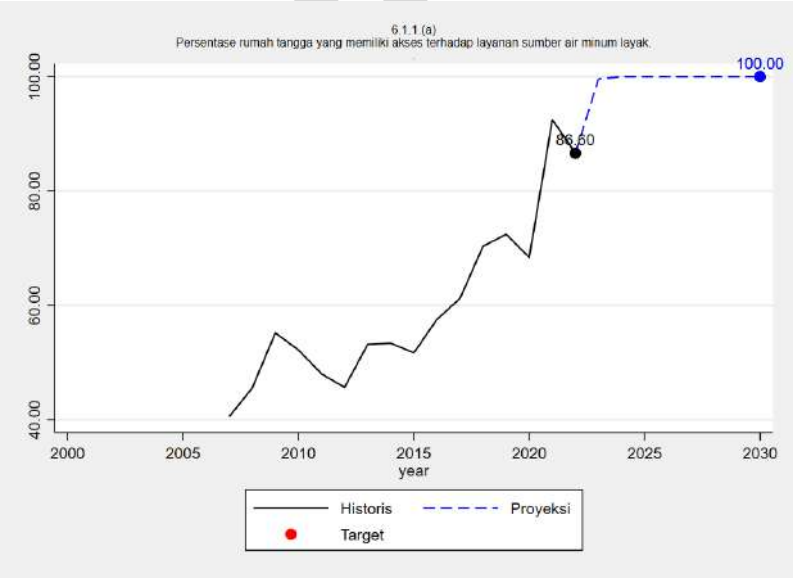
Data historis persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman ditunjukkan dengan Gambar 4.70. Pola data historis menunjukkan kecenderungan agak menurun dan berlawanan dengan yang diharapkan yaitu kenaikan hingga mencapai target 88,20%. Oleh karena itu, indikator ini memperoleh nilai E dengan hasil proyeksi pencapaian di tahun 2030 adalah 28,21%. Terlihat bahwa rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat masih belum menggunakan layanan air minum yang diatur secara aman hingga tahun 2030.

bappelitbangda



Gambar 4-70 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman

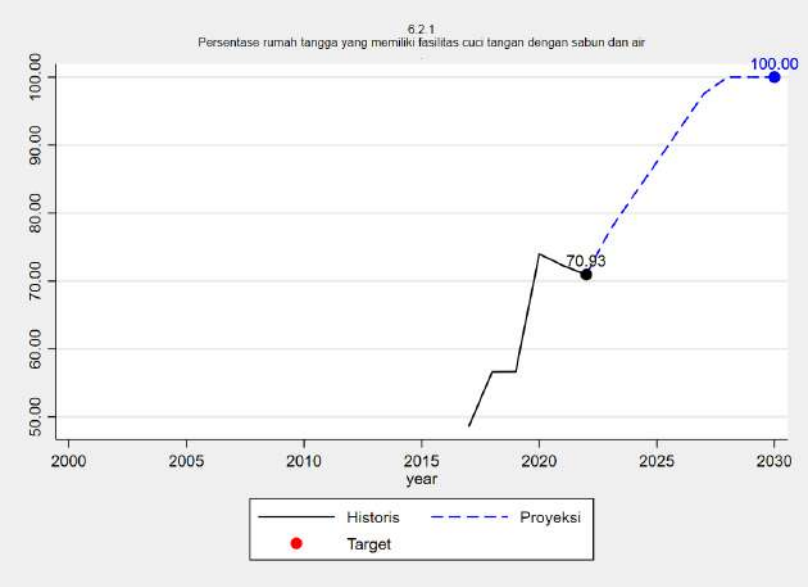
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak, mulai dari tahun 2007 (40,53%) hingga tahun 2022 (86,60%), menunjukkan fluktuasi angka dengan peningkatan yang cukup signifikan (lihat Gambar 4.71). Proyeksi pencapaian indikator ini pada tahun 2030 akan mencapai target 100%, bahkan terjadi di tahun 2024. Sebagai hasilnya, nilai yang diperoleh untuk indikator ini adalah A. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2030 diharapkan memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak.



Gambar 4-71 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

bapperitbangda

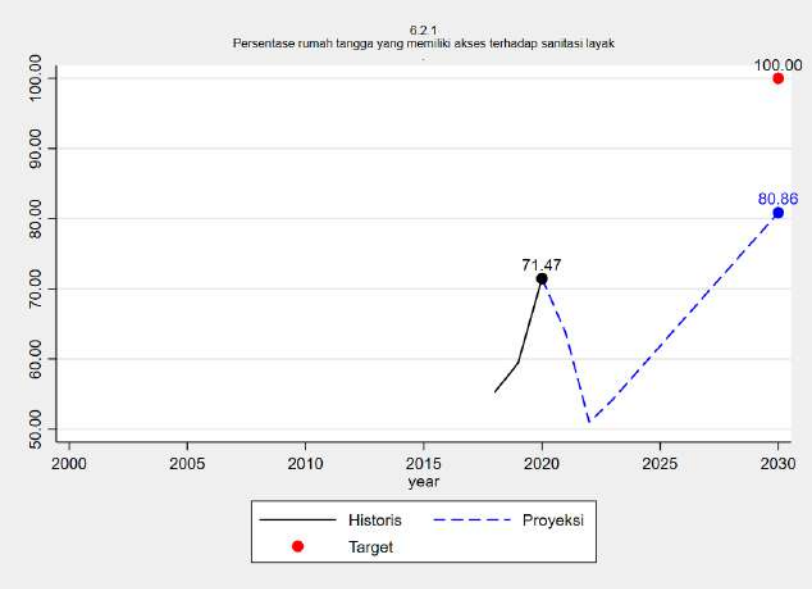
Berusaha mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan merupakan target 6.2.



Gambar 4-72 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air

Gambar 4.72 menjelaskan data historis dari tahun 2017 (48,55%) hingga 2022 (70,93%) dengan tren yang meningkat secara signifikan. Berdasarkan data historis tersebut hasil proyeksi pencapaian tahun 2030 untuk Kabupaten Bandung Barat sebesar 100%, bahkan diproyeksikan akan tercapai pada tahun 2028. Proyeksi tersebut sudah sesuai dengan target kuantitatif yang tercantum di dalam *Roadmap* SDGs Indonesia yaitu 100%, sehingga memperoleh nilai A. Pada tahun 2030, rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat akan memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

bappelitbangda



Gambar 4-73 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai C karena hasil proyeksi menunjukkan tren yang meningkat hingga 80,86% pada tahun 2030. Rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat belum semuanya memiliki akses sanitasi layak pada tahun 2030.

4.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Energi yang bersih dan terjangkau dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua masyarakat memiliki akses yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern terhadap sumber energi. Hanya terdapat satu indikator yang dianalisis pada kajian ini, yaitu rasio penggunaan gas rumah tangga, dengan proyeksi nilai A yang diperkirakan dapat tercapai pada tahun 2027.

Tabel 4-7 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 7

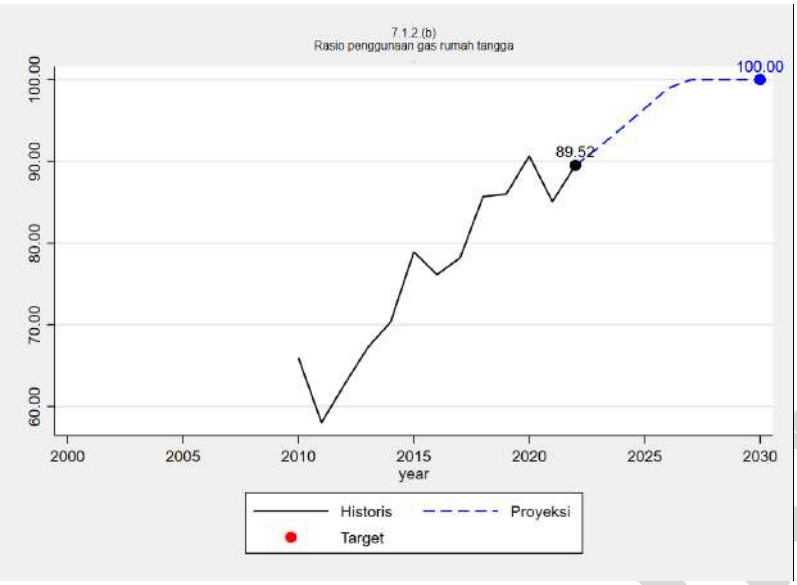
KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
7.1.2(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	78.92	89.51	100	100	A

Catatan: [a]Hasil analisis proyeksi

Jumlah koneksi jaringan gas untuk rumah tangga menjadi sebuah parameter dalam program prioritas nasional yang fokus pada pengembangan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga. Tujuan dari program ini mencakup diversifikasi sumber energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih, dan

bappelitbangda

pelaksanaan program tambahan dalam bentuk konversi minyak tanah menjadi Liquefied Petroleum Gas (LPG) guna mempercepat pengurangan penggunaan minyak bumi. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses kepada bahan bakar yang lebih bersih dan aman.



Gambar 4-74 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 rasio penggunaan gas rumah tangga.

Grafik 4.74 menggambarkan data historis mengenai rasio penggunaan gas rumah tangga dari tahun 2010 hingga 2022 (89,52%) dengan tren peningkatan yang signifikan. Data ini diproyeksikan hingga tahun 2030 mencapai angka 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesesuaian antara proyeksi hasil dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menyebabkan indikator ini mendapatkan penilaian A. Dengan kata lain, diharapkan bahwa pada tahun 2030, seluruh rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat akan beralih menggunakan gas rumah tangga.

4.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi melibatkan indikator-aspek perekonomian yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini mencakup penciptaan peluang kerja yang produktif dan komprehensif, serta penyediaan pekerjaan yang layak untuk seluruh masyarakat. Dari 11 indikator terpilih, hanya satu proyeksi pencapaian Kabupaten Bandung Barat di tahun 2030 yang mencapai target atau bernilai A yaitu Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 2 indikator memperoleh nilai B diantaranya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian dan tingkat pengangguran terbuka, 2 indikator memperoleh nilai C adalah persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak bersekolah, bekera atau mengikuti pelatihan dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara. 4 indikator masih jauh

bappelitbangda

dari target yang ditentukan dan dua lainnya tidak dapat ditentukan nilai scorecardnya seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4-8.

Tabel 4-8 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 8

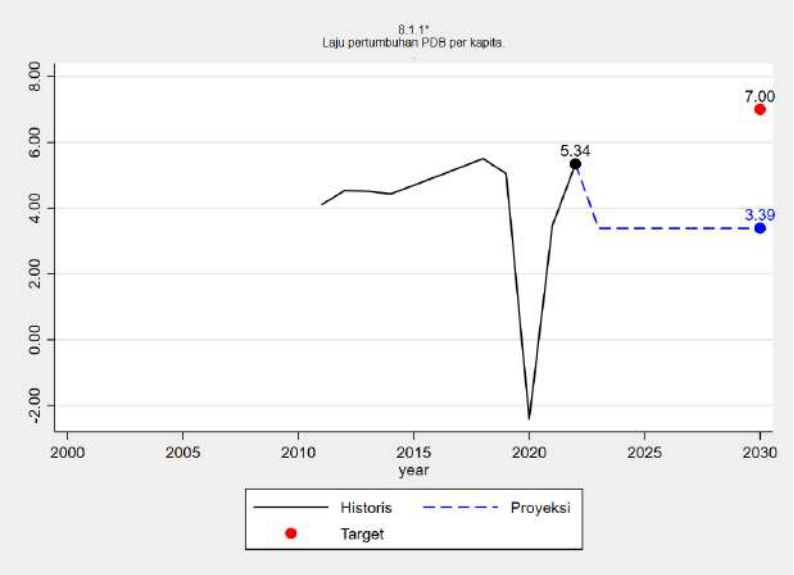
KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	5.5[c]	5.34	3.38	7	E
8.1.1.(a)	PDB per kapita (ribu rupiah)	17000.00[b]	18080.00	21234.37	119635.88	E
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	9.18	4.40[f]	3.73	3.78	A
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal	75.88	59.48[f]	55.62	25	D
8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal	24.12	41.76	32.76	75	E
8.3.1(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	81.36	88,67[d]	80.47		B
8.5.1*	Upah rata-rata per jam	7348.22	14872.91[d]	22157.91		
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	10.01	9.62	9.94	3.80	B
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	12.01	12.48[f]	9.26		
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	35.80	37.09[f]	25.19	3.80	C
8.9.1(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta)	24.02	36.34[b]	28.94	36.03	C

Catatan: [a] Hasil analisis proyeksi. [b] Data tahun 2017. [c] Data tahun 2018. [d] Data tahun 2019. [e] Data tahun 2016. [f] Data tahun 2020. [g] Data tahun 2021. [h] Tidak ada data pada tahun tersebut.

Target 8.1 bermaksud mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang dianalisis dengan 2 indikator yaitu PDB per kapita dan laju pertumbuhannya.

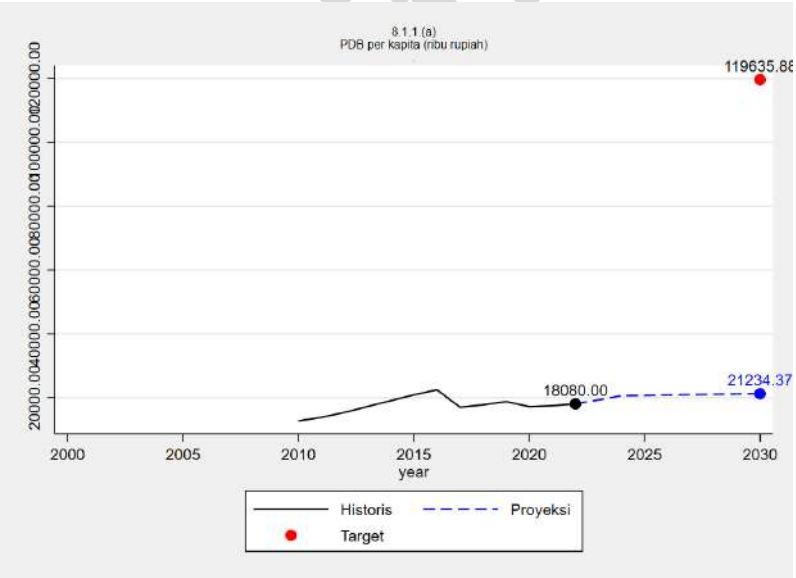
PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk. Lajunya diukur untuk dapat melihat pertumbuhan PDB pada periode tertentu, sehingga dapat terlihat perubahan standar kehidupan rata-rata penduduk.

bappelitbangda



Gambar 4-75 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 laju pertumbuhan PDB per kapita

Gambar 4.75 memperlihatkan data historis terkait laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Sempat mengalami penurunan hingga -2,41 pada tahun 2020 membuat proyeksi pencapaian tahun 2030 dihitung dari rata-rata data historis. Hasil proyeksi untuk tahun 2030 menunjukkan nilai sebesar 3,39%, sementara target yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah 7% untuk laju PDB per kapita. Oleh karena itu, laju pertumbuhan PDB per kapita di Kabupaten Bandung Barat meraih nilai D.

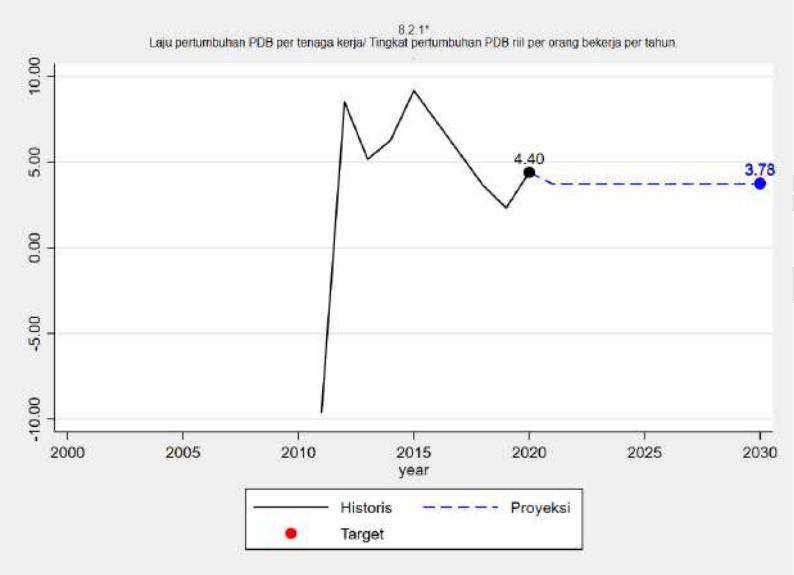


Gambar 4-76 Grafik data historis PDB per kapita (ribu rupiah)

Data historis PDB per kapita, seperti yang terlihat dalam Gambar 4.76, menunjukkan kecenderungan sedikit peningkatan dari tahun 2010 hingga 2022 (18.080). Proyeksi untuk tahun 2030 mengindikasikan bahwa PDB per kapita di Kabupaten Bandung Barat akan mencapai 21.234 sedangkan angka tersebut

masih jauh dari target yang ditetapkan oleh *expert judgment* (tim penyusun) sebesar 119.635,88, sehingga indikator PDB per kapita Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai E.

Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi merupakan tujuan dari Target 8.2 TPB/SDGs Indonesia. Hal ini akan dicapai melalui upaya diversifikasi, peningkatan teknologi, dan inovasi, dengan fokus pada peningkatan nilai tambah tinggi dan pengembangan sektor padat karya. Keberhasilan pencapaian target ini diukur menggunakan indikator laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja atau tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

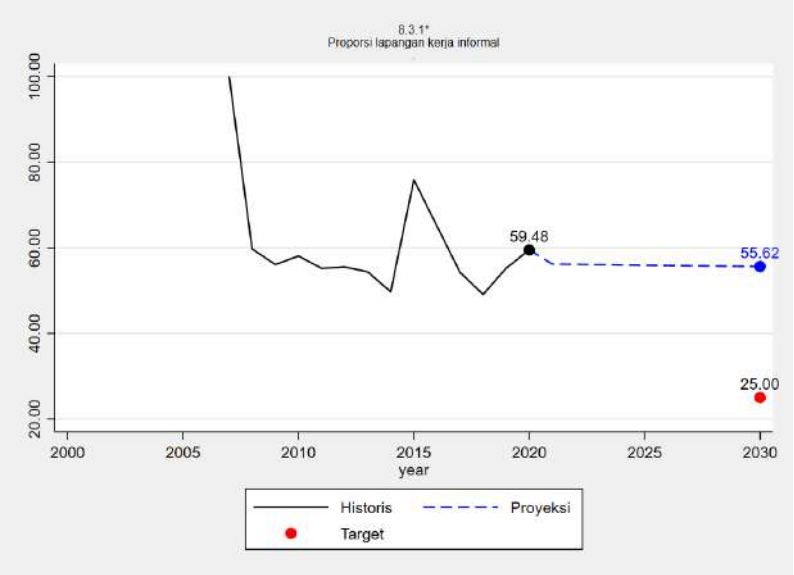


Gambar 4-77 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

Gambar 4.77 mengilustrasikan kecenderungan fluktuatif dalam data laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja atau tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. Laju pertumbuhan ini mengalami nilai negatif pada tahun 2013 (-9,65%) dan mengalami peningkatan menjadi nilai positif pada tahun-tahun berikutnya. Dalam proyeksi hingga tahun 2030, tren tersebut diperkirakan mencapai angka 3,73%, mendekati target yang telah ditetapkan oleh OECD sebesar 3,78%. Kabupaten Bandung Barat meraih nilai A pada indikator ini.

Target 8.3 bertujuan untuk mengadvokasi kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, pengembangan kewirausahaan, stimulasi kreativitas dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk fasilitasi akses pada layanan keuangan. Keberhasilan pencapaian target ini diukur melalui tiga indikator, yaitu proporsi lapangan kerja informal, persentase tenaga kerja yang bekerja secara formal, dan persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian.

bappeli...gda



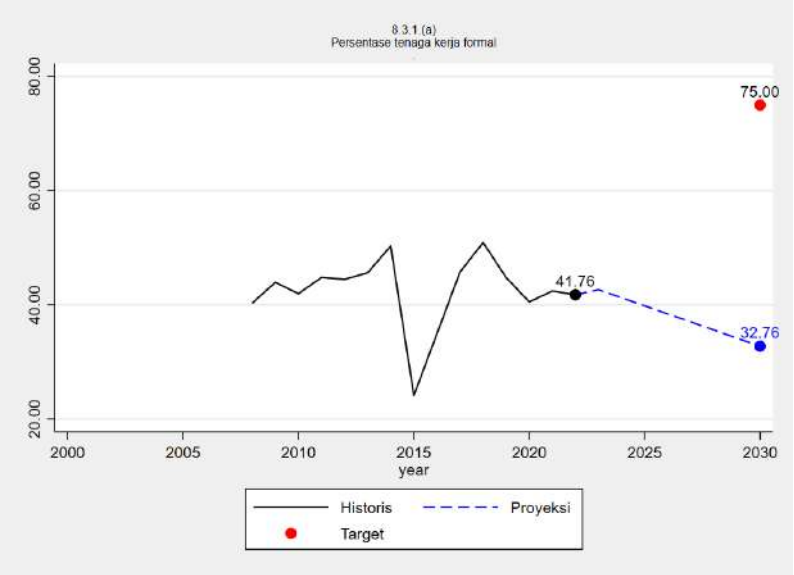
Gambar 4-78 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi lapangan kerja informal.

Dari data yang tergambar dalam Gambar 4.78, dapat dilihat bahwa proporsi lapangan kerja informal di Kabupaten Bandung Barat mengalami fluktuasi terutama tahun 2015, dengan kecenderungan datar. Pada tahun 2020, proporsi tersebut mencapai 59,48%, dan proyeksi untuk tahun 2030 menunjukkan angka 55,62%. Meskipun demikian, angka tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh expert judgement (tim penyusun) sebesar 25%. Pada tahun 2030, pekerjaan informal masih mendominasi di Kabupaten Bandung Barat, sehingga mendapatkan penilaian D.

Persentase tenaga kerja formal mengindikasikan adanya kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi, serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (Badan Pusat Statistik, 2021a).

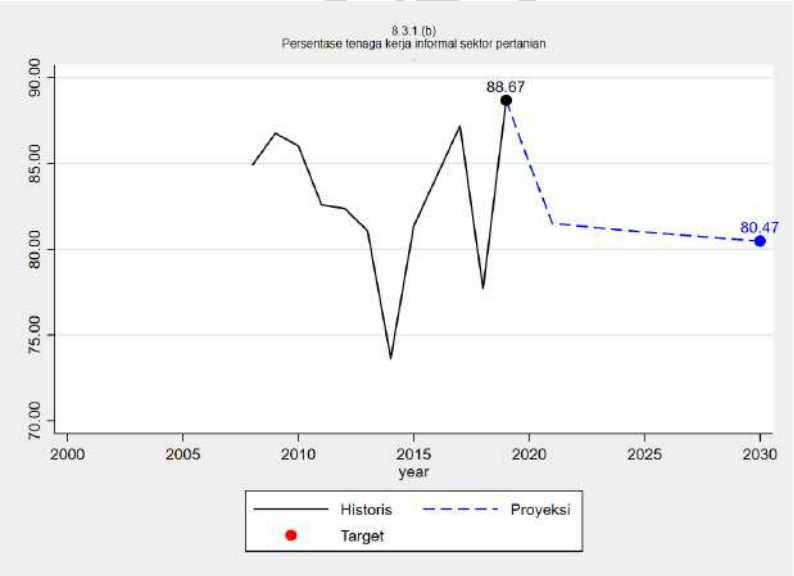
Seiring dengan tingginya persentase pekerjaan informal, proyeksi persentase tenaga kerja formal di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2030 juga relatif rendah, yakni sebesar 32,76%, masih jauh dari target 75% yang telah ditetapkan oleh tim penyusun. Tren data historis tertera dalam Gambar 4.79 dari tahun 2008 hingga 2022 (41,76%) dengan kecenderungan menurun, terutama tahun 2015 (24,12%). Jumlah tenaga kerja formal di Kabupaten Bandung Barat masih terbatas pada tahun 2030, sehingga memperoleh penilaian E.

bappelitbangda



Gambar 4-79 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 persentase tenaga kerja formal.

Berikutnya, proporsi tenaga kerja informal di sektor pertanian dengan data historis diperlihatkan dalam Gambar 4.80. Grafik tersebut menunjukkan kecenderungan fluktuasi yang sedikit menurun, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2019 (88,67%). Proyeksi hasil persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian pada tahun 2030 menunjukkan penurunan menjadi 80,47% dari tingkat tahun 2019. Persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan lebih lanjut pada tahun 2030, sehingga memperoleh penilaian B.

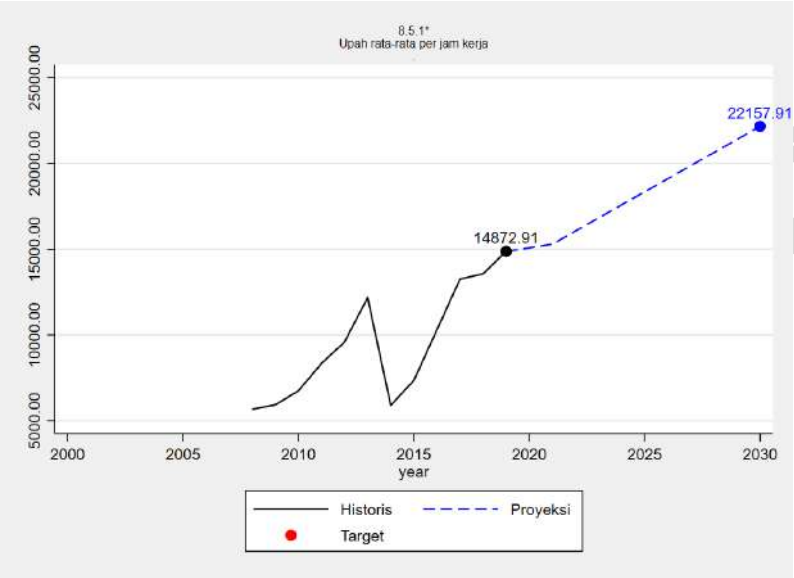


Gambar 4-80 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.

Target 8.5 menginginkan pada tahun 2030 dapat memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah

yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Target tersebut diukur menggunakan 3 indikator diantaranya upah rata-rata per jam kerja, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat setengah pengangguran.

Rata-rata upah per jam kerja mencerminkan kualitas pekerjaan dan situasi kehidupan seseorang. Gambar 4.81 menampilkan data historis tentang upah rata-rata per jam di masyarakat Kabupaten Bandung Barat, yang menunjukkan kecenderungan peningkatan, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2014. Pada tahun 2019, data terakhir menunjukkan nilai 14.872,14 dan proyeksinya menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan hingga mencapai 22.157,91 pada tahun 2030.

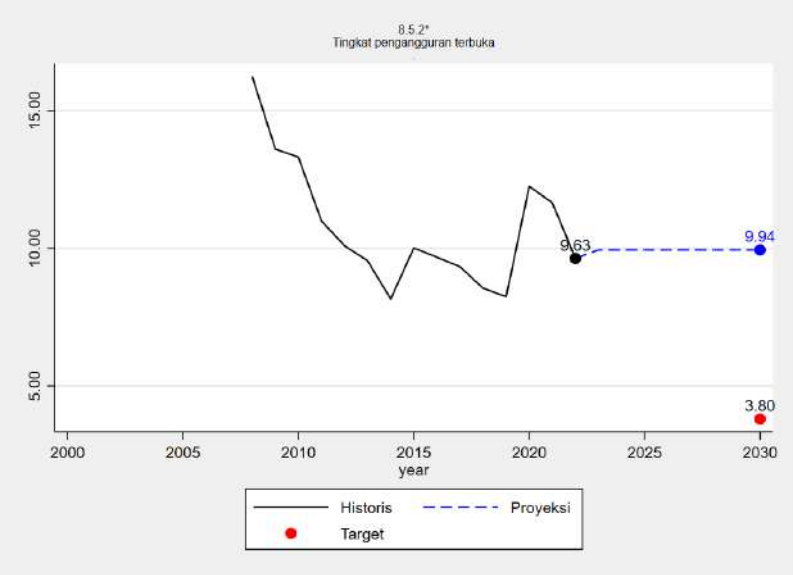


Gambar 4-81 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 upah rata-rata per jam kerja (rupiah).

Angka pengangguran terbuka mencerminkan kapasitas ekonomi untuk menciptakan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin banyak tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan petunjuk mengenai performa pasar kerja dan mencerminkan kondisi ekonomi khusus, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan faktor lainnya.

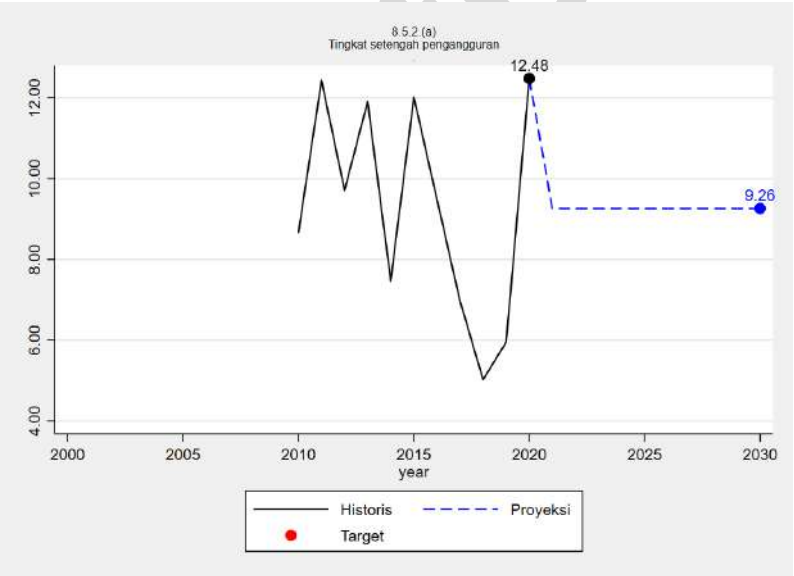
Tren data historis tingkat pengangguran terbuka, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.82, mengalami fluktuasi sehingga proyeksi dilakukan dengan menghitung rata-rata data historis dari tahun 2015 (10,01%) hingga 2022 (9,63%) dengan hasil 9,94%. Roadmap SDGs Indonesia menetapkan target indikator ini sebesar 3,8%, meskipun angka tersebut masih dianggap tinggi bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2030, namun sudah mendekati target tersebut, sehingga memperoleh penilaian B.

bappeli bogda



Gambar 4-82 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 tingkat pengangguran terbuka.

Indikator selanjutnya adalah tingkat setengah pengangguran, yang mencerminkan kapasitas ekonomi untuk menciptakan pekerjaan yang dapat memanfaatkan keterampilan, pengalaman, dan ketersediaan tenaga kerja. Tingkat setengah pengangguran memberikan gambaran tentang kualitas, produktivitas, dan tingkat pemanfaatan lapangan kerja yang tersedia, terutama di negara-negara dengan tingkat pengangguran terbuka yang rendah.



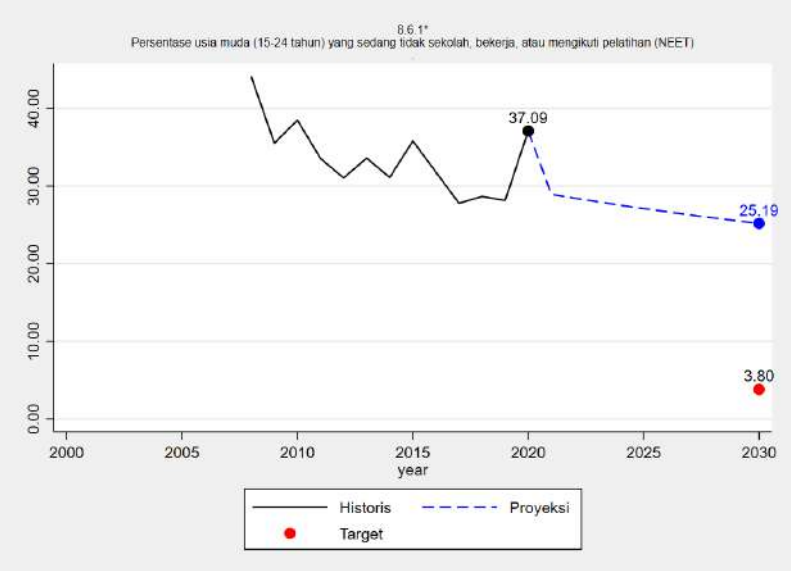
Gambar 4-83 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 tingkat setengah pengangguran.

Dengan merujuk pada grafik data historis dalam Gambar 4.83, tingkat setengah pengangguran menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2017, terlihat penurunan signifikan menjadi 6,97%, namun kembali meningkat pada tahun 2020 mencapai 12,48%. Proyeksi untuk tahun 2030 menunjukkan bahwa tingkat setengah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat diharapkan kembali menurun menjadi

9,26%.

Target 8.6 Indonesia bertujuan mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak mengikuti pelatihan, dan tidak bersekolah. Pengukuran dilakukan dengan indikator persentase usia muda (15-24) yang tidak terlibat dalam kegiatan sekolah, pekerjaan, atau pelatihan (NEET). Hal ini memungkinkan penilaian potensi penduduk usia muda untuk bergabung dalam pasar kerja, termasuk pekerja muda yang merasa putus asa (discouraged worker) dan kaum muda yang tidak masuk dalam angkatan kerja karena alasan disabilitas, tugas rumah tangga, dan lain-lain. Indikator ini memberikan informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan terkait pengembangan keterampilan untuk kaum muda, serta memfasilitasi transisi mereka ke pasar kerja dengan menyediakan lingkungan ketenagakerjaan yang mendukung.

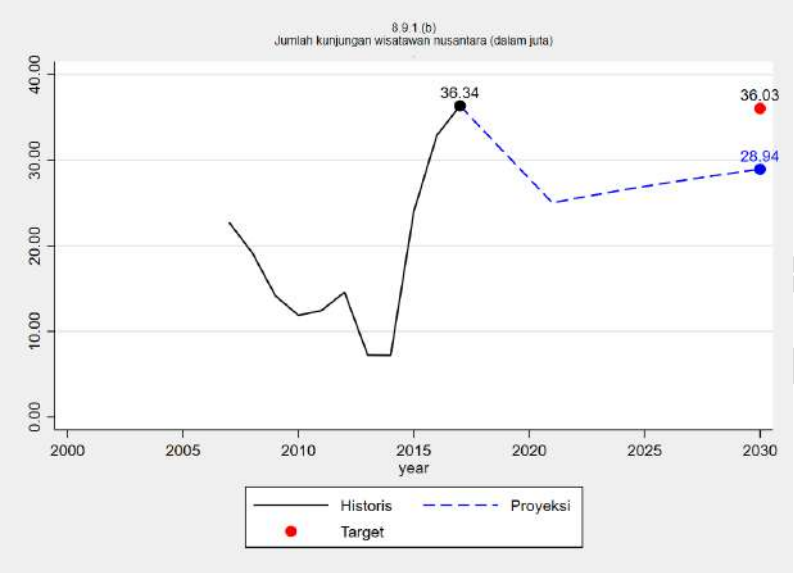
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang tidak terlibat dalam kegiatan sekolah, pekerjaan, atau pelatihan (NEET) menunjukkan tren penurunan berdasarkan data historis (lihat Gambar 4.84), meskipun belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2030. Proyeksi hasil untuk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2030 mencapai 25,19%, sementara target kuantitatif yang ditetapkan oleh tim penyusun adalah 3,80%. Jumlah usia muda yang tidak bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan di Kabupaten Bandung Barat masih signifikan, sehingga indikator ini mendapatkan penilaian C.



Gambar 4-84 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET).

Target 8.9 Indonesia menargetkan pada tahun 2030, dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Hal ini dianalisis menggunakan indikator jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Data historis dari tahun 2007 hingga 2017 untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun 2007 hingga 2014, namun meningkat dari tahun 2015 hingga 2017. Proyeksi pencapaian pada tahun 2030 mencapai 28,94 juta, sementara target yang ditetapkan oleh tim penyusun adalah 36,03 juta (meningkat 50%). Hasil proyeksi pencapaian tersebut masih jauh dari target kuantitatif yang telah ditetapkan oleh tim penyusun (*expert judgement*), sehingga mendapatkan nilai C.



Gambar 4-85 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta).

4.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Tujuan ke-9 dari SDGs adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Terdapat dua indikator yang dianalisis dalam kajian ini yaitu proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur yang memperoleh nilai D dan proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband yang memperoleh nilai A. Di bawah ini terdapat tabel yang berisikan indikator terpilih tujuan 9.

Tabel 4-9 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 9

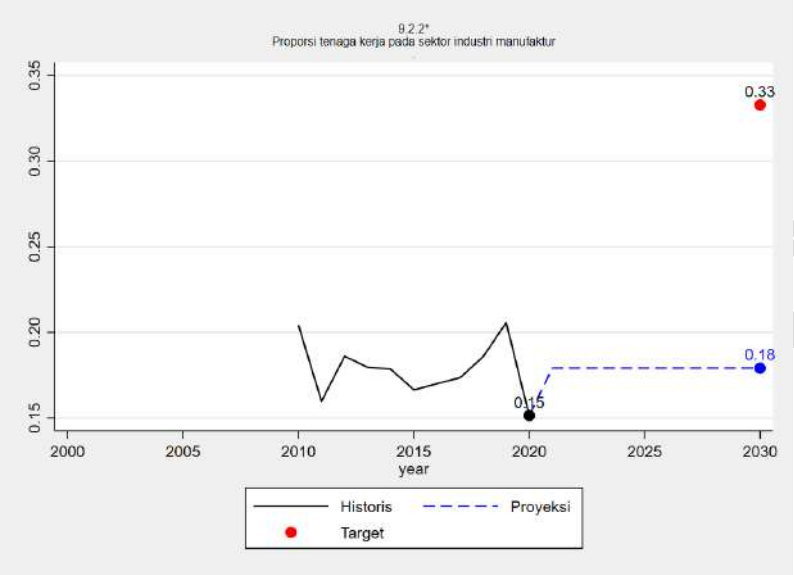
KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	0.17	0.15[f]	0.18	0.33	D
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	99.2[b]	100[g]	100	100	A

Catatan: [a] Hasil analisis proyeksi. [b] Data tahun 2017. [c] Data tahun 2018. [d] Data tahun 2019. [e] Data tahun 2016. [f] Data tahun 2020.

bappelitbangda

[g] Data tahun 2021. [h] Tidak ada data pada tahun tersebut.

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang merupakan bunyi dari target 9.2

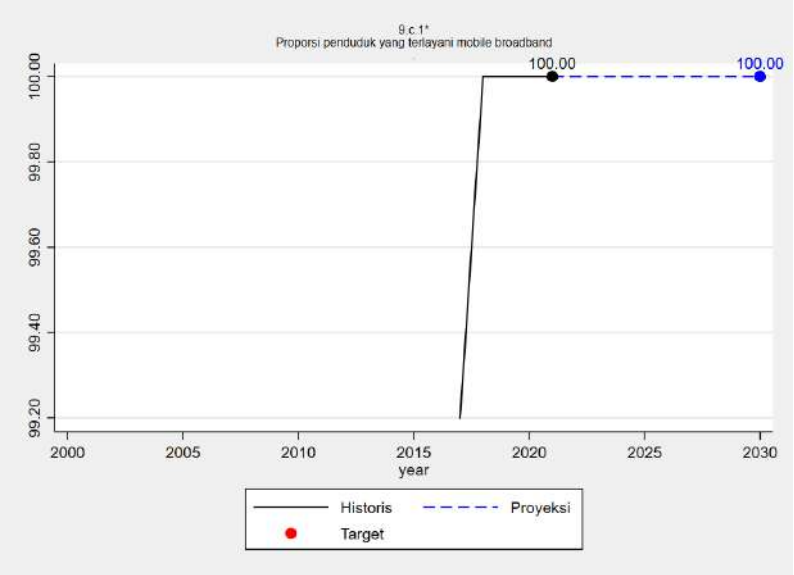


Gambar 4-86 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

Berdasarkan informasi dalam Gambar 4.86, data historis menunjukkan perubahan yang kurang signifikan, sehingga proyeksi tahun 2030 diperoleh dari rata-rata data historis dari tahun 2015 (0,16%) hingga 2020 (0,15%). Proporsi tenaga kerja di sektor industri manufaktur ditargetkan untuk meningkat dua kali lipat dari tahun 2015 menjadi 0,33%. Namun, hasil proyeksi pencapaiannya hanya mencapai 0,18%, sehingga indikator ini mendapatkan nilai D. Pada tahun 2030, proporsi tenaga kerja di sektor industri manufaktur di Kabupaten Bandung Barat tidak mencapai peningkatan dua kali lipat dari tahun 2015.

Target 9.c secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2030.

bappelitbangda



Gambar 4-87 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband

Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband di Kabupaten Bandung Barat memiliki data historis dari tahun 2017 yang sudah mencapai 99,19%. Target yang ditetapkan United Nations telah tercapai dari tahun 2021 yaitu 100%, sehingga proyeksi tahun 2030 juga akan berada pada angka 100% dan menyebabkan nilai untuk indikator ini A. Seluruh penduduk Kabupaten Bandung Barat terlayani mobile broadband sejak tahun 2021.

4.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Setiap tahun, Koefisien Gini mengalami peningkatan, sehingga mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan bagi penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional menjadi tantangan yang sulit untuk dicapai pada tahun 2030. Kesenjangan di Indonesia tetap tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Solusi untuk mengurangi kesenjangan adalah dengan memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua individu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama, atau kemampuan ekonomi, serta status lainnya.

Terdapat 3 indikator terpilih dari 2 target untuk Kabupaten Bandung Barat dengan proyeksi pencapaian tahun 2030 dinilai cukup. Indikator terpilih tujuan 10 dapat dilihat pada table 4-10.

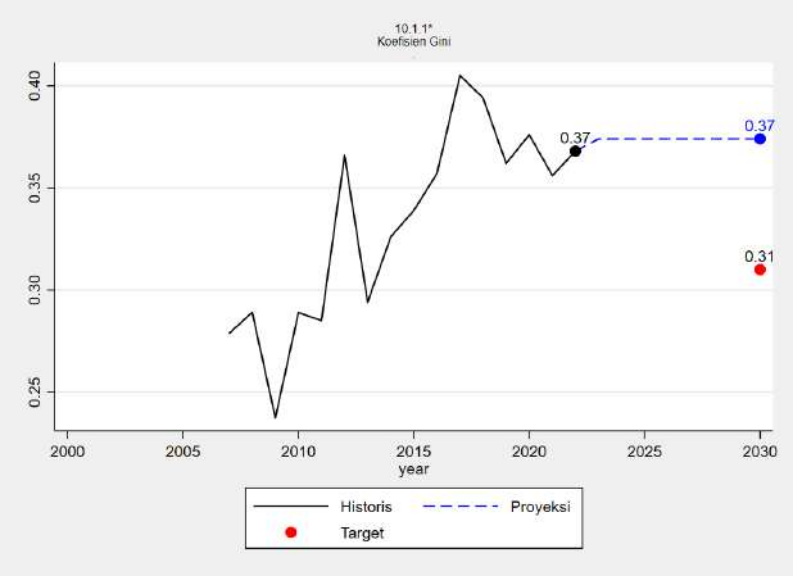
bappelitbangda

Tabel 4-10 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 10

KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
10.1.1*	Koefisien Gini	0.34	0.37	0.37	0.31	C
10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	12.67	10.82	9.39	6.335	D
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan	4.29	5.18[f]	8.44	0	B

Catatan: [a] Hasil analisis proyeksi. [b] Data tahun 2017. [c] Data tahun 2018. [d] Data tahun 2019. [e] Data tahun 2016. [f] Data tahun 2020. [g] Data tahun 2021. [h] Tidak ada data pada tahun tersebut.

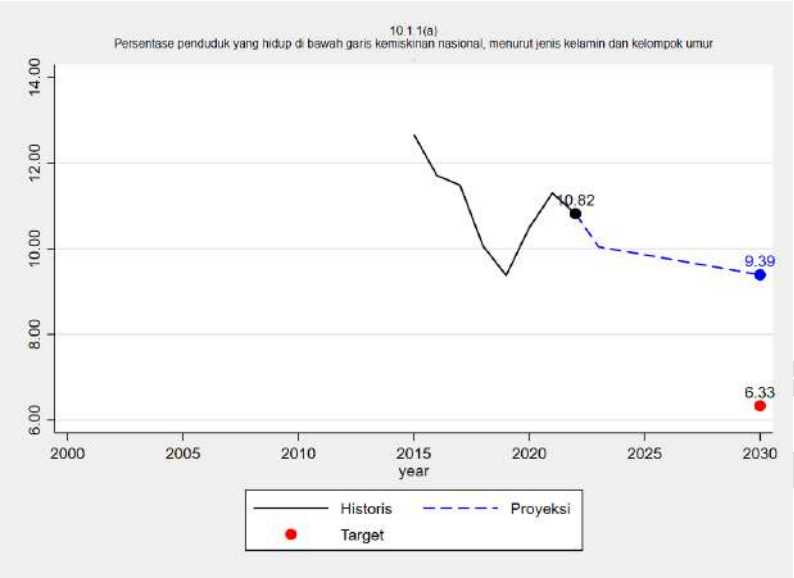
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Koefisien gini atau rasio gini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh yang nilainya berkisar antara antara 0 hingga 1. Apabila rasio gini semakin mendekati 1 maka tingkat ketimpangan semakin tinggi, sedangkan apabila mendekati 0 ketimpangan semakin kecil (pemerataan pendapatan).



Gambar 4-88 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 koefisien gini.

Gambar 4.88 menunjukkan grafik data historis koefisien Gini dengan tren yang cenderung meningkat dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2022, koefisien Gini mencapai nilai 0,37 dan hasil proyeksi untuk tahun 2030 merupakan rata-rata koefisien gini dari tahun 2015 hingga 2022,

sebesar 0,37. Tren diharapkan mengalami penurunan untuk mencapai target 0,31 (yang ditetapkan oleh expert judgement tim penyusun), namun yang terjadi sebaliknya. Meskipun nilai mendekati 0, indikator ini memperoleh nilai C. Kabupaten Bandung Barat belum berhasil mengurangi kesenjangan sesuai target pada tahun 2030.

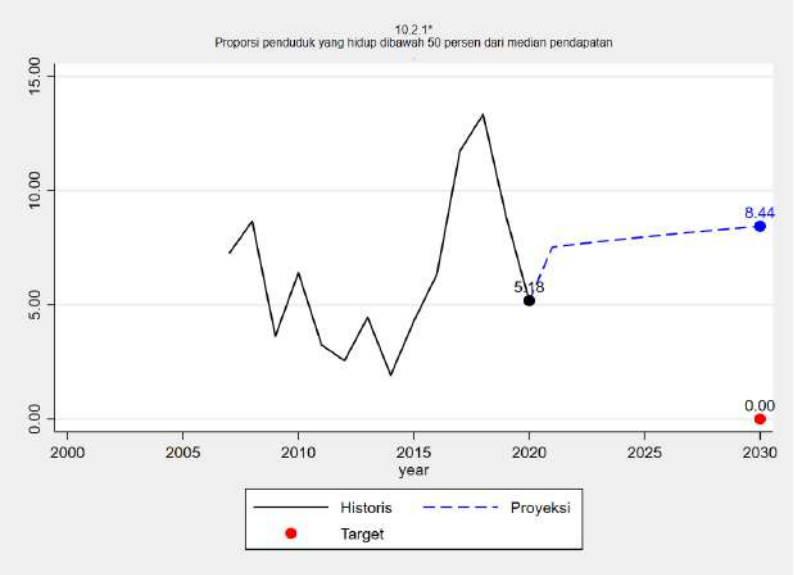


Gambar 4-89 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Secara umum, presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional mengalami penurunan, meskipun sempat naik pada tahun 2021 (11,3%) lalu menurun kembali di tahun 2022 menjadi 10,82%. Proyeksi pencapaian untuk tahun 2030 adalah 9,39%, jika dibandingkan dengan target kuantitatif yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu penurunan sebesar 50% dari tahun 2015 atau mencapai 6,33% pada tahun 2030, Kabupaten Bandung Barat memperoleh *scorecard* D.

Target 10.2 mengharapkan pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. Satu indikator yang dianalisis pada kajian ini adalah proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah 50% dari nilai median, yang merupakan ukuran kemiskinan relatif yang umum digunakan di sejumlah negara maju untuk memantau perubahan tingkat kesejahteraan penduduk yang memiliki penghasilan di bawah setengah dari median pendapatan total. Penurunan persentase ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan dalam kelompok pendapatan rendah. Indikator ini juga dapat mencerminkan perkembangan tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk dan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan untuk mengurangi disparitas di antara warganya.

bappelitbangda



Gambar 4-90 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang hidup 50 persen dari median pendapatan.

Data historis dari indikator ini memiliki tren yang fluktuatif dan agak meningkat (Gambar 4.90). Pada tahun 2018, angkanya mencapai puncaknya sebesar 13,34%, lalu turun menjadi 5,18% pada tahun 2020. Proyeksi pencapaian untuk tahun 2030 diperkirakan mencapai 8,44%. Dalam perbandingan dengan target 0% yang ditetapkan oleh OECD, proyeksi ini sudah mencapai 90% dari target TPB/SDGs dengan perolehan *scorecard* B. Kabupaten Bandung Barat hampir berhasil mengurangi jumlah penduduk yang hidup dengan 50% di bawah rata-rata pendapatan.

4.11 Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs yaitu ingin menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Terdapat 3 indikator terpilih dari tujuan ini, dengan disagregrasi untuk indikator 11.5.1* sehingga menjadi 4 indikator (lihat tabel 4.11) namun untuk indikator 11.5.1* tidak dapat diproyeksikan.

Tabel 4-11 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 11

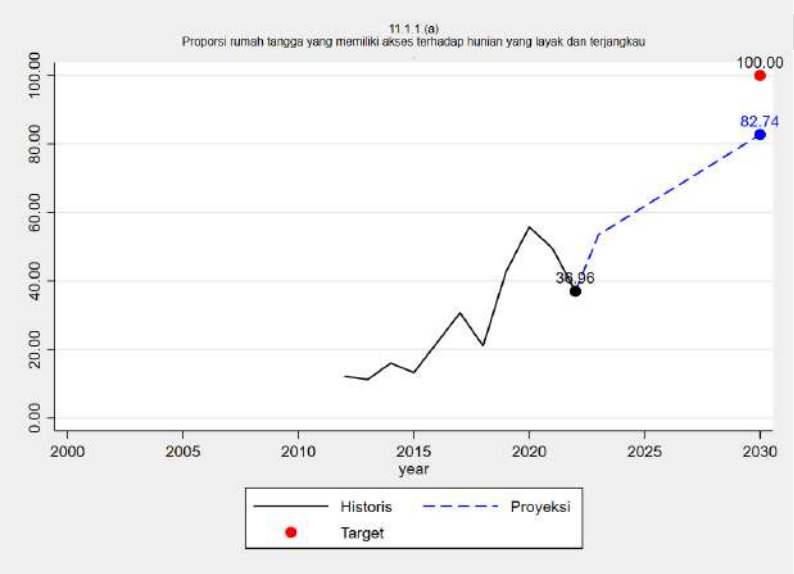
KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	13.25	36.96	82.74	100	C

bappelitbangda

KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (1) meninggal	0.24[e]	0.0015			
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (2) terkena dampak (luka)	0.62	0.42[c]			
11.7.2(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	0.16	6.54	1.76	0	A

Catatan: [a] Hasil analisis proyeksi. [b] Data tahun 2017. [c] Data tahun 2018. [d] Data tahun 2019. [e] Data tahun 2016. [f] Data tahun 2020. [g] Data tahun 2021. [h] Tidak ada data pada tahun tersebut.

Indikator 11.1.1(a) dalam rangka mendukung target menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.



Gambar 4-91 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Data historis dimulai dari 2012 hingga tahun 2022 (36.96%) dengan pola cenderung meningkat, sehingga pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 82,74%. Jika dibandingkan dengan target 100%, proyeksi tersebut sudah lebih dari 75% mendekati target namun belum cukup, sehingga memperoleh nilai C. Tahun 2030, Kabupaten Bandung Barat belum seluruhnya memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau.

bappeda

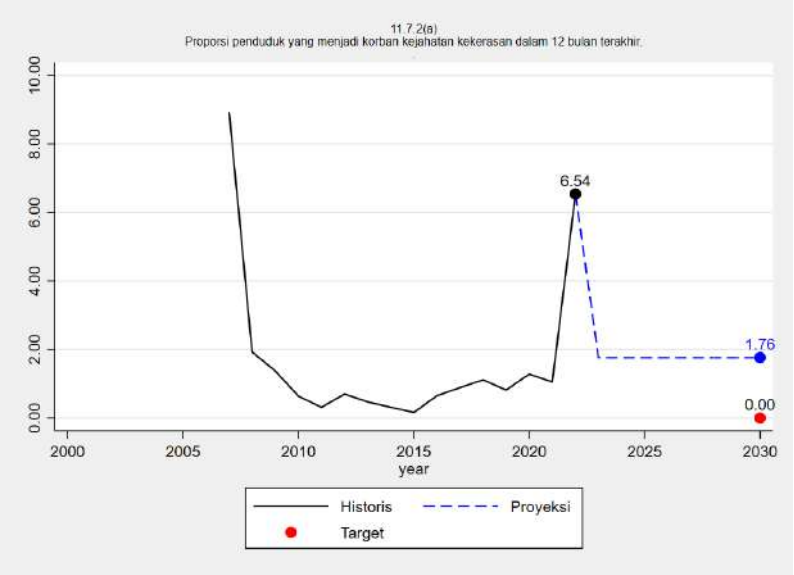
Indikator 11.5.1* menjadi satu-satunya indikator yang dianalisis untuk target 11.5 yaitu pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Jumlah korban meninggal akibat bencana per 100.000 orang dan jumlah orang terkena dampak (luka) per 100.000 orang tidak dilakukan proyeksi dan hanya dianalisis berdasarkan data historisnya saja yang berfluktuasi sekitar 0% hingga 3%.

Tabel 4-12 Data indikator 11.5.1*

KODE	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (1) meninggal	-[b]	0.24	0.12	-[b]	3.11	0.03	0.00074	0.00152
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (2) terkena dampak (luka)	0.61	0.24	0.48	0.42	-[b]	-[b]	-[b]	-[b]

-[b] data tidak tersedia pada tahun tersebut

Target 11.7 mengharapkan pada tahun 2030 dapat menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas yang dianalisis melalui indikator proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.



Gambar 4-92 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

bappeda litbangda

Data historis dari tahun 2015 hingga 2021 berada di bawah 2%, sempat terjadi kenaikan di tahun 2022 menjadi 6,54%. Proyeksi tahun 2030 diperoleh dari rata-rata data historis tahun 2015 hingga tahun 2022 yaitu 1,76% sehingga Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai A untuk indikator ini dengan angka yang ditargetkan adalah 0%. Tahun 2030 Kabupaten Bandung Barat hamper dapat menghilangkan korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

4.12 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat

Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat bertujuan untuk menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional serta menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua masyarakat merupakan tujuan 16 TPB/SDGs. Berikut ini tabel yang berisikan 5 indikator terpilih untuk tujuan 16 dengan nilai rata-rata B.

Tabel 4-13 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 16

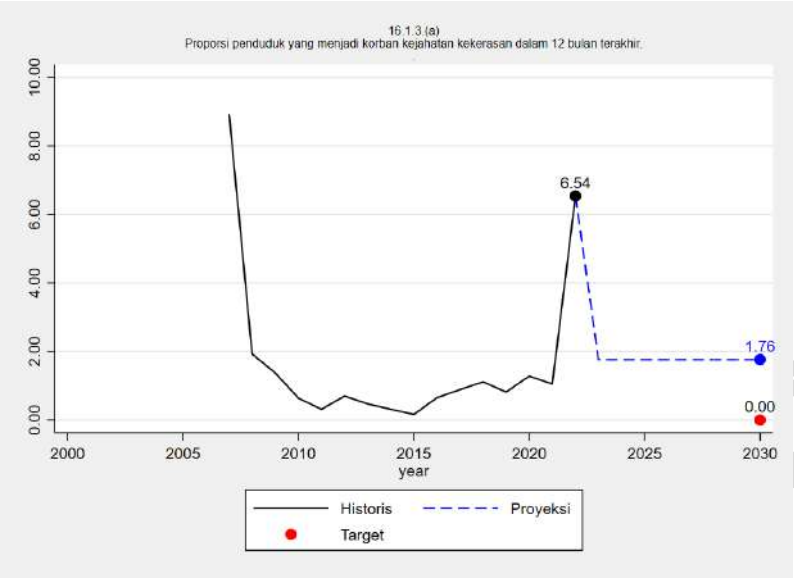
KODE	INDIKATOR	2015	2022	2030[a]	TARGET	NILAI
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	0.16	6.54	1.76	0	A
16.3.1.(a)	Proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi	24.81	6.65	24.71	100	E
16.9.1*	Proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran	74.04	74.59	75.4	100	C
16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	64.25	79.57	100	100	A
16.9.1(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	73	82.14[f]	100	100	A

Catatan: [a] Hasil analisis proyeksi. [b] Data tahun 2017. [c] Data tahun 2018. [d] Data tahun 2019. [e] Data tahun 2016. [f] Data tahun 2020. [g] Data tahun 2021. [h] Tidak ada data pada tahun tersebut.

Target 16.1 secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun. Yang didukung dengan indikator proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir bertujuan untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan adanya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada

bappelitbangda

lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Meningkatnya jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan serta menunjukkan bahwa sistem pelaporan, kesadaran untuk melapor dan kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.



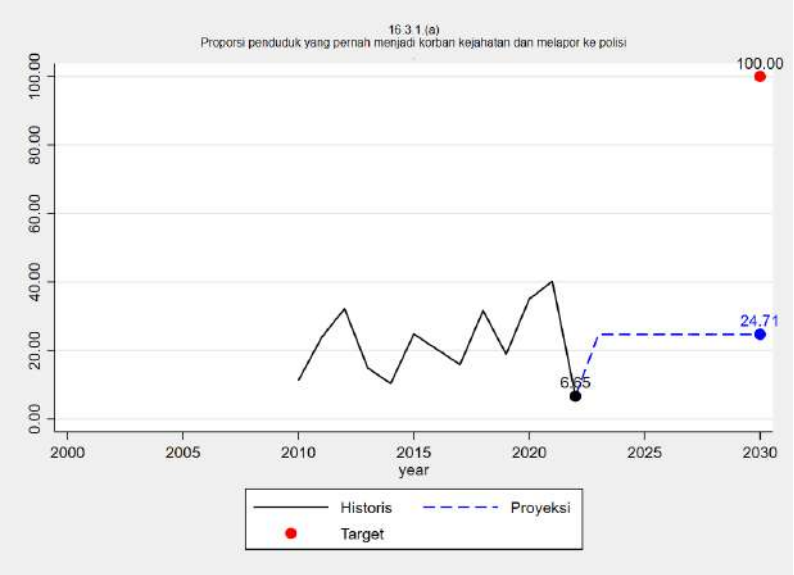
Gambar 4-93 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan mencapai puncaknya pada tahun 2007, dengan angka sebesar 8,92%, dan setelah itu secara bertahap mengalami penurunan hingga tahun 2021 berkisar di bawah 2%, kemudian naik di tahun 2022 menjadi 6,54% (lihat Gambar 4.93). Proyeksi untuk tahun 2030 merupakan rata-rata data historis tahun 2015 hingga 2022 dengan hasil sebesar 1,76%. Pada tahun 2030, diprediksi hampir tidak akan ada korban kejahatan kekerasan di Kabupaten Bandung Barat, dan karena itu, Kabupaten ini meraih nilai A.

Target selanjutnya adalah menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua (target 16.3) yang dianalisis melalui indikator pilihan proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi.

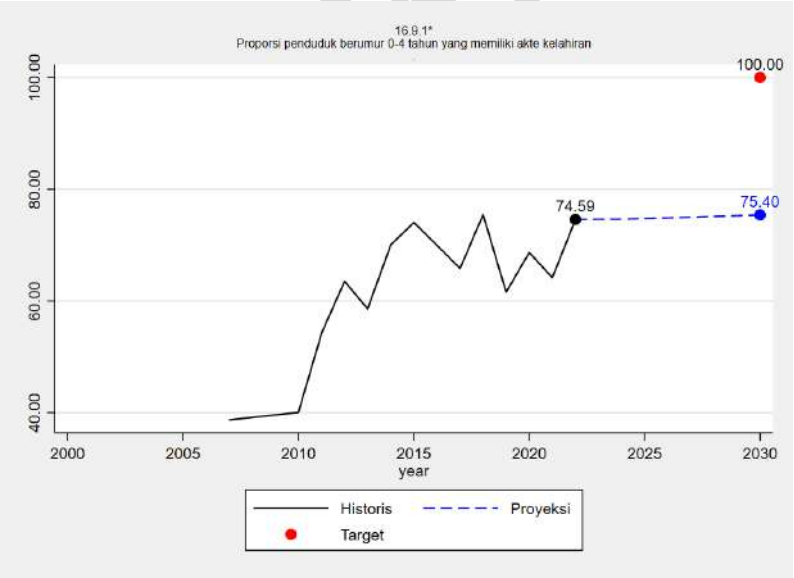
Data historis hingga tahun 2022 (6,65%) menunjukkan tren yang berfluktuasi, sehingga proyeksi pencapaian tahun 2030 diperoleh dari rata-rata data historis tahun 2015 hingga 2022 dengan hasil 24,71%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 100%, proyeksi tersebut masih sangat jauh, sehingga memperoleh nilai E. Masih banyak warga Kabupaten Bandung Barat yang pernah menjadi korban kejahatan namun tidak melapor kepada polisi (Gambar 4.94).

bappelitbangda



Gambar 4-94 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi.

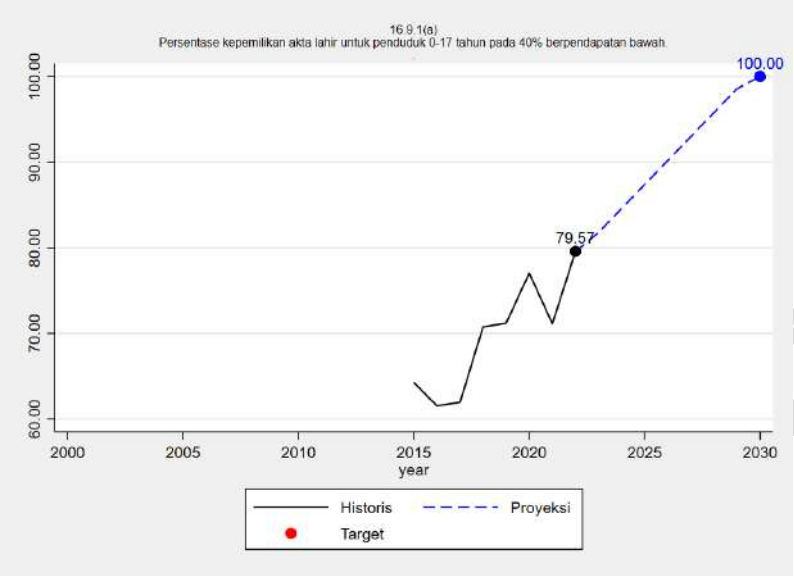
Target 16.9 pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran dianalisis melalui 3 indikator pada kajian ini diantaranya proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur, persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah, dan persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.



Gambar 4-95 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran

bappedabangda

Gambar 4.95 memperlihatkan tren data historis mengenai proporsi penduduk berusia 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran, dengan kecenderungan sedikit peningkatan. Pada tahun 2022, proporsinya mencapai 74,59%, dan hasil proyeksi untuk tahun 2030 menunjukkan peningkatan menjadi 75,4%. Angka tersebut cukup mendekati target yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni 100% sehingga memperoleh nilai C.

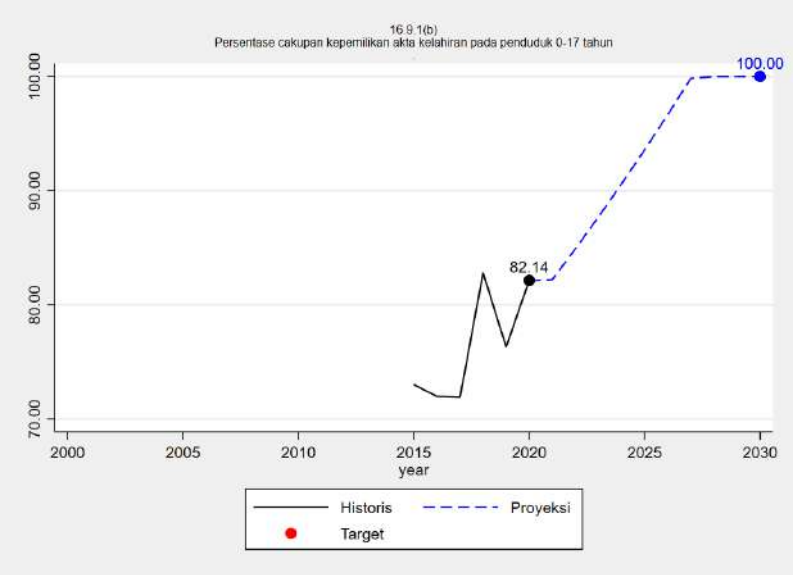


Gambar 4-96 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 presentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah

Ketika *range* umur diperluas menjadi 0-17 tahun, namun khusus untuk 40% penduduk berpendapatan rendah, tren data kepemilikan akta kelahiran meningkat secara signifikan. Diperkirakan tahun 2030 dapat mencapai target 100% dengan data terakhir tahun 2022 sudah mencapai 79,57% (lihat Gambar 4.96).

Begitu juga dengan kepemilikan akte kelahiran penduduk umur 0-17 tahun di Kabupaten Bandung Barat yang akan mencapai target 100% di tahun 2028 berdasarkan hasil proyeksi data historis tahun 2015 hingga 2022 (82,14%). Tren data historis menunjukan kecenderungan meningkat seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.97.

bappelitbangda



Gambar 4-97 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2030 presentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun

4.13 Tujuan 17 Kemitraan dan Mencapai Tujuan

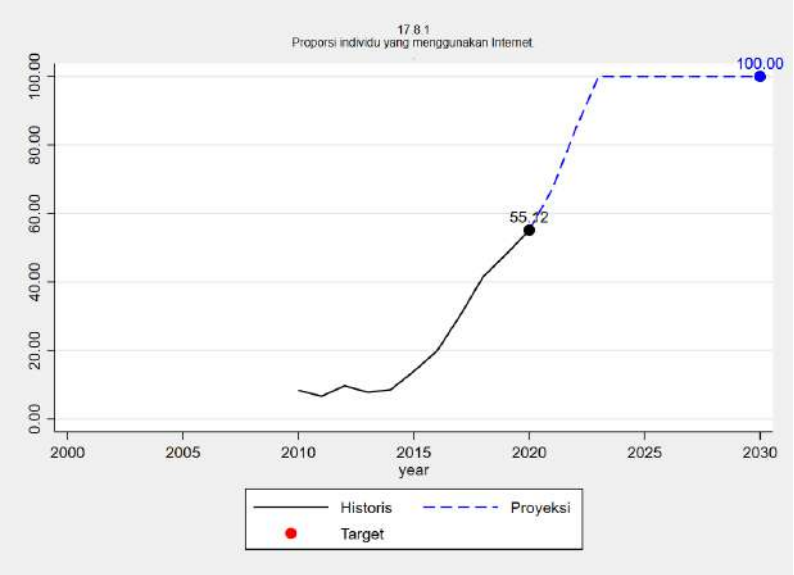
Tujuan 17 ingin menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, salah satunya diukur dengan indikator proporsi individu yang menggunakan internet yang bermanfaat untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi, serta perkembangan masyarakat digital. Dalam rangka mencapai target untuk dapat mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat 3 indikator lainnya, namun karena keterbatasan data (hanya terdapat data pada tahun 2020) maka tidak dapat diproyeksikan dan dianalisis.

Tabel 4-14 Data, target, dan *scorecard* indikator pada tujuan 17

KODE	INDIKATOR	2015	2020	2030[a]	TARGET	NILAI
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	[b]	1.00			
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	[b]	0.71			
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	[b]	17.35			
17.8.1	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	13,94	55.11	100	100	A

Catatan: [a] Hasil analisis proyeksi. [b] Data tahun 2017. [c] Data tahun 2018. [d] Data tahun 2019. [e] Data tahun 2016. [f] Data tahun 2020. [g] Data tahun 2021. [h] Tidak ada data pada tahun tersebut.

bappelitbangda



Gambar 4-98 Grafik data historis dan proyeksi tahun 2025 dan 2030 proporsi individu yang menggunakan internet.

Proporsi individu yang menggunakan internet pada tahun 2010 masih sangat rendah, hanya sekitar 8,38%. Namun, mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2020, di mana proporsinya mencapai 55,12%. Hasil proyeksi untuk tahun 2030 menunjukkan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh tim penyusun, yaitu mencapai 100% (*scorecard* A). Bahkan, diproyeksikan bahwa sejak tahun 2023, individu di Kabupaten Bandung Barat dapat menggunakan internet secara menyeluruh.

bappelitbangda

BAB 5
Kesimpulan

Setiap wilayah mengalami hambatan dalam pencapaian TPB/SDGs berupa keterbatasan sumber daya. Tidak semua indikator dapat mencapai TPB/SDGs dengan pola kerja seperti biasanya atau *bussiness as usual* (BAU). Terutama, indikator yang masih belum mencapai tingkat kinerja yang baik dan memerlukan perhatian khusus serta upaya yang inovatif. Kajian ini merupakan *update* dari proyeksi pencapaian Kabupaten Bandung Barat yang telah dilakukan tahun lalu guna mengetahui tingkat kesiapan Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai TPB/SDGs. Hasil kajian berupa proyeksi pencapaian TPB/SDGs dengan nilai indikator yang ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- Nilai A (skor 4) diberikan jika hasil proyeksi mencapai atau hampir mencapai (97.5%) target TPB/SDGs.
- Nilai B (skor 3) diberikan jika hasil proyeksi pada tahun 2030 mendekati target TPB/SDGs setidaknya 90%.
- Nilai C (skor 2) diberikan apabila hasil proyeksi lebih dari 75% menuju target TPB/SDGs.
- Nilai D (skor 1) diberikan jika hasil proyeksi pencapaian indikator di tahun 2030 setidaknya mencapai 50% dari target TPB/SDGs.
- Nilai E (skor 0) diberikan jika indikator masih cukup jauh dari mencapai target TPB/SDGs (dibawah 50%).

Terdapat 66 indikator pilihan TPB/SDGs di Kabupaten Bandung Barat karena adanya keterbatasan data (98 jika mempertimbangkan subindikator) dengan perolehan nilai secara keseluruhan adalah 2,64 atau C. Pencapaian TPB/SDGs yang menyeluruh menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Bandung Barat apabila masih menggunakan skema BAU. Berikut ini adalah hasil proyeksi pencapaian SDGs hingga tahun 2030 berdasarkan *scorecard* TPB/SDGs:

Tabel 5-1 Jumlah indikator dengan *scorecard*

No.	*Scorecard*	Jumlah Indikator
1	A	39
2	B	14
3	C	22
4	D	12
5	E	9
6	Belum dapat ditentukan nilainya	2
7	Tidak dapat diproyeksi	5
Total		103

bappelitbangda

Sejumlah indikator memperoleh nilai C, D dan E menunjukkan perlunya perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pihak-pihak terlibat dalam pembangunan, agar pencapaian mereka dapat ditingkatkan. Penting untuk diingat bahwa peningkatan kinerja indikator ini tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan pola kerja seperti biasanya (*business as usual*), perlu adanya upaya tambahan, inovasi, dan kerjasama lintas sektor dari berbagai pihak. Sebagai pertimbangan, berikut ini adalah scorecard hasil kajian tahun ini dan tahun lalu:

Tabel 5-2 Perbandingan proyeksi pencapaian indikator SDGs Tahun 2022 dan 2023

Goal	Kode	Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023	Ket.
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	A	C	▼
1	1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40) (%)	A	A	—
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40)	D	D	—
1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)	D	D	—
1	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (B40)	B	B	—
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat (B40) (%)	A	A	—
1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat (B40) (%)	C	C	—
1	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat (B40) (%)	C	C	—
1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (B40)	A	A	—
1	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (1) akses pada layanan air minum		D	
1	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (2) akses pada layanan sanitasi dasar		C	
1	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar: (3) akses pada fasilitas penyehatan dasar		A	
1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (B40)	A	A	—
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (ks).	E	E	—
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (ms)	C	C	—

bappeda bangda

Goal	Kode	Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023	Ket.
2	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	A	E	▼
2	2.1.1.(a)	Prevelansi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	C	C	—
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	C	C	—
2	2.2.2*	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita.	A	A	—
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		A	
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan	A	A	—
3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	A	A	—
3	3.7.1*	Proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern	D	D	—
3	3.8.1.(a)	Proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan	B	C	▼
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih Besar 10%)	A	A	—
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih Besar 25%)	A	A	—
3	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		B	
3	3.A.1*	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau	D	D	—
4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	A	A	—
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	A	A	—
4	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	A	A	—
4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >=15 tahun.	C	C	—
4	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat	A	A	—
4	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/sederajat	C	C	—
4	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/sederajat	A	A	—
4	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	A	A	—
4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	C	C	—

bappeltbangda

Goal	Kode	Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023	Ket.
4	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	D	B	▲
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	A	A	—
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	A	A	—
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	B	D	▼
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	E	B	▲
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	A	B	▼
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	A	C	▼
4	4.5.1*	Rasio APK-SD antara Pedesaan dan Perkotaan		A	
4	4.5.1*	Rasio APK SD antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas		A	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	C	C	—
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	D	C	▲
4	4.5.1*	Rasio APK-SMA antara Pedesaan dan Perkotaan		D	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	B	A	▲
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	C	B	▲
4	4.5.1*	Rasio APK-SMP antara Pedesaan dan Perkotaan		B	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	B	B	—
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	E	E	—
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	A	A	—
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	A	B	▼
4	4.5.1*	Rasio APM-SD antara Pedesaan dan Perkotaan		A	
4	4.5.1*	Rasio APM-SD antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas		A	

bappeltbangda

Goal	Kode	Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023	Ket.
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	C	C	▬
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	D	D	▬
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	B	B	▬
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	C	C	▬
4	4.6.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya	A	A	▬
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk 15-59 tahun (%)	A	A	▬
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun (%)	A	A	▬
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun	B	A	▲
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun	C	B	▲
5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	E	E	▬
5	5.b.1*	Proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	C	D	▼
6	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	E	E	▬
6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	A	A	▬
6	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	A	A	▬
6	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	C	C	▬
7	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	A	A	▬
8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	D	E	▼
8	8.1.1.(a)	PDB per kapita (ribu rupiah)	E	E	▬
8	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	A	A	▬
8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal	D	D	▬
8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	D	E	▼
8	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	B	B	▬
8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja			
8	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	B	B	▬
8	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran			
8	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	C	C	▬

bappeltbangda

Goal	Kode	Indikator	Nilai 2022	Nilai 2023	Ket.
8	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta)	C	C	—
9	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	D	D	—
9	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband		A	
10	10.1.1*	Koefisien Gini	D	C	▲
10	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur		D	
10	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan	B	B	—
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	A	C	▼
11	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (1) meninggal		Tidak dapat diproyeksi	
11	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang (2) terkena dampak (luka)		Tidak dapat diproyeksi	
11	11.7.2(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		A	
16	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		A	
16	16.3.1.(a)	Proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi	A	E	▼
16	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	E	C	▲
16	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	C	A	▲
16	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun		A	
17	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		Tidak dapat diproyeksi	
17	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		Tidak dapat diproyeksi	
17	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.		Tidak dapat diproyeksi	
17	17.8.1	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	A	A	—

bappeltbangda

Indikator dengan nilai C, D, E diklasifikasikan berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial dengan rincian sebagai berikut:

- Bidang pendidikan ditunjukkan dengan rendahnya APK PAUD, APM SMP dan SMA; rata-rata lama sekolah yang masih rendah; tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/sederajat

yang masih rendah; tidak setaranya APK berdasarkan gender untuk perguruan tinggi dan SMA; tidak setaranya APK berdasarkan kuintil untuk SD dan SMA; tidak setaranya APK SMA di pedesaan dan perkotaan; tidak setaranya APM berdasarkan kuintil untuk SMP, SMA dan perguruan tinggi; tidak setaranya APM berdasarkan gender untuk SMA.

- Bidang kesehatan ditunjukkan dengan rendahnya sumber air dan sanitasi layak; tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan; tingginya angka *stunting* dan *underweight*; tingginya angka penduduk di bawah 15 tahun yang merokok; rendahnya penggunaan alat kontrasepsi; serta tingginya proporsi penduduk yang sakit namun tidak berobat jalan.
- Bidang ekonomi ditunjukkan dengan tingginya presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; rendahnya PDB per kapita dan lajunya; tingginya lapangan kerja informal; rendahnya tenaga kerja formal (termasuk tenaga kerja industri manufaktur); rendahnya angka usia muda yang tidak bersekolah dan tidak bekerja; rendahnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara; serta tingginya koefisien gini.
- Bidang sosial ditunjukkan dengan rendahnya rendahnya proporsi rumah yang memiliki hak atas tanah milik sendiri terutama kontrak/sewa; rendahnya proporsi perempuan yang menempati managerial; rendahnya proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir; rendahnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau; rendahnya proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi; serta rendahnya proporsi anak berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran;.

Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia, pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan seleksi atau menetapkan prioritas untuk mencapai indikator-indikator tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan seleksi ini adalah dengan menggunakan analisis keterkaitan SDGs yang telah disiapkan oleh SDGs Center Unpad untuk Kabupaten Cirebon (Komarulzaman dkk, 2020). Fokus indikator prioritas dapat diarahkan pada kemiskinan dan stunting, dengan dukungan optimalisasi pencapaian indikator lainnya seperti proporsi perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu oleh tenaga kesehatan, kepemilikan akta kelahiran, rumah tangga dengan akses air minum yang layak dan sanitasi yang layak, tingkat penyelesaian SMP, tempat tinggal yang layak dan terjangkau, APM SD berdasarkan gender dan kuintil, serta penduduk yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan sesuai dengan bagan di bawah ini.

bappelitbangda



Gambar 5-1 Bagan Rekomendasi Indikator SDGs Prioritas Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

Daftar Pustaka

Alisjahbana, A.S. dan Endah Murniningtyas. (2020) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi. Unpad Press.

Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018a). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): a review of evidence from countries. Sustainability Science 2018 13:5, 13(5), 1453–1467. https://doi.org/10.1007/S11625-018-0572-3

Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018b). Prioritising SDG targets: assessing baselines, gaps and interlinkages. Sustainability Science 2018 14:2, 14(2), 421–438. https://doi.org/10.1007/S11625-018-0596-8

Bappenas. (2019). Peta Jalan SDGs Indonesia: Menuju 2030.

David R. Anderson, D. J. (2012). Quantitative Methods for Business. Cengage Learning.

Diebold, F. X. (2007). Forecasting: Applications and Methods. Cengage Learning India Private Limited.

Ellen Van de Poel, Ahmad Reza Hosseinpoor, Caroline Jehu-Appiah, Jeanette Vega, & Niko Speybroeck. (2007). Malnutrition and the disproportional burden on the poor: the case of Ghana. International Journal for Equity in Health, 6. https://doi.org/10.1186/1475-9276-6-21

El-Maghrabi, M. H., Gable, S., Osorio-Rodarte, I., & Verbeek, J. (2018). Sustainable Development Goals Diagnostics. Sustainable Development Goals Diagnostics: An Application of Network Theory and Complexity Measures to Set Country Priorities. https://doi.org/10.1596/1813-9450-8481

FAO. (2018). Regional Overview of Food Security and Nutrition.

Heriyaldi, Komarulzaman, A., Zuzy, A., Yusuf, A. A., Andoyo, R., Amatul, A., Putri, G., & Halim, R. (2021). Potensi Dampak COVID-19 terhadap Prevalensi Stunting Kab. Bekasi. Unpad Press. http://press.unpad.ac.id

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020) Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Edisi II. Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

bappelitbangda

Khan MM, & Kraemer A. (2009, August). Factors associated with being underweight, overweight and obese among ever-married non-pregnant urban women in Bangladesh - PubMed. Singapore Med J. . https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19710981/

Komarulzaman dkk. (2020). Studi SDGs Interlinkages Kabupaten Cirebon. Unpad Press.

le Blanc, D. (2015). Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets. Sustainable Development, 23(3), 176–187. https://doi.org/10.1002/sd.1582

Mukarram, M. (2020). Impact of COVID-19 on the UN Sustainable Development Goals (SDGs). Strategic Analysis, 44(3), 253–258. https://doi.org/10.1080/09700161.2020.1788363

Sekretariat SDGs Indonesia. (2017). Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia. Diakses dari BAPPENAS - Sekretariat SDGs di Indonesia.

UNESCAP. (2016). Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report 2016: Adapting the 2030 Agenda for Sustainable Development at the National Level | ESCAP. United nations. https://www.unescap.org/publications/asia-pacific-countries-special-needs-development-report-2016-adapting-2030-agenda

Wooldridge, J. M. (2015). Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage Learning.

Zuzy Anna, Ahmad Komarulzaman, Robi Andoyo, A. K. (2018). Laporan Akhir - Studi Baseline Kab. Bekasi.

bappelitbangda